









BPSDM

Laporan Kinerja Tahun 2019

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Laporan Kinerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2019

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kata Pengantar



Ir. Lolly Martina Martief, MT
Kepala Badan Pengembangan SDM

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya serta dukungan seluruh rekan kerja sehingga Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah selesai disusun. Laporan Kinerja BPSDM ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan BPSDM Tahun anggaran 2019.

Program dan kegiatan BPSDM mempunyai tujuan mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berintegritas, orientasi misi, profesional, visioner dan etika-akhlakul karimah (iProve). Pada era percepatan pembangunan ini, SDM PUPR mempunyai peran yang sangat penting. SDM PUPR menjadi motor penggerak dalam pembangunan infrastruktur, sehingga harus mumpuni dari sisi teknis serta memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai PUPR. SDM PUPR juga sesuai dengan mottonya

MOTTO SDM PUPR

"BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, DAN BERTINDAK TEPAT"

diharapkan mampu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan sampai dengan pengawasan pembangunannya. Melihat pentingnya peran SDM tersebut, BPSDM telah melakukan berbagai upaya strategis dalam pengembangan SDM selama tahun 2019. Seluruh kegiatan telah diselaraskan dengan kebutuhan Unit Organisasi, sebagai *problem solver* di lapangan serta pemenuhan *gap* kompetensi SDM PUPR.

Tahun 2019, sesuai dengan perubahan kedua Renstra Kementerian PUPR, program Pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh BPSDM, mempunyai sasaran

Sasaran Program Pengembangan SDM

MENINGKATNYA SDM PUPR YANG KOMPETEN

dengan indikator kinerja adalah

PERSENTASE PENINGKATAN SDM PUPR YANG KOMPETEN

Melalui Laporan Kinerja tahun 2019 ini, digambarkan kinerja yang telah dicapai BPSDM selama tahun 2019 dalam mewujudkan SDM PUPR yang kompeten. Tidak dapat dipungkiri dalam pencapaian tahun 2019, masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi, untuk itu masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar dapat meningkatkan kinerja ke depan.

Jakarta, Januari 2020
Kepala Badan Pengembangan SDM



Ir. Lolly Martina Martief, MT
Kepala Badan Pengembangan SDM
NIP. 196001101988032001

Ringkasan Eksekutif



Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atas penyelenggaraan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) selama tahun anggaran 2019. Pelaksanaan program pengembangan SDM mempunyai sasaran **"Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten"**, dengan indikator kinerja adalah **"Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten"**. Pada tahun 2019, target persentase peningkatan SDM PUPR yang kompeten, yang harus dicapai BPSDM adalah sebesar 75%. Target ini merupakan target kumulatif dari tahun 2015 sampai tahun 2019, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPSDM.



Dalam mencapai sasaran program pengembangan SDM, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, diantaranya yang menjadi kegiatan utama adalah penilaian kompetensi, pemantauan kinerja, pemetaan karir, pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan), pengembangan jabatan fungsional, dan pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Badan, 4 (empat) Pusat, Politeknik Pekerjaan Umum dan 12 (dua belas) Balai. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran program pengembangan SDM ini, telah didesain dengan menyesuaikan kebutuhan strategis unit organisasi, *problem solver* di lapangan serta pemenuhan *gap* kompetensi SDM PUPR. Sehingga, kegiatan BPSDM tahun 2019 dapat lebih bermanfaat bagi organisasi Kementerian PUPR.



BPSDM dalam melaksanakan program pengembangan SDM tahun 2019, mendapat amanah pagu anggaran sebesar Rp 456.489.248.000. Pagu anggaran ini dialokasikan pada setiap unit kerja untuk digunakan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis, reguler, dan pendukung guna menghasilkan *output* dan mencapai *outcome* BPSDM yang lebih efektif. Ditinjau dari realisasi keuangan dan fisik, kinerja BPSDM tahun 2019 termasuk dalam kategori memuaskan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp425.378.664.000 (93,18%) dan realisasi fisik sebesar 99,73%. BPSDM juga telah berhasil mewujudkan SDM PUPR yang kompeten sebanyak 10.780 orang di tahun 2019.

Dengan demikian, sesuai metode pengukuran yang telah ditetapkan BPSDM bahwa capaian akan dihitung secara kumulatif, maka dengan memperhatikan capaian sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 yaitu sebanyak 27.087 orang dan di tahun 2019 sebanyak 10.780 orang sehingga total kumulatif capaian akhir di tahun 2019 adalah sebanyak 37.867 orang atau 87,37% dari baseline 43.338 orang SDM PUPR. Angka *baseline* ini diperoleh dari jumlah seluruh SDM PUPR Pusat di tahun 2019 yaitu 22.787 orang ditambahkan jumlah SDM PUPR Daerah yang mengikuti peningkatan kompetensi pada tahun 2015 - 2019 yaitu sebanyak 20.551 orang.

Sehingga, kinerja BPSDM yang dihitung dengan membandingkan target dan capaian sasaran program Pengembangan SDM adalah sebesar 116,50%. BPSDM juga melalui pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerjanya telah berhasil mewujudkan 12.448 orang ASN yang terlatih yang terdiri atas 11.373 orang melalui pelatihan dengan pembiayaan DIPA dan 1.075 orang melalui pelatihan kerjasama, 361 orang terdidik melalui penyelenggaraan pendidikan, 20.034 orang terpantau kinerjanya melalui penyelenggaraan pemantauan kinerja, 3.748 orang telah dinilai kompetensinya melalui penilaian kompetensi, 2.131 orang telah dipetakan karirnya melalui pemetaan karir, 137 orang yang mengikuti pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum, dan melaksanakan pengembangan jabatan fungsional sebanyak 464 orang.

Berbagai capaian yang diperoleh BPSDM tidak terlepas dari kinerja seluruh unsur organisasi BPSDM serta dukungan dan kerjasama dari para stakeholder terkait. Atas kinerja seluruh unsur organisasi BPSDM serta dukungan para stakeholder, berbagai penghargaan dari pihak ketiga juga diperoleh BPSDM sepanjang 2019, diantaranya BPSDM terakreditasi sebagai Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang PUPR oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), beberapa Balai berhasil memperoleh akreditasi Pelatihan Kepemimpinan oleh LAN dan akreditasi sebagai penyelenggara pelatihan dan uji sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM antara lain kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menerbitkan sertifikat pelatihan elektronik untuk semua pelatihan yang diselenggarakan BPSDM, pengembangan aplikasi SIMANTU dan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPSDM. Kedepannya BPSDM akan terus melakukan perbaikan guna mencapai *outcome* dan manfaat pengembangan SDM yang lebih optimal.



Daftar Isi

Kata Pengantar ii
Ringkasan Eksekutif iv
Daftar Isi vii
Daftar Lampiran viii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar xi

I Pendahuluan 13
BAB SATU
1.1 Latar Belakang 14
1.2 Tugas dan Fungsi 16
1.3 Struktur Organisasi 18
1.4 Isu Strategis 22

II Perencanaan Kinerja 27
BAB DUA
2.1 Uraian Singkat Renstra 28
2.2 Perjanjian Kinerja 33
2.3 Metode Pengukuran 36
2.4 Target Tahun 2019 Menurut Renstra 45

III Kapasitas Organisasi 49
BAB TIGA
3.1 Sumber Daya Manusia 50
3.2 Sarana dan Prasarana 63
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 67

IV Akuntabilitas Kinerja 73
BAB EMPAT
4.1 Capaian Kinerja Badan Pengembangan SDM 74
4.2 Perbandingan Kinerja Badan Pengembangan SDM 104
4.3 Realisasi Anggaran 120

V Penutup 129
BAB LIMA



Daftar Lampiran

Lampiran I 134
- Perjanjian Kinerja Eselon I
- Perjanjian Kinerja Eselon II
- Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis

Lampiran II 174
- Dokumen Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk BPSDM Tahun Anggaran 2019

Lampiran III 190
- Pengukuran Kinerja

Lampiran IV 192
- Pengakuan Pihak Ke-Tiga kepada BPSDM

Lampiran V 199
- Matriks Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Pelatihan

Lampiran VI 206
- Daftar Perguruan Tinggi Mitra Beserta Program Studi

Lampiran VII 208
- Dokumentasi Pelaksana Pelatihan di BPSDM

Lampiran VIII 223
- Dokumentasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan BPSDM

Lampiran IX 230
- Dokumen Rincian Peserta Pelatihan

Lampiran X 236
- Lembar Kesepakatan Capaian Program Pengembangan SDM Tahun 2018

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM 2015-2019	29
Tabel 2.2	Matriks Sasaran Kegiatan pada Program Pengembangan SDM 2015-2019	31
Tabel 2.3	Matriks Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2019	33
Tabel 2.4	Unsur Perhitungan Capaian Program Pengembangan SDM	38
Tabel 2.5	Matriks Target Sasaran Program Pengembangan SDM dan Baseline Perhitungan	39
Tabel 2.6	Perhitungan Capaian Kegiatan Pengembangan SDM	40
Tabel 2.7	Sasaran Program Badan Pengembangan SDM Tahun 2019	45
Tabel 2.8	Target Kegiatan Badan Pengembangan SDM Tahun 2019 Menurut Renstra	46
Tabel 3.1	Rekapitulasi Jumlah PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 3.2	Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang	53
Tabel 3.3	Rekapitulasi Jumlah PNS,Non PNS dan Konsultan Individu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	56
Tabel 3.4	Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Kelompok Jabatan	59
Tabel 3.5	Rekapitulasi Jumlah PNS dan Non PNS Berdasarkan Kelompok Usia	60
Tabel 3.6	Rekapitulasi Pelatihan Bersertifikasi untuk Pegawai BPSDM	62
Tabel 3.7	Sarana dan Prasarana di Badan Pengembangan SDM	63
Tabel 3.8	Pagu Anggaran Badan Pengembangan SDM T.A 2019	67
Tabel 3.9	Target *Output* Kegiatan BPSDM Berdasarkan DIPA 2019	69
Tabel 4.1	Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja	74
Tabel 4.2	Unsur Perhitungan Capaian Program Pengembangan SDM	76
Tabel 4.3	Rekapitulasi Capaian SDM yang Kompeten	78
Tabel 4.4	Target dan Capaian Sasaran Program Pengembangan SDM Bidang PUPR Tahun 2019	79
Tabel 4.5	Capaian *Output* Kegiatan Pada Program Pengembangan SDM Bidang PUPR	80
Tabel 4.6	*Output* Kegiatan Utama Pengembangan SDM Bidang PUPR Tahun 2019	85
Tabel 4.7	Rekapitulasi Capaian Penilaian Kompetensi ASN PUPR	87
Tabel 4.8	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kompetensi	88
Tabel 4.9	Rekapitulasi Capaian ASN yang Terpantau Kinerjanya	89

Daftar Tabel

Tabel 4.10	Rekapitulasi SDM PUPR yang Bersertifikasi Pihak Ketiga	94
Tabel 4.11	Rekapitulasi Jumlah ASN yang Terdidik	96
Tabel 4.12	Pola dan Teknik Kediklatan Bidang SDA dan Konstruksi	98
Tabel 4.13	Kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang SDA dan Konstruksi	98
Tabel 4.14	Pelaksanaan Uji Coba Sistem Pelatihan Teknologi	99
Tabel 4.15	Pola dan Teknik Kediklatan Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	100
Tabel 4.16	Kurikulum dan Modul Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	100
Tabel 4.17	Kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hasil Uji Coba	101
Tabel 4.18	Pola, Kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	101
Tabel 4.19	Detail Capaian Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional	102
Tabel 4.20	Perbandingan Capaian Sasaran Program Pengembangan SDM	104
Tabel 4.21	Perbandingan Capaian Kegiatan Badan Pengembangan SDM Terhadap Target DIPA Tahun 2019 dan Target Lima Tahunan (Renstra 2015-2019)	112
Tabel 4.22	Perbandingan Capaian *Output* Utama Badan Pengembangan SDM Terhadap Target DIPA Tahun 2019 dan Target Lima Tahunan (Renstra 2015-2019)	118
Tabel 4.23	Realisasi Anggaran Unit Kerja di Badan Pengembangan SDM	122
Tabel 4.24	Realisasi Anggaran Berdasarkan *Output* Utama Kegiatan Pengembangan SDM	124
Tabel 4.25	Realisasi Anggaran Kegiatan di Badan Pengembangan SDM	124

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pengembangan SDM	18
Gambar 1.2	Wilayah Kerja Balai di Lingkungan Badan Pengembangan SDM	21
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2019	34
Gambar 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2019	35
Gambar 3.1	Grafik Komposisi Jumlah PNS, Non PNS dan Konsultan Individual	50
Gambar 3.2	Grafik Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang	53
Gambar 3.3	Grafik Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	55
Gambar 3.4	Grafik Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Kelompok Jabatan	58
Gambar 3.5	Grafik Komposisi Jumlah Pejabat Fungsional (JFT) Berdasarkan Jenjang Jabatan	58
Gambar 4.1	Grafik Komposisi Peserta Pelatihan SDM PUPR Pusat Berdasarkan Kelulusan	76
Gambar 4.2	Grafik Komposisi Peserta Pelatihan SDM PUPR Daerah Berdasarkan Kelulusan	77
Gambar 4.3	Grafik Komposisi SDM PUPR yang Mengikuti Pendidikan Karyasiswa	77
Gambar 4.4	Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Kategori Kompeten dan Belum Kompeten	78
Gambar 4.5	Grafik Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Sumber Pendanaan	91
Gambar 4.6	Grafik Komposisi Peserta Pelatihan Pusat dan Daerah	91
Gambar 4.7	Grafik Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin	92
Gambar 4.8	Grafik Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Tingkat Kelulusan	92
Gambar 4.9	Grafik Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Unit Kerja Penyelenggara	92
Gambar 4.10	Grafik Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Bidang Pelatihan	93
Gambar 4.11	Grafik Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Predikat Kelulusan	93

Pendahuluan



Laporan Kinerja 2019
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



BAB SATU

1.1	Latar Belakang	14
1.2	Tugas dan Fungsi	16
1.3	Struktur Organisasi	18
1.4	Isu Strategis	22

1.1 Pendahuluan



Infrastruktur memiliki peran penting sebagai salah satu fondasi perekonomian sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama nasional sejak tahun 2015. Dalam pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan modal utama dalam mencapai keberhasilan mewujudkan infrastruktur PUPR yang berkualitas serta handal.



Badan Pengembangan SDM (BPSDM) sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pada periode 2015-2019, bagi BPSDM untuk dapat mewujudkan SDM PUPR yang kompeten melalui pelaksanaan program pengembangan SDM. Terkait hal tersebut, BPSDM memiliki sasaran program yaitu

> **Sasaran Program Pengembangan SDM**
>
> **MENINGKATNYA SDM PUPR YANG KOMPETEN**

dengan target setiap tahunnya merupakan besarnya persentase peningkatan SDM PUPR yang Kompeten.

Program pengembangan SDM yang dilaksanakan BPSDM selama tahun 2019 telah mengarah pada terwujudnya SDM PUPR yang kompeten, yang mampu melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur guna mencapai target-target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2019. Tahun terakhir untuk periode pembangunan 2015 – 2019 serta melihat juga besarnya tantangan global pembangunan infrastruktur, membutuhkan SDM PUPR yang mampu bekerja cepat, tepat waktu, tepat



mutu serta tepat biaya. Dengan demikian program pengembangan SDM tahun 2019 perlu disesuaikan dengan kebutuhan strategis unit organisasi, temuan/dinamika di lapangan, gap kompetensi SDM PUPR serta tantangan global yang berkembang saat ini.

Sejak tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2018, BPSDM telah berhasil mewujudkan SDM PUPR yang kompeten sebanyak 27.087 orang (tertuang pada Laporan Kinereja BPSDM Tahun 2018) atau sebesar 68,79% sebagai persentase peningkatan SDM PUPR yang kompeten.

Pada tahun 2019, BPSDM memiliki target sasaran program sebesar 75%.

Target ini merupakan target komulatif 2015-2019 yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019.

Menyesuaikan jumlah SDM PUPR Pusat saat ini dan adanya penambahan jumlah SDM PUPR yang mengikuti peningkatan kompetensi sampai dengan 2019, maka baseline yang digunakan pada tahun 2019 sebagai dasar pengukuran capaian adalah 43.338 orang SDM PUPR. Penyesuaian angka baseline ini diperoleh dari jumlah SDM PUPR Pusat tahun 2019 sebanyak 22.787 orang ditambah jumlah SDM PUPR Daerah yang mengikuti peningkatan kompetensi dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 20.551 orang. Sehingga, target 75% yang harus dicapai BPSDM jika dikuantitatifkan dari 43.338 orang SDM PUPR adalah 32.503 orang yang harus meningkat kompetensinya secara kumulatif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Memperhatikan pentingnya SDM dalam mencapai target pembangunan infrastruktur, BPSDM berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mencetak SDM PUPR yang kompeten.

Oleh karena itu, pelaksanaan program pengembangan SDM telah dirancang secara sistematis mulai dari penilaian kompetensi, pemantauan kinerja, pemetaan karir, pengembangan jabatan fungsional serta pengembangan kompetensi SDM. Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara efektif guna mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.



Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai dari target dan capaian kinerja Badan Pengembangan SDM perlu dituangkan dalam sebuah laporan kinerja. Laporan Kinerja disusun sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Badan Pengembangan SDM sebagai Entitas Akuntablitas Kinerja mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja juga disusun untuk dapat memberikan informasi capaian kinerja kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja ke depan.

Laporan Kinerja BPSDM disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan program pengembangan SDM selama tahun anggaran 2019. Melalui Laporan Kinerja ini, tergambar juga bagaimana proses pelaksanaan program pengembangan SDM dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki baik berupa anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta digambarkan juga efektifitas dan efisiensi yang diperoleh dalam mencapai sasaran program Badan Pengembangan SDM.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDM menyelenggarakan fungsi:

a. **Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;**
b. **Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;**
c. **Pelaksanaan penilaian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;**
d. **Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;**

e. **Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;**
f. **Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan**
g. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPSDM memiliki 5 (lima) unit kerja setingkat eselon II, yaitu:

1 Sekretariat Badan Pengembangan SDM

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM.

2 Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan karir, serta pemantauan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia di Kementerian.

3 Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelengggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.

4 Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

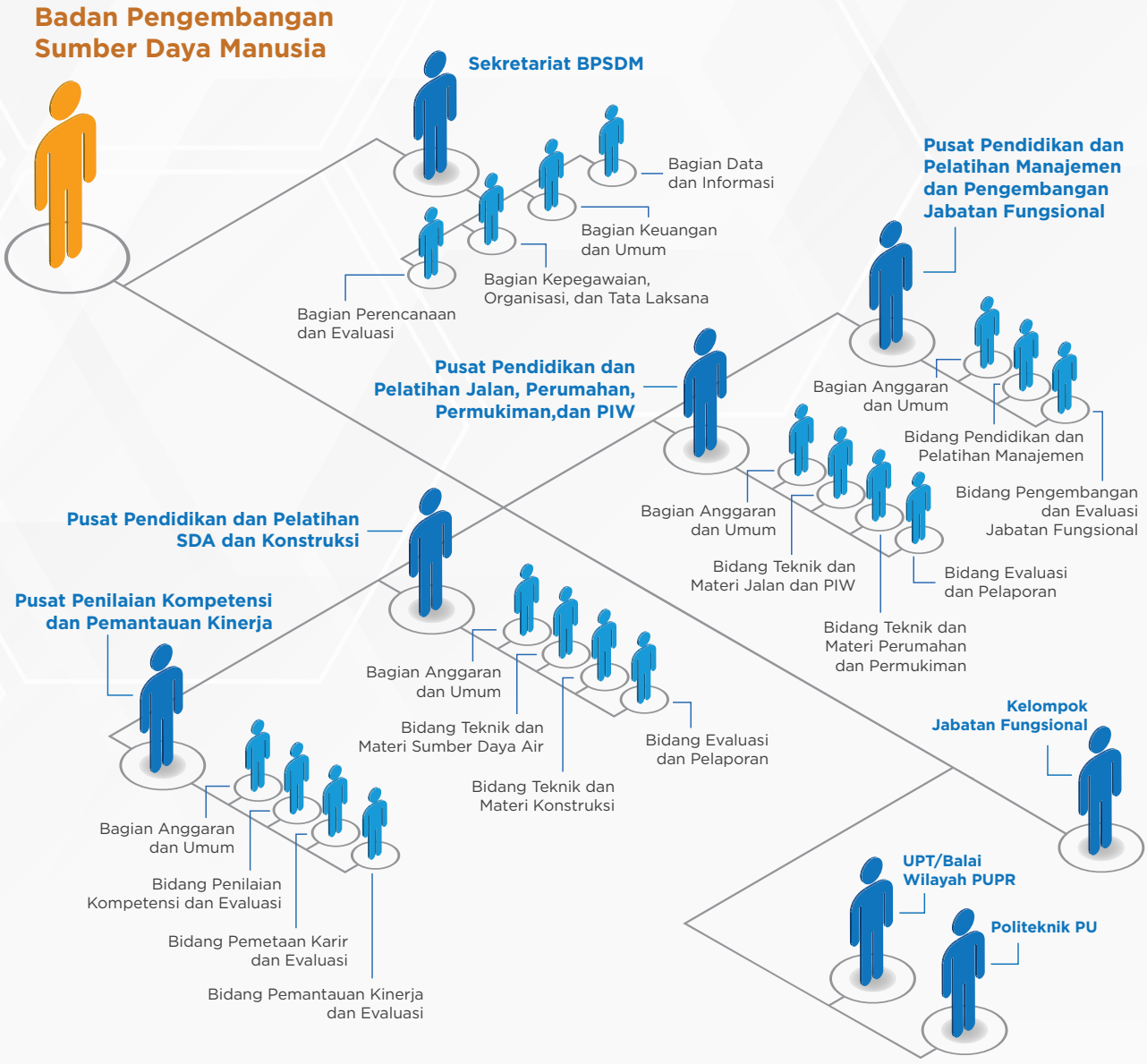
5 Pusdiklat Manajemen dan Pelatihan Manajamen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen, serta pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional.

6 Politeknik Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 06/PRT/M/2019 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum, telah dibentuk Politeknik Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum. Politeknik Pekerjaan Umum berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengembangan SDM

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR

BPSDM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan teknis operasional dalam pelaksanaan pengembangan SDM. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, UPT di BPSDM terdiri dari:

1 Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX

Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat) pegawai bidang PUPR. Balai Diklat PUPR berada di 9 (sembilan) wilayah yaitu:

a. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah I Medan

Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah I Medan mencakup Prov. Sumatera Utara; Prov. Aceh; Prov. Riau; Prov. Kepulauan Riau; dan Prov. Sumatera Barat.

b. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah II Palembang

Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah II Palembang mencakup Prov. Sumatera Selatan; Prov. Kep. Bangka Belitung; Prov. Jambi; Prov. Bengkulu; dan Prov. Lampung.

c. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah III Jakarta

Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah III Jakarta mencakup Prov. DKI Jakarta; Kota Bogor; Kota Depok; Kota Bekasi; Kota Tangerang; dan Kota Tangerang Selatan.

d. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung

Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah IV Bandung mencakup Prov. Jawa Barat (selain Kota Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi); dan Prov. Banten (selain Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan).





e. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Yogyakarta

Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah V Yogyakarta mencakup Prov. DI Yogyakarta; Prov. Jawa Tengah; Kabupaten Ponorogo; dan Kabupaten Pacitan.

f. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah VI Surabaya mencakup Prov. Jawa Timur (Selain Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan); Prov. Bali; Prov. Nusa Tenggara Barat; dan Prov. Nusa Tenggara Timur.

g. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VII Banjarmasin

Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah VII Banjarmasin mencakup Prov. Kalimantan Selatan; Prov. Kalimantan Timur; Prov. Kalimantan Tengah; Prov. Kalimantan Barat; dan Prov. Kalimantan Utara.

h. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VIII Makassar

Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah VIII Makassar mencakup Prov. Sulawesi Selatan; Prov. Sulawesi Utara; Prov. Sulawesi Barat; Prov. Sulawesi Tengah; Prov. Sulawesi Tenggara; Prov. Gorontalo; dan Prov. Maluku Utara.

i. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IX Jayapura

Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Wilayah IX Jayapura mencakup Prov. Papua; Prov. Papua Barat; dan Prov. Maluku.

2 Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. Balai ini berlokasi di Bandung, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia.



3 Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan PIW

Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan uji coba sistem pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Balai ini berlokasi di Bandung, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

4 Balai Penilaian Kompetensi

Balai Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian potensi, kompetensi dan unjuk kerja meliputi seleksi, pemetaan, penempatan, dan pengelolaan kerjasama untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Balai ini berlokasi di DKI Jakarta, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Indonesia.



1. Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan
2. Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang
3. Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta
   - Balai Penilaian Kompetensi
4. Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung
   - Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi
   - Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan PIW
5. Politeknik PU Semarang
6. Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta
7. Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya
8. Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin
9. Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar
10. Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura

Gambar 1.2 Wilayah Kerja Balai di Lingkungan Badan Pengembangan SDM

1.4 Isu Strategis



Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu program penting dan utama yang dilakukan Kementerian PUPR melalui BPSDM untuk mencetak SDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berkualitas, sesuai dengan visi dan misi pemerintah. Beberapa isu strategis dan tantangan dalam pelaksanaan pengembangan SDM adalah sebagai berikut:

a. Era Revolusi Industri 4.0

Era industri 4.0 ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Tidak terkecuali juga bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sumber Daya Manusia yang kompeten adalah salah satu faktor utama penentu keberhasilan transformasi era 4.0. Oleh karena itu, penting untuk menyiapkan SDM yang kompeten untuk memanfaatkan teknologi terbaru dalam pembangunan infrastruktur.

b. *Competitive* Global

ASN PUPR harus mampu beralih dari *comfort zone* menuju *competitive zone*, wajib menguasai IT digital, dan adaptif terhadap setiap perubahan. Pengembangan kompetensi ASN harus disesuaikan untuk dapat mencetak SDM yang ahli berstandar nasional bahkan internasional, sehingga dapat bersaing secara global. Pada era *competitive* global, setiap ASN PUPR harus memiliki keahlian yang menjadi modal dalam persaingan dunia pekerjaan. Badan Pengembangan SDM dituntut untuk dapat mencetak SDM ahli berstandar internasional akan semakin banyak di era *competitive* global.

c. Pengembangan SDM menjadi salah satu visi pemerintah 2020 – 2024

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus pemerintah disamping pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah menetapkan prioritas dalam pengembangan SDM yaitu melalui *vocational training*, *vocational school* dan manajemen talenta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan jumlah SDM (baik Aparatur maupun non Aparatur) yang terlibat sangat besar dalam pelaksanaan tugasnya, harus dapat melaksanakan pengembangan SDM nya sesuai dangan amanat yang tertuang dalam visi pemerintah 2020 – 2024.

d. Kebutuhan SDM Terampil (*skillfull*)



Industri konstruksi di Indonesia saat ini masih membutuhkan banyak SDM konstruksi seiring dengan pesatnya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan Kementerian PUPR, setiap kenaikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 1 triliun dibutuhkan tambahan 14.000 orang tenaga konstruksi, sementara berdasarkan data BPS pada tahun 2017 menggambarkan, *unskilled labour* (tenaga kerja tidak terampil) di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMA, dan sebanyak 74% tenaga konstruksi merupakan level pekerja tukang atau pembantu tukang. Untuk meningkatkan kapasitas SDM konstruksi dari yang tidak terampil menjadi SDM terampil merupakan suatu kebutuhan yang mendesak.

Badan pengembangan SDM pada akhir tahun 2018 sudah merintis pelaksanaan peningkatan keterampilan SDM di bidang konstruksi melalui program pendidikan vokasi (*vocational school*), dengan pembentukan Politeknik PU. Saat ini daya tamping Politeknik PU per tahun masih sebanyak 450 orang, sehingga dari segi kuantitas masih dikatakan belum dapat mencukupi kebutuhan SDM terampil. Oleh karena itu, masih perlu pengembangan program pendidikan vokasi untuk dapat mencetak lebih banyak SDM terampil.

e. Percepatan Pembangunan Infrastruktur PUPR

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus dapat berdampak langsung sehingga pemerintah menekankan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan konektivitas khususnya untuk kawasan produktif. Langkah percepatan perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan sehingga diharapkan seluruhnya tercapai pada periode yang telah ditetapkan. Pengembangan SDM merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang menekankan pada konektivitas dan keberlanjutan. Melalui program pengembangan SDM, tentunya akan dapat meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Dengan bekal SDM yang kompeten, pelaksanaan pembangunan semestinya dapat dilakukan lebih cepat lagi, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Setiap tahunnya Badan Pengembangan SDM telah melaksanakan pelatihan sebanyak kurang lebih 11.000 orang untuk meningkatkan kompetensi SDM PUPR.



f. Pengembangan SDM berbasis kinerja dan berbasis kompetensi

Pengembangan SDM sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 harus didasarkan pada sistem merit yaitu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan. Pengembangan SDM mulai dari awal karir sampai dengan akhir masa tugas harus dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja yang dipersyaratkan. Penerapan sistem merit dalam pengembangan SDM sangat diperlukan dalam rangka perbaikan kinerja pegawai yang berujung pada perbaikan kinerja organisasi. Langkah yang telah dilakukan selama ini dalam penerapan sistem merit di Kementerian PUPR, diantaranya mulai dari pelaksanaan penilaian kompetensi yang sudah dilakukan rata-rata 6.000 orang per tahun, pemantauan kinerja seluruh ASN Kementerian PUPR, dan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan dengan setiap tahunnya rata-rata 11.000 orang dan juga melalui pendidikan yang setiap tahunnya rata-rata 500 orang. Pengembangan penerapan sistem merit khususnya yang berbasis teknologi masih sangat diperlukan kedepannya.

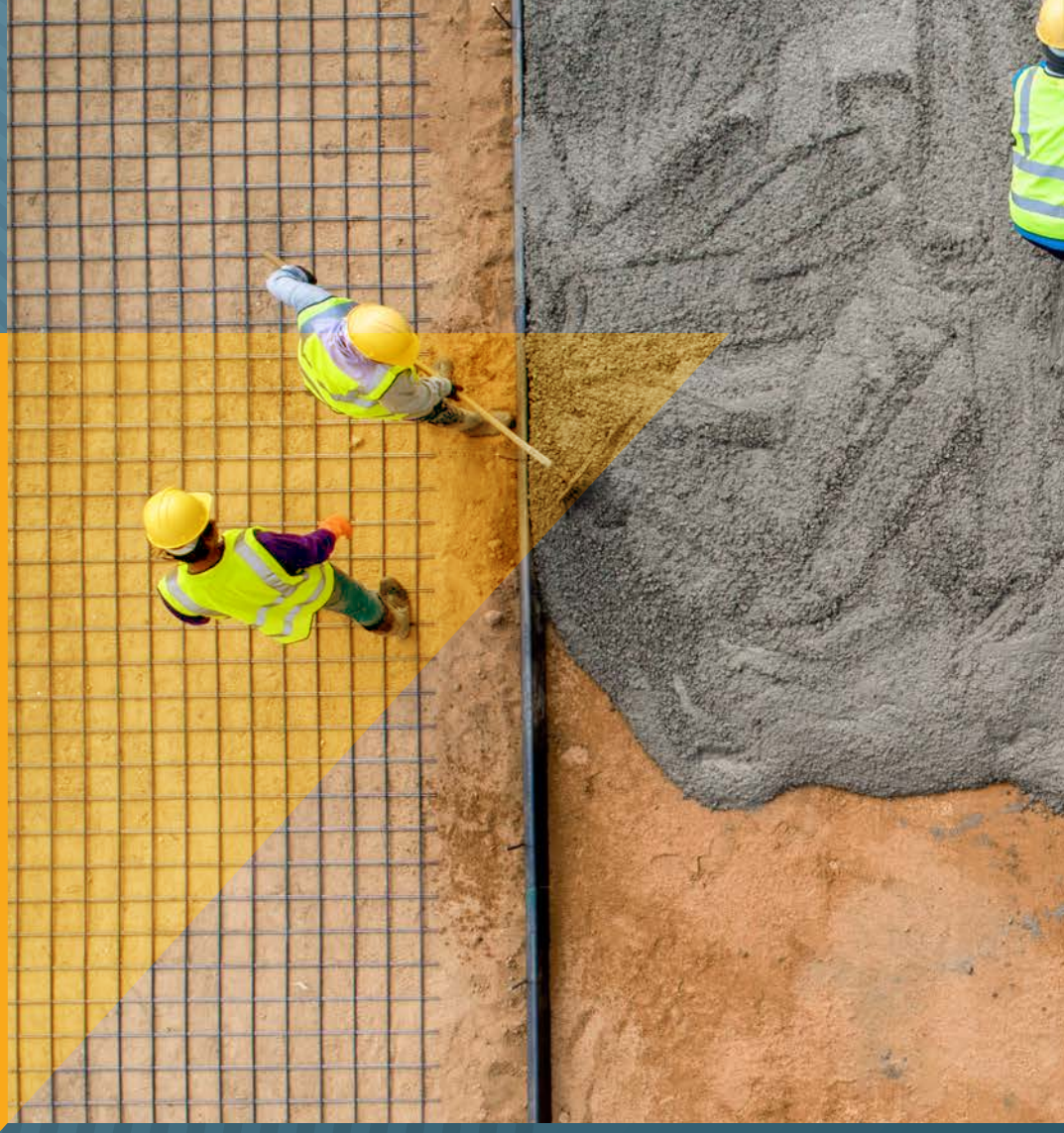
g. Penyederhanaan Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Bentuk nyata dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah salah satunya adalah penyederhanaan birokrasi melalui eselonisasi. Menurut Kementerian PAN dan RB, eselonisasi akan dilakukan melalui langkah-langkah diantaranya penataan organisasi, penataan jabatan fungsional dan transformasi jabatan. Badan Pengembangan SDM yang mempunyai tugas salah satunya melaksanakan pengembangan jabatan fungsional, perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk penataan jabatan fungsional dan transformasi jabatan yang akan lebih banyak difokuskan pada jabatan fungsional. Peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas jabatan fungsional di Kementerian PUPR sangat dibutuhkan.

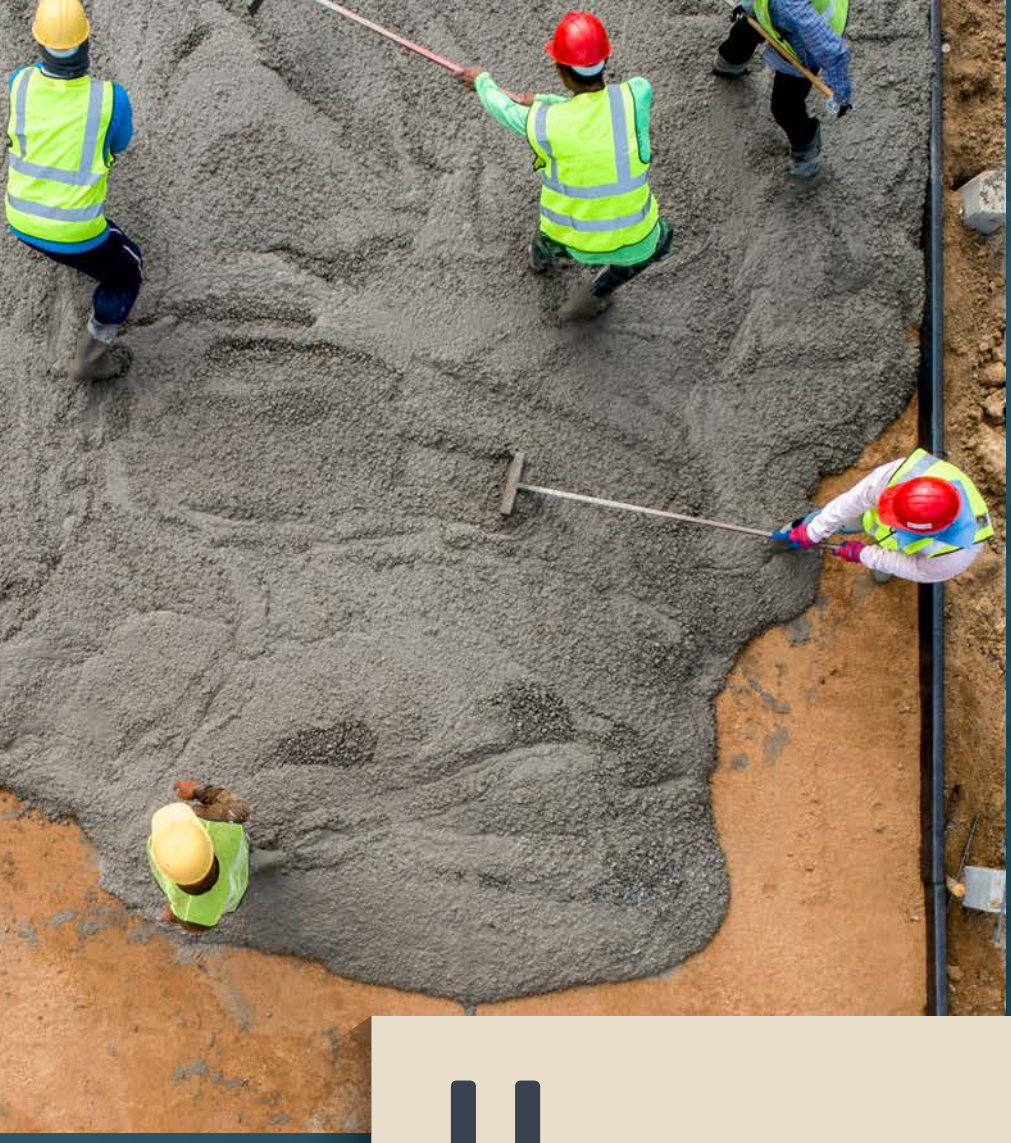




Perencanaan Kinerja



Laporan Kinerja 2019
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



II

BAB DUA

2.1	Uraian Singkat Renstra	28
2.2	Perjanjian Kinerja	33
2.3	Metode Pengukuran	36
2.4	Target Tahun 2019 Menurut Renstra	45

2.1 Uraian Singkat Renstra



Kementerian PUPR mempunyai visi di tahun 2015-2019 yaitu

> **"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG**

Visi tersebut tentunya dapat tercapai dengan dukungan SDM PUPR yang kompeten. Sebagai unit organisasi di Kementerian PUPR yang mempunyai tanggung jawab mewujudkan SDM PUPR yang kompeten, BPSDM mempunyai visi yang sama dengan visi kementerian PUPR. Dalam mencapai visinya, BPSDM mempunyai misi sebagai berikut:

1. **Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM bidang PUPR Pusat dan Daerah;**
2. **Melaksanakan pengembangan karir, penilaian kompetensi, dan evaluasi kinerja SDM PUPR;**
3. **Meningkatkan kompetensi SDM PUPR;**
4. **Melaksanakan pengembangan jabatan fungsional SDM bidang PUPR.**





Misi yang dilakukan BPSDM dalam mencapai visinya, juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM PUPR. Tujuan tersebut dicapai melalui program pengembangan SDM dengan sasaran program

> MENINGKATNYA SDM PUPR YANG KOMPETEN

dan indikator kinerja program yaitu

> PERSENTASE PENINGKATAN SDM PUPR YANG KOMPETEN

Sasaran program dan indikator kinerja program BPSDM disajikan dalam Tabel 2.1. Program Pengembangan SDM PUPR sesuai dengan peta startegis Kementerian PUPR, mendukung sasaran strategis Kementerian PUPR yaitu

> MENINGKATNYA TATA KELOLA KEMENTERIAN PUPR



Tabel 2.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM 2015-2019

SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR		SATUAN	TARGET					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Program Pengembangan SDM Bidang PUPR								
Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten								
1	Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten	%	10	25	40	55	75	75

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019.

Persentase target sasaran program pengembangan SDM PUPR semakin meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2015 yaitu sebesar 10% hingga pada tahun 2019 mempunyai target sebesar 75%. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 peningkatan kompetensi SDM PUPR ditargetkan meningkat sebesar 15% per tahun, sementara pada tahun 2019 ditargetkan dapat meningkat sebesar 20%. Persentase Peningkatan SDM PUPR yang kompeten sebesar 75% diharapkan merupakan kondisi ideal SDM PUPR, yang akan dicapai melalui program pengembangan SDM. Persentase peningkatan SDM PUPR yang kompeten sebesar 75% pada tahun 2019, dapat menjadi bentuk pencapaian pembangunan SDM PUPR sebagai aktor dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR yang handal.

Pada Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019 telah diuraikan sasaran kegiatan yang diproyeksikan dapat mendukung langsung pencapaian program pengembangan SDM bidang PUPR. Matriks Sasaran Kegiatan Program Pengembangan SDM 2015-2019 disajikan pada **Tabel 2.2**.



Pelaksanaan kegiatan utama BPSDM dirumuskan ke dalam 6 (enam) kelompok kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja stingkat eselon II beserta Balai/UPT di Badan Pengembangan SDM dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan 1

Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, Monev serta SIM. Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Sekretariat BPSDM** dan **Balai Diklat PUPR Wilayah I - IX.**

2. Kegiatan 2

Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja. Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja (Pusat 1)** dan **Balai Penilaian Kompetensi.**

3. Kegiatan 3

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi (Pusat 2)** dan **Balai Uji Coba Sistem Diklat Sumber Daya Air dan Konstruksi,** serta **Balai Diklat PUPR Wilayah I - IX.**

4. Kegiatan 4

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Pusat Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Pusat 3), Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Balai Diklat PUPR Wilayah I–IX.**

5. Kegiatan 5

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh (Pusat 4), serta Balai Diklat PUPR Wilayah I – IX.**

6. Kegiatan 6

Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilaksanakan oleh **Politeknik Pekerjaan Umum**.

Tabel 2.2 Matriks Sasaran Kegiatan pada Program Pengembangan SDM 2015-2019

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR		SATUAN	REALISASI CAPAIAN				TARGET 2019	TOTAL
			2015	2016	2017	2018		
KEGIATAN 1: PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PEMBINAAN MONEV SERTA SIM								
SASARAN KEGIATAN 1: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya								
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Laporan/ Layanan	50	51	1	1	1	104
2	ASN yang Terdidik	Orang	894	0	0	0	0	894
3	ASN yang Terlatih	Orang	11.180	10.112	8.327	0	0	29.619
KEGIATAN 2: PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA								
SASARAN KEGIATAN 2: Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja								
1	Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya	Orang	5.159	10.715	9.459	8.633	7.000	40.966
2	Jumlah orang yang dievaluasi Kinerjanya	Orang	-	17.053	21.286	22.027	23.000	83.366
3	Jumlah orang direncanakan karirnya	Orang	-	-	-	6.285	4.000	10.285

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR		SATUAN	REALISASI CAPAIAN				TARGET 2019	TOTAL
			2015	2016	2017	2018		
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI								
SASARAN KEGIATAN 3: Peningkatan Kompetensi SDM bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi								
1	Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	477	465	730	5.193	**3.359**	10.224
KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH								
SASARAN KEGIATAN 4: Peningkatan Kompetensi SDM bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya								
1	Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	502	298	866	3.064	**3.309**	8.039
KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL								
SASARAN KEGIATAN 5: Peningkatan Kompetensi SDM bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional								
1	Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	3.179	1.339	537	4.648	**3.920**	13.623
KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK BIDANG PEKERJAAN UMUM								
SASARAN KEGIATAN 6: Peningkatan Kompetensi SDM bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan								
1	Jumlah SDM Bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	-	-	-	-	**150**	150

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019.

2.2 Perjanjian Kinerja



Tahun 2019, Menteri PUPR memberi amanah kepada Kepala Badan Pengembangan SDM untuk melaksanakan program pengembangan SDM Bidang PUPR, dengan target dan indikator kinerja tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada awal tahun 2019, melalui Perjanjian Kinerja (PK) telah disepakati bahwa sasaran program pengembangan SDM Bidang PUPR adalah **"Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten"**, dengan indikator kinerja ialah **"Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten"**dan **target kinerja 75%**.

Pada akhir tahun 2019, terdapat revisi perjanjian kinerja yang disebabkan karena adanya perubahan anggaran program Pengembangan SDM yang semula Rp. 398.969.199.000, selanjutnya diubah menjadi Rp 456.489.248.000, sedangkan target kinerja masih tetap seperti yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019 yaitu sebesar 75%. Matriks Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2019 disajikan pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR			
1	Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten	Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten	75%

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019.

Sasaran program beserta target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan SDM, pencapaiannya didukung dengan pelaksanaan kegiatan disetiap unit kerja di BPSDM. Sehingga Perjanjian Kinerja pimpinan unit kerja di BPSDM, mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan SDM. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan SDM disajikan pada **Gambar 2.1** dan **Gambar 2.2.** Sedangkan dokumen Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Kerja di BPSDM disampaikan pada lampiran.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua | **Pihak Pertama**

M. BASUKI HADIMULJONO | **LOLLY MARTINA MARTIEF**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Meningkatnya sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten	1 Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten	75%

Program :
1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran
Rp. 398.969.199.000

JAKARTA, JANUARI 2019

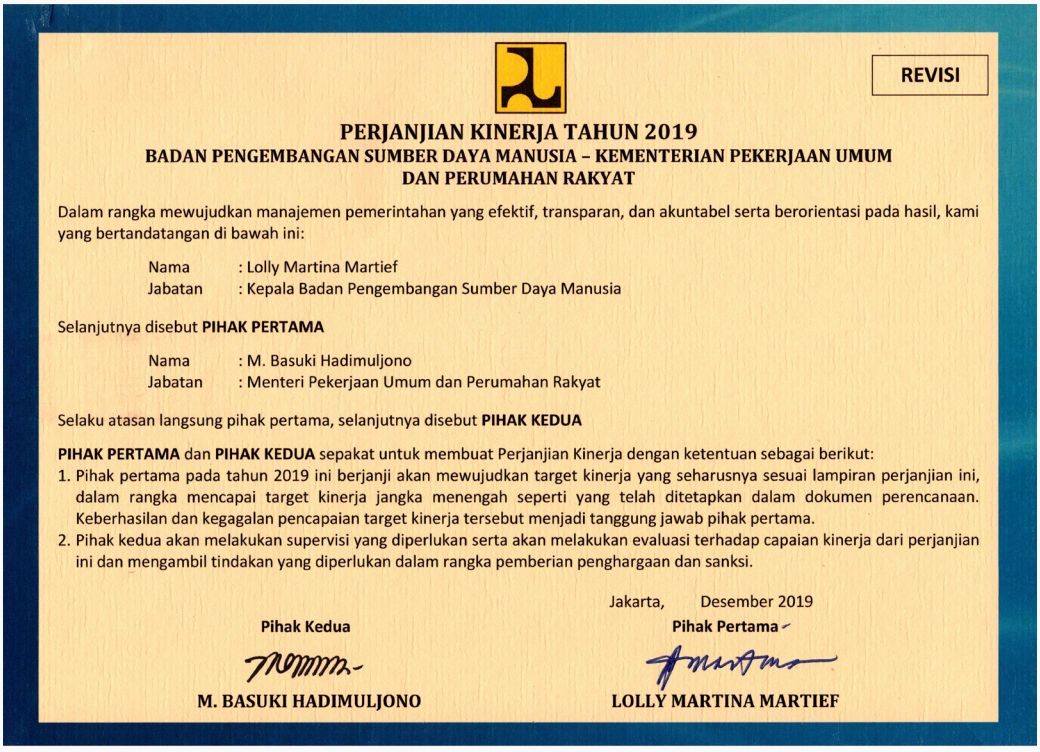
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA-MANUSIA

LOLLY MARTINA MARTIEF

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2019



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

LOLLY MARTINA MARTIEF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Meningkatnya sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten	1 Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten	75%

Program :
1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran Awal Rp. 398.969.199.000
Anggaran Revisi Rp. 456.489.248.000

JAKARTA, DESEMBER 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LOLLY MARTINA MARTIEF

Gambar 2.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Tahun 2019

2.3 Metode Pengukuran



Pengukuran kinerja setiap pelaksanaan program dan kegiatan menjadi sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai terhadap target yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Badan Pengembangan SDM secara umum dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan.

1. Pengukuran Capaian dan Kinerja Program

Badan Pengembangan SDM mempunyai sasaran program **"Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten",** dengan indikator kinerja program yaitu **"Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten"**. Pada tahun 2019, target persentase peningkatan SDM PUPR yang kompeten adalah sebesar 75%. Target ini merupakan kumulatif persentase target program tahun 2015 sampai dengan 2019, sehingga pengukuran capaian tidak terlepas dari capaian program tahun sebelumnya yaitu capaian tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.

Program Pengembangan SDM dilaksanakan dengan beberapa kegiatan utama yaitu:

a. Penilaian Kompetensi, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat kompetensi SDM, yang hasilnya berupa potret SDM yang kompeten dan belum kompeten.
b. Pemantauan Kinerja, merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja SDM PUPR.
c. Pemetaan Karir, merupakan kegiatan pemetaan karir SDM PUPR berdasarkan kompetensi dan kinerja.
d. Pendidikan, merupakan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan melalui pendidikan formal baik di Perguruan Tinggi ataupun Universitas dalam bentuk tugas belajar.
e. Pelatihan, merupakan kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan melalui pelatihan teknis, pelatihan manajemen, pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (pra jabatan).



f. **Pengembangan Jabatan Fungsional, kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembentukan, pengangkatan, dan pengembangan profesi jabatan fungsional.**

g. **Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum, merupakan kegiatan pendidikan Politeknik D-III Bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan.**

Selanjutnya berdasarkan *output* kegiatan-kegiatan utama tersebut serta memperhatikan bahwa sasaran program Pengembangan SDM adalah "Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten", maka Badan Pengembangan SDM menetapkan kegiatan yang secara secara langsung dapat meningkatkan kompetensi SDM PUPR yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan hal tersebut, capaian pendidikan dan pelatihan menjadi unsur yang dihitung sebagai capaian program Pengembangan SDM. Unsur lain yang diperhitungkan menjadi capaian program Pengembangan SDM adalah SDM PUPR yang kompeten berdasarkan hasil penilaian kompetensi. Kegiatan penilaian kompetensi yang dilakukan untuk mengukur tingkat kompetensi SDM PUPR, sebenarnya tidak secara langsung merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM PUPR. Tetapi dengan mempertimbangkan bahwa melalui kegiatan penilaian kompetensi diketahui jumlah SDM PUPR yang kompeten, maka capaian program Pengembangan SDM juga dihitung dari unsur tersebut. Dengan demikian Badan Pengembangan SDM menetapkan 4 (empat) unsur yang dihitung sebagai capaian program Pengembangan SDM yaitu:

a. **SDM PUPR Pusat Lulus Pelatihan.**

   Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM berdasarkan kebutuhan strategis unit organisasi. Pelatihan merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi SDM PUPR, sehingga SDM PUPR lulus pelatihan dapat menjadi ukuran keberhasilan program pengembangan SDM. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengembangan SDM menetapkan SDM PUPR lulus pelatihan yang akan dihitung sebagai capaian program pengembangan SDM adalah yang lulus pelatihan dengan kualifikasi Baik Sekali, Memuaskan dan Sangat Memuaskan.

b. SDM PUPR Daerah Lulus Pelatihan

Pelatihan diselenggarakan Badan Pengembangan SDM juga dapat diikuti oleh SDM PUPR Daerah. Sehingga SDM PUPR Daerah yang menjadi kompeten setelah lulus pelatihan juga menjadi ukuran capaian program pengembangan SDM. Serupa dengan SDM PUPR Pusat lulus pelatihan yang akan dihitung sebagai capaian program adalah yang lulus dengan kualifikasi Baik Sekali, Memuaskan dan Sangat Memuaskan.



c. SDM PUPR Lulus Pendidikan

Selain pelatihan, upaya peningkatan kompetensi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan. Pendidikan diselenggarakan baik melalui program beasiswa oleh Kementerian PUPR atau pun melalui program beasiswa dari Kementerian/Lembaga donor lainnya.

d. SDM PUPR Pusat yang Kompeten dari Penilaian Kompetensi.

Penilaian kompetensi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kompeten atau tidak kompeten SDM PUPR. SDM PUPR yang kompeten berdasarkan hasil penilaian kompetensi, dihitung sebagai capaian program pengembangan SDM. Kriteria SDM PUPR yang kompeten dari penilaian kompetensi yang akan dihitung sebagai capaian program adalah yang hasil penilaiannya Kompeten.

Tabel 2.4 Unsur Perhitungan Capaian Program Pengembangan SDM

NO	UNSUR PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	SDM PUPR Pusat Lulus Pelatihan	SDM PUPR Pusat yang menjadi kompeten setelah mengikuti pelatihan. Kriteria kompeten setelah pelatihan adalah lulus dengan kualifikasi Baik Sekali, Memuaskan, dan Sangat Memuaskan
2	SDM PUPR Daerah Lulus Pelatihan	SDM PUPR Daerah yang menjadi kompeten setelah mengikuti pelatihan. Kriteria kompeten setelah pelatihan adalah lulus dengan kualifikasi Baik Sekali, Memuaskan, dan Sangat Memuaskan
3	SDM PUPR Lulus Pendidikan	SDM PUPR Kompeten melalui pendidikan
4	SDM PUPR Pusat Kompeten dari Penilaian Kompetensi	PNS PUPR Pusat yang kompeten dari penilaian kompetensi (*assessment*)



Dalam menghitung capaian program pengembangan SDM, Badan Pengembangan SDM telah menentukan baseline yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan capaian. Angka baseline yang digunakan setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah SDM PUPR Pusat beserta SDM PUPR Daerah yang diproyeksikan mengikuti peningkatan kompetensi. Sehingga baseline persentase yang digunakan pada tahun 2019 adalah sebanyak **43.338 orang**. Angka *baseline* ini meliputi **22.787 orang** pegawai Kementerian PUPR **(SDM PUPR Pusat)** pada tahun 2019, dan **20.551 orang** pegawai PUPR Pemerintah Daerah **(SDM PUPR Daerah)** yang dihitung dari jumlah SDM PUPR Pemerintah Daerah mengikuti pendidikan dan pelatihan di tahun 2015 sampai dengan 2019. Sebagai informasi angka baseline yang digunakan dalam perhitungan capaian tahun 2019 telah mengalami penyesuaian dari semula 39.377 orang pada tahun 2018 menjadi **43.338 orang**. Penyesuaian ini terjadi dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Adanya perubahan jumlah SDM PUPR Pusat (penambahan melalui rekrutmen dan pengurangan karena pensiun).**
2. **Program pengembangan SDM yang dilaksanakan selama tahun 2019 tidak hanya diperuntukkan bagi SDM PUPR Pusat tetapi juga bagi SDM PUPR Daerah.**

Berdasarkan baseline yang digunakan pada tahun 2019 adalah **43.338 orang**, maka target tahun 2019 yaitu **75%** jika diukur secara kuantitatif adalah sebanyak **32.503 orang SDM PUPR** yang kompeten (kumulatif dari tahun 2015 - 2019). Pada tahun 2015-2018 Badan Pengembangan SDM melalui program pengembangan SDM telah berhasil mewujudkan **27.087 orang** SDM PUPR yang kompeten. Dengan demikian, yang harus dicapai selama tahun 2019 yaitu **32.503 orang – 27.087 orang = 5.416 orang SDM PUPR yang kompeten**. Matriks target capaian sasaran program pengembangan SDM dan baseline perhitungan disajikan pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Matriks Target Sasaran Program Pengembangan SDM dan Baseline Perhitungan

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR	TARGET RENSTRA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR					
Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten					
Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten	10%	25%	40%	55%	75% Target 32.503 orang *Baseline* 43.338 orang

Kinerja program pengembangan SDM PUPR sebagai ukuran kinerja Badan Pengembangan SDM, selanjutnya dihitung dari persentase capaian program dibandingkan target program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan SDM 2015-2019.

2. Pengukuran Capaian dan Kinerja Kegiatan

Sasaran program pengembangan SDM PUPR dicapai melalui beberapa kegiatan utama pengembangan SDM. Pengukuran capaian kegiatan pengembangan SDM disajikan sesuai **Tabel 2.6**, sedangkan kinerja kegiatan dihitung berdasarkan perbandingan capaian dan target yang ditetapkan.

Tabel 2.6 Perhitungan Capaian Kegiatan Pengembangan SDM

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	PENGUKURAN CAPAIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR			
KEGIATAN 1. PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONEV SERTA SIM			
SASARAN KEGIATAN 1. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINYA			
1.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Layanan	
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPSDM
2	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	Jumlah layanan internal yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPSDM dan 9 Balai Diklat
3	Layanan Perkantoran	Bulan	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun
KEGIATAN 2. PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA			
SASARAN KEGIATAN 2. PENINGKATAN KUALITAS PENILAIAN KOMPETENSI, PENGELOLAAN KINERJA SERTA PEMETAAN KARIR			
1. Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya		Orang	Jumlah SDM yang telah mengikuti penilaian kompetensi (*assessment*)
2. Jumlah orang yang dievaluasi Kinerjanya		Orang	Jumlah PNS yang terpantau kinerjanya berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
3. Jumlah orang direncanakan karirnya		Orang	Jumlah PNS PUPR telah mengikuti kegiatan pemetaan karir
1	Dukungan Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR	Dokumen	Jumlah dokumen kebijakan teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan karir yang telah disusun
2	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	Orang	Jumlah PNS PUPR yang terpantau kinerjanya berdasarkan SKP
3	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	Orang	Jumlah SDM yang telah mengikuti penilaian kompetensi (*assessment*)
4	Pemetaan Karir ASN PUPR	Orang	Jumlah PNS PUPR telah mengikuti kegiatan pemetaan karir
5	Peralatan dan Perlengkapan	Unit	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan
6	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	Jumlah layanan internal yang dilaksanakan
7	Layanan Perkantoran	Bulan	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	PENGUKURAN CAPAIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR			
KEGIATAN 3. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI			
SASARAN KEGIATAN 3. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI			
1.	Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan ditambah jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bidang SDA dan Konstruksi
1	ASN yang Terlatih	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bidang SDA dan Konstruksi
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	Jumlah dokumen yang telah disusun: a. Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan b. Dokumen Kurikulum dan Modul c. Dokumen Kurikulum dan modul yang di uji coba
3	ASN yang Terdidik	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan selama tahun 2019
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	Jumlah layanan internal yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi berserta BUC Sistem Diklat SDA dan Konstruksi
5	Layanan Perkantoran	Bulan	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun
KEGIATAN 4. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
SASARAN KEGIATAN 4. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
1.	Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan ditambah jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
1	ASN yang Terlatih	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	Jumlah dokumen yang telah disusun: a. Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan b. Dokumen Kurikulum dan Modul c. Dokumen Kurikulum dan modul yang di uji coba
3	ASN yang Terdidik	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan selama tahun 2019
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	Jumlah layanan internal yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan BUC Sistem Diklat Jalan, Perrumahan, Permukiman dan PIW
5.	Layanan Perkantoran	Bulan	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	PENGUKURAN CAPAIAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR			
KEGIATAN 5. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL			
SASARAN KEGIATAN 5. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL			
1.	Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan ditambah jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bidang Manajemen
1	ASN yang Terlatih	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan bidang Manajemen
2	Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	Jumlah dokumen yang telah disusun: a. Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan b. Dokumen Kurikulum dan Modul
3	Pengembangan Jabatan Fungsional	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pengembangan jabatan fungsional
4	ASN yang Terdidik	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan selama tahun 2019
5	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	Jumlah layanan internal yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Menjafung
6	Layanan Perkantoran	Bulan	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun
KEGIATAN 6. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM			
SASARAN KEGIATAN 6. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG, TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN			
1	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	Orang	Jumlah SDM Bidang Pekerjaan Umum yang melaksanakan Pendidikan bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan selama tahun 2019
2	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian	Jumlah Penelitian yang dilakukan selama tahun 2019
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	Jumlah layanan internal yang dilaksanakan oleh Politeknik Pekerjaan Umum
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	Jumlah layanan dukungan manajemen Satker yang dilaksanakan oleh Politeknik Pekerjaan Umum
5	Layanan Perkantoran	Layanan	Jumlah layanan perkantoran yang dilaksanakan selama 12 bulan/1 tahun



Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019, setiap sasaran kegiatan program pengembangan SDM bidang PUPR memiliki *output* utama yang menjadi indikator sasaran kegiatannya. Berikut uraian *output* utama yang menjadi indikator sasaran setiap kegiatan:

a. Pada sasaran kegiatan 1.
   Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya, indikator sasaran kegiatan utamanya ialah **Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya** dengan target satuan **layanan**, yang terdiri dari berbagai *output* kegiatan pendukung manajemen eselon 1, Layanan Internal (*Overhead*) dan Layanan Perkantoran.

b. Pada sasaran kegiatan 2.
   Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Karir, indikator sasaran kegiatan utamanya ialah **Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya**, **Jumlah orang yang dievaluasi Kinerjanya**, dan **Jumlah orang direncanakan karirnya** dengan target satuan orang, yang terdiri dari *output* kegiatan Penilaian Kompetensi ASN PUPR, Pengelolaan Kinerja ASN PUPR, dan Pemetaan Karir ASN PUPR.

c. Pada sasaran kegiatan 3.
   Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi, indikator sasaran kegiatan utamanya ialah Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya, dengan target satuan Orang, yang terdiri dari *output* kegiatan ASN yang Terlatih dan ASN yang Terdidik.



d. Pada sasaran kegiatan 4.
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, indikator sasaran kegiatan utamanya ialah Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya, dengan target satuan Orang, yang terdiri dari *output* kegiatan ASN yang Terlatih dan ASN yang Terdidik.

e. Pada sasaran Kegiatan 5.
Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, indikator sasaran kegiatan utamanya ialah Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya, dengan target satuan Orang, yang terdiri dari *output* kegiatan ASN yang Terlatih dan ASN yang Terdidik.

f. Pada sasaran Kegiatan 6.
Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum, indikator sasaran kegiatan utamanya ialah Peningkatan Kompetensi SDM bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan, dengan target satuan Orang, yang terdiri dari *output* kegiatan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum.

2.4 Target Tahun 2019 Menurut Renstra



Pada tahun 2019, BPSDM mempunyai sasaran program meningkatnya SDM PUPR yang kompeten dengan target sebesar 75%.

Target ini merupakan kumulatif dari tahun 2015–2019. Seperti yang telah diuraikan pada sub bab 2.3, baseline yang digunakan untuk menghitung capaian di tahun 2019 adalah sebanyak **43.338 orang** yang merupakan total dari jumlah SDM PUPR Pusat di tahun 2019 ditambah jumlah SDM PUPR Daerah yang mengikuti peningkatan kompetensi selama 2015 - 2019. Sehingga, secara kuantitatif target yang harus dicapai pada 2019 adalah sebanyak **32.503 orang** (75% dari 43.338 orang). Sasaran Program Badan Pengembangan SDM Tahun 2019 disajikan juga pada **Tabel 2.7.**

Tabel 2.7 Sasaran Program Badan Pengembangan SDM Tahun 2019

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2019
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PUPR			
MENINGKATNYA SDM PUPR YANG KOMPETEN			
1	Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten	%	75

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019.

Dalam mencapai target tersebut, BPSDM melaksanakan beberapa sasaran kegiatan dengan target *output* yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan SDM PUPR yang kompeten. Kegiatan tersebut dirumuskan ke dalam 6 (enam) kelompok kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja tingkat Eselon II dan Balai/UPT di BPSDM dengan target setiap kegiatan disajikan pada **Tabel 2.8.**

Tabel 2.8 Target Kegiatan Badan Pengembangan SDM Tahun 2019 Menurut Renstra

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	TARGET PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2019
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR			
Kegiatan 1. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM			
Sasaran Kegiatan 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya			
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		Layanan	1
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1
2	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	10
3	Layanan Perkantoran	Bulan	12
Kegiatan 2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja			
Sasaran Kegiatan 2. Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Karir			
1. Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya		Orang	7.000
2. Jumlah orang yang dievaluasi Kinerjanya		Orang	23.000
3. Jumlah orang direncanakan karirnya		Orang	4.000
1	Dukungan Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR	Dokumen	0
2	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	Orang	23.000
3	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	Orang	7.000
4	Pemetaan Karir ASN PUPR	Orang	4.000
5	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	1
6	Layanan Perkantoran	Bulan	12
Kegiatan 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi			
Sasaran Kegiatan 3. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi			
1. Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.359
1	ASN yang Terlatih	Orang	3.240
2	Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	23
3	ASN yang Terdidik	Orang	119
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	2
5	Layanan Perkantoran	Bulan	12

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	TARGET PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2019
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR			
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah			
Sasaran Kegiatan 4. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah			
1. Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.309
1	ASN yang Terlatih	Orang	2.940
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	27
3	ASN yang Terdidik	Orang	369
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	3
5	Layanan Perkantoran	Bulan	12
Kegiatan 5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional			
Sasaran Kegiatan 5. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional			
1. Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.920
1	ASN yang Terlatih	Orang	3.870
2	Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	2
3	Pengembangan Jabatan Fungsional	Orang	500
4	ASN yang Terdidik	Orang	50
5	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	12
6	Layanan Perkantoran	Bulan	12
Kegiatan 6. Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum			
Sasaran Kegiatan 6. Peningkatan Kompetensi SDM bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan			
1	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	Orang	150
2	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian	0
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	12
5	Layanan Perkantoran	Layanan	12

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019.

Kapasitas Organisasi



Laporan Kinerja 2019
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

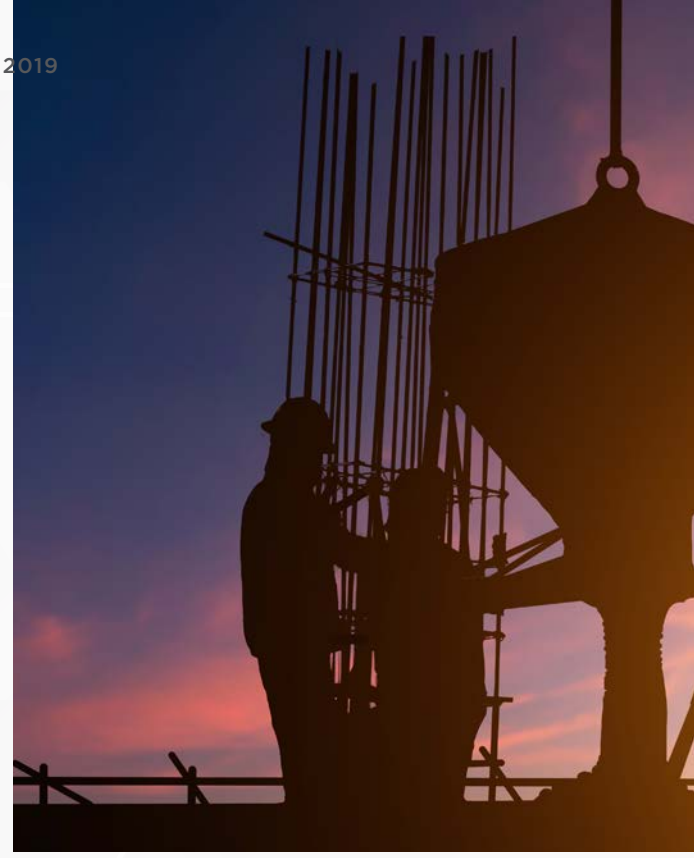


III

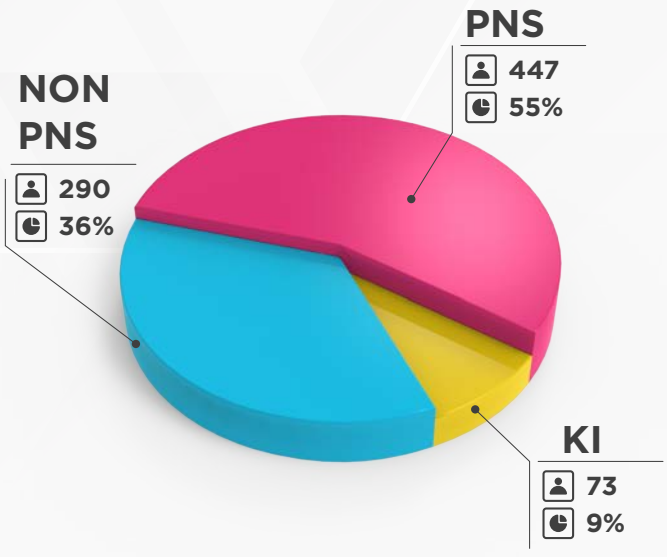
BAB TIGA

3.1	Sumber Daya Manusia	50
3.2	Sarana dan Prasarana	63
3.3	DIPA	67

3.1 Sumber Daya Manusia



Pencapaian program pengembangan SDM bidang PUPR, tidak terlepas dari upaya para pegawai internal BPSDM. Pegawai yang ada di BPSDM menjadi kunci bagi pencapaian program pengembangan SDM bidang PUPR. Program pengembangan SDM bidang PUPR yang didominasi dengan kegiatan peningkatan kompetensi, tentunya membutuhkan SDM yang kompeten dengan kata lain kegiatan peningkatan kompetensi semestinya dilakukan oleh pegawai BPSDM yang kompeten.



Gambar 3.1 Grafik Komposisi Jumlah PNS, Non PNS dan Konsultan Individual

Jumlah PNS BPSDM pada akhir tahun 2019 jika dibandingkan dengan jumlah PNS pada akhir tahun 2018 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 447 orang. Hal ini disebabkan pengurangan pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diimbangi dengan adanya PNS baru. Meskipun demikian, besarnya beban kerja dalam pelaksanaan pengembangan SDM masih belum sesuai dengan jumlah PNS yang ada saat ini, sehingga BPSDM masih perlu memberdayakan pegawai non PNS. Adapun total pegawai BPSDM saat ini adalah sebanyak **810 orang**, dengan perbandingan jumlah **PNS** sebanyak **447 orang (55%)**, **non PNS** sebanyak **290 orang (36%)** dan **Konsultan Individual** sebanyak **73 orang (9%)**. **Grafik 3.1** menyajikan komposisi PNS dan non PNS di lingkungan BPSDM.



Jumlah SDM sebanyak 810 orang tersebut tersebar di 18 (delapan belas) unit kerja, baik yang bekerja di Sekretariat BPSDM, Pusat serta Balai yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan jenis kelamin, kondisi pegawai BPSDM disajikan pada **Tabel 3.1**.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pegawai di BPSDM didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu sebanyak 516 orang atau 64%, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 294 orang atau 36%.

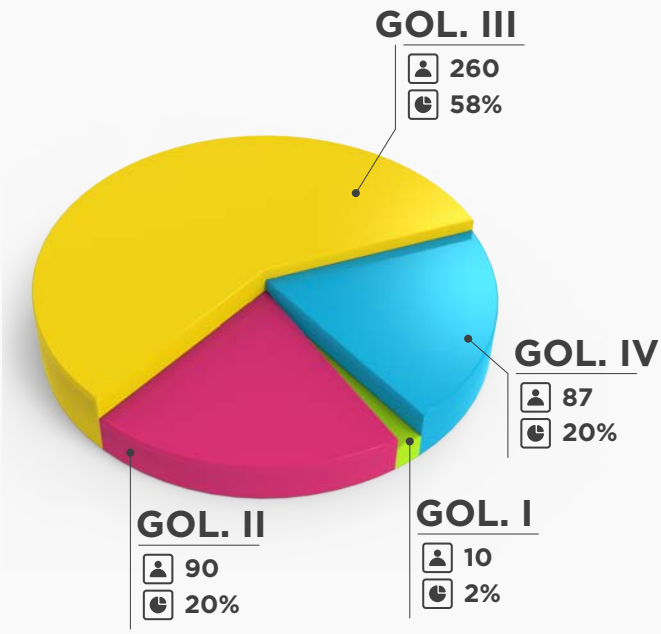
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah PNS, Non PNS dan Konsultan Individual Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	PNS		JUMLAH PNS	NON PNS		JUMLAH NON PNS	KONSULTAN INDIVIDUAL		JUMLAH KI	TOTAL
		L	P		L	P		L	P		
1	Kepala BPSDM & Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34	20	54	16	7	23	5	1	6	**83**
2	Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	6	18	24	11	4	15	6	2	8	**47**
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	19	6	25	20	13	33	4	4	8	**66**
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	13	18	31	14	15	29	10	11	21	**81**
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	29	15	44	16	7	23	2	2	4	**71**
6	Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan	9	13	22	8	8	16	0	0	0	**38**

NO	UNIT KERJA	PNS		JUMLAH PNS	NON PNS		JUMLAH NON PNS	KONSULTAN INDIVIDUAL		JUMLAH KI	TOTAL
		L	P		L	P		L	P		
7	Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang	16	10	26	3	2	5	0	0	0	31
8	Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta	11	8	19	16	2	18	0	0	0	37
9	Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	13	9	22	9	2	11	0	0	0	33
10	Balai Diklat PUPRWilayah V Yogyakarta	13	10	23	7	4	11	0	0	0	34
11	Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya	23	8	31	11	2	13	0	0	0	44
12	Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin	6	4	10	12	3	15	5	0	5	30
13	Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar	9	8	17	17	6	23	0	0	0	40
14	Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura	9	8	17	11	2	13	0	0	0	30
15	Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi	10	4	14	10	4	14	1	0	1	29
16	Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	15	4	19	10	2	12	1	3	4	35
17	Balai Penilaian Kompetensi	6	6	12	3	2	5	2	1	3	20
18	Politeknik PU	28	9	37	10	1	11	7	6	13	61
TOTAL		269	178	447	204	86	290	43	30	73	810
PERSENTASE		60%	40%		71%	29%		59%	41%		
GRAND TOTAL		810									

Keterangan: L = Laki-laki, P= Perempuan
Sumber: Data Kepegawaian Badan Pengembangan SDM per 1 Januari 2020

Berdasarkan golongan ruang, komposisi PNS BPSDM adalah sebagai berikut: golongan IV sebanyak 87 orang (20%), golongan III sebanyak 260 orang (58%), golongan II sebanyak 90 orang (20%), dan golongan I sebanyak 10 orang (2%). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa BPSDM didominasi oleh PNS golongan III, yang diikuti dengan PNS golongan II dan golongan IV. Grafik komposisi PNS berdasarkan golongan ruang disajikan pada Gambar 3.2 sedangkan sebaran untuk setiap unit kerja disajikan pada **Tabel 3.2**.





Gambar 3.2 Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala BPSDM & Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18	28	6	2	54
2	Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	7	15	2	0	24
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	3	17	5	0	25
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	5	21	5	0	31
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	27	16	1	0	44
6	Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan	2	16	4	0	22
7	Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang	1	18	7	0	26
8	Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta	1	13	4	1	19
9	Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	3	14	5	0	22
10	Balai Diklat PUPRWilayah V Yogyakarta	4	13	5	1	23
11	Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya	3	13	12	3	31
12	Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin	1	6	3	0	10

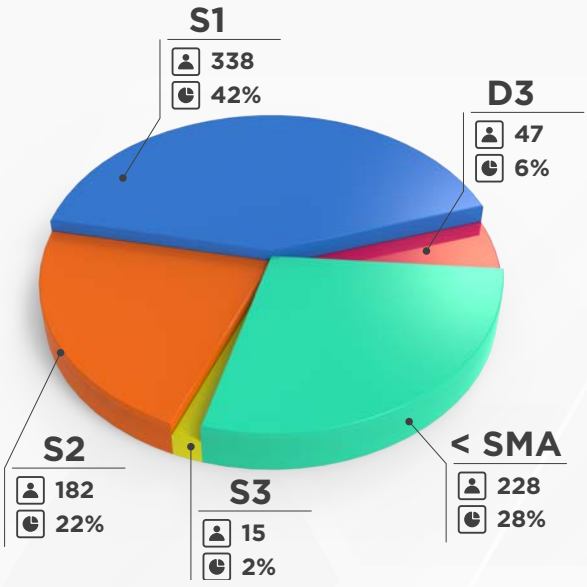
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
13	Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar	1	13	2	1	17
14	Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura	2	12	3	0	17
15	Balai Uji Coba Sistem Diklat Sumber Daya Air dan Konstruksi	1	7	6	0	14
16	Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2	5	11	1	19
17	Balai Penilaian Kompetensi	4	6	2	0	12
18	Politeknik PU	2	27	7	1	37
TOTAL		87	260	90	10	447
PERSENTASE		20%	58%	20%	2%	100%

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pengembangan SDM, per 1 Januari 2020

Selanjutnya, kondisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut: PNS dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 13 orang (3%), S2 sebanyak 176 orang (39%), S1 sebanyak 143 orang (32%), D3 sebanyak 18 orang (4%) dan SMA ke bawah sebanyak 97 orang (22%). Sedangkan, untuk pegawai Non PNS BPSDM berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S2 sebanyak 1 orang (1%), S1 sebanyak 133 orang (46%), D1-D3 sebanyak 25 orang (8%), dan SMA ke bawah sebanyak 131 orang (45%). Serta pegawai Konsultan Individual dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 2 orang (3%), S2 sebanyak 5 orang (7%), S1 sebanyak 62 orang (85%) dan D3 sebanyak 4 orang (5%). Rekapitulasi jumlah PNS, Non PNS dan Konsultan Individu BPSDM berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada **Tabel 3.3.**







Gambar 3.3 Grafik Komposisi Pegawai BPSDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

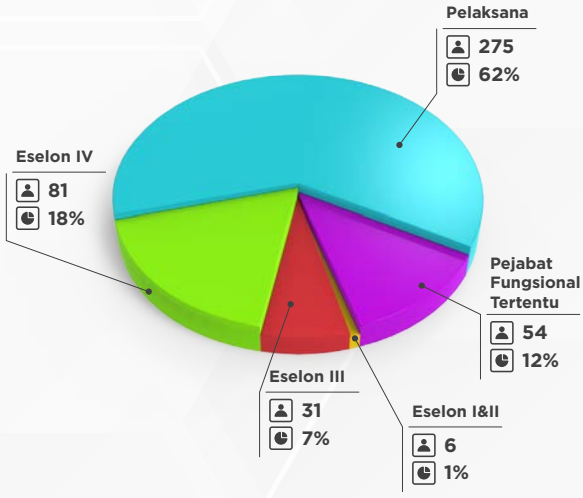
Secara keseluruhan jumlah pegawai BPSDM dengan tingkat pendidikan S3 sebanyak 15 orang (2%), S2 sebanyak 182 orang (22%), S1 sebanyak 338 orang (42%), D3 sebanyak 47 orang (6%) dan SMA ke bawah sebanyak 228 orang (28%). Grafik komposisi pegawai BPSDM berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada **Gambar 3.3.**

Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah PNS, Non PNS dan
Konsultan Individual Berdasarkan Tingkat Pendidikan

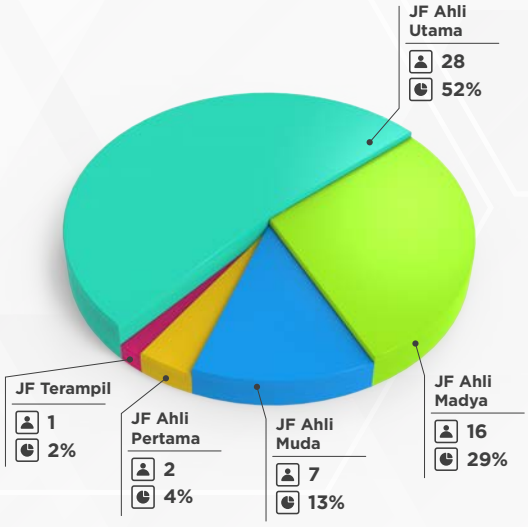
NO	UNIT KERJA	
1	Kepala BPSDM & Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2	Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	
6	Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan	
7	Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang	
8	Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta	
9	Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	
10	Balai Diklat PUPRWilayah V Yogyakarta	
11	Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya	
12	Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin	
13	Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar	
14	Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura	
15	Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi	
16	Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	
17	Politeknik Pekerjaan Umum	
18	Balai Penilaian Kompetensi	
TOTAL		
GRAND TOTAL		

	PNS					TOTAL PNS	NON PNS					TOTAL NON PNS	KONSULTAN INDIVIDU				TOTAL KI
	TINGKAT PENDIDIKAN						TINGKAT PENDIDIKAN						TINGKAT PENDIDIKAN				
	S3	S2	S1	D3	SMA KE BAWAH		S3	S2	S1	D3	SMA KE BAWAH		S3	S2	S1	D3	
	3	25	15	5	6	54	0	0	10	4	9	23	0	1	3	2	6
	0	15	7	2	0	24	0	0	10	0	5	15	0	2	6	0	8
	1	12	7	2	3	25	0	0	20	5	8	33	0	0	8	0	8
	0	16	10	1	4	31	0	0	16	4	9	29	0	1	19	1	21
	6	25	11	1	1	44	0	0	10	4	9	23	0	0	4	0	4
	0	6	8	0	8	22	0	0	15	0	1	16	0	0	0	0	0
	1	5	13	0	7	26	0	0	3	0	2	5	0	0	0	0	0
	0	9	4	1	5	19	0	0	6	2	10	18	0	0	0	0	0
	0	6	8	1	7	22	0	0	5	0	6	11	0	0	0	0	0
	1	7	7	2	6	23	0	1	4	1	5	11	0	0	0	0	0
	0	9	6	0	16	31	0	0	1	0	12	13	0	0	0	0	0
	0	4	3	0	3	10	0	0	3	2	10	15	0	0	4	1	5
	0	5	8	0	4	17	0	0	12	0	11	23	0	0	0	0	0
	0	3	11	0	3	17	0	0	10	0	3	13	0	0	0	0	0
	0	3	5	0	6	14	0	0	3	2	9	14	0	0	1	0	1
	0	3	4	1	11	19	0	0	2	1	9	12	0	0	4	0	4
	1	17	12	2	5	37	0	0	1	0	10	11	0	0	3	0	3
	0	6	4	0	2	12	0	0	2	0	3	5	2	1	10	0	13
	13	176	143	18	97	447	0	1	133	25	131	290	2	5	62	4	73
	810																

Berdasarkan kelompok jabatan, komposisi PNS BPSDM adalah sebagai berikut: Pejabat Eselon I sebanyak 1 (satu) orang dan Pejabat Eselon II sebanyak 5 (lima) orang (1%), Pejabat Eselon III sebanyak 31 orang (7%), Pejabat Eselon IV sebanyak 81 orang (18%), Pejabat Fungsional Umum (JFU)/Pelaksana sebanyak 275 orang (62%), dan Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 54 orang (12%). Grafik Kelompok Jabatan PNS di BPSDM disajikan pada **Gambar 3.4**, sementara Rincian Kelompok Jabatan PNS di BPSDM Per Unit Kerja disajikan pada **Tabel 3.4**.



Gambar 3.4 Grafik Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Kelompok Jabatan



Gambar 3.5 Grafik Komposisi Jumlah Pejabat Fungsional (JFT) Berdasarkan Jenjang Jabatan

Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)/Jabatan Fungsional Per Jenjang Jabatan di BPSDM meliputi Pejabat Fungsional jenjang Terampil sebanyak 1 (satu) orang (2%), Pejabat Fungsional jenjang Pertama sebanyak 2 (dua) orang (4%), Pejabat Fungsional jenjang Muda sebanyak 7 (tujuh) orang (13%), Pejabat Fungsional jenjang Madya sebanyak 16 (enam belas) orang (29%), dan Pejabat Fungsional jenjang Utama sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang (52%). Dalam hal ini, Pejabat Fungsional didominasi oleh Jabatan Fungsional Widyaiswara yaitu sebanyak 44 orang. Grafik Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)/ Jabatan Fungsional Per Jenjang Jabatan di BPSDM disajikan pada **Gambar 3.5**.

Tabel 3.4 Rekapitulasi Jumlah PNS Berdasarkan Kelompok Jabatan

NO	UNIT KERJA	ES. I	ES. II	ES. III	ES. IV	PELAKSANA (JFU)	PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)	TOTAL
1	Kepala BPSDM & Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	4	12	23	13	54
2	Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	0	1	4	8	10	1	24
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	0	1	4	8	12	0	25
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	0	1	3	8	16	3	31
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	0	1	3	6	13	21	44
6	Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan	0	0	1	3	16	2	22
7	Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang	0	0	1	3	22	0	26
8	Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta	0	0	1	3	13	2	19
9	Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	0	0	1	3	16	2	22
10	Balai Diklat PUPRWilayah V Yogyakarta	0	0	1	3	16	3	23
11	Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya	0	0	1	3	24	3	31
12	Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin	0	0	1	3	6	0	10
13	Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar	0	0	1	3	13	0	17
14	Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura	0	0	1	3	12	1	17
15	Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi	0	0	1	3	10	0	14
16	Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW	0	0	1	3	14	1	19
17	Balai Penilaian Kompetensi	0	0	1	3	6	2	12
18	Politeknik PU	0	0	1	3	33	0	37
TOTAL		**1**	**5**	**31**	**81**	**275**	**54**	**447**
PERSENTASE		**0,22%**	**1,12%**	**6,94%**	**18,12%**	**61,52%**	**12,08%**	

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pengembangan SDM, per 1 Januari 2020

Selain itu, jika dilihat dari faktor usia, komposisi PNS di BPSDM yaitu PNS usia 20-30 tahun sebanyak 19 orang (4%), PNS usia 31-40 tahun sebanyak 152 orang (34%), PNS usia 41-50 tahun sebanyak 106 orang (24%), dan PNS usia ≥51 tahun sebanyak 170 orang (38%). Sedangkan, komposisi Non-PNS di BPSDM usia 20-30 tahun sebanyak 105 orang (36%), Non PNS usia 31-40 tahun sebanyak 129 orang (44%), Non PNS usia 41-50 tahun sebanyak 56 orang (19%), dan Non-PNS usia ≥51 tahun sebanyak 0 (nol) orang (0%). Serta komposisi konsultan individual di BPSDM usia 20-30 tahun sebanyak 53 orang (73%), konsultan individual usia 31-40 tahun sebanyak 12 orang (16%), konsultan individual usia 41-50 tahun sebanyak 2 orang (3%), dan konsultan individual ≥51 tahun sebanyak 6 orang (8%). Dari data tersebut, diketahui bahwa baik PNS dan Non-PNS di BPSDM didominasi oleh ASN yang berusia 31-40 tahun. Sedangkan Konsultan Individual didominasi oleh kelompok berusia 20-30 tahun. Rekapitulasi Pegawai BPSDM berdasarkan kelompok usia disajikan pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Pegawai BPSDM Berdasarkan Kelompok Usia

NO	UNIT KERJA	PNS				NON PNS				KONSULTAN INDIVIDU			
		20-30	31-40	41-50	>50	20-30	31-40	41-50	>50	20-30	31-40	41-50	>50
1	Kepala BPSDM & Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	14	6	27	12	10	1	0	2	2	1	1
2	Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	3	10	2	9	4	8	3	0	3	3	1	1
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	3	7	12	3	15	13	5	0	8	0	0	0
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1	14	7	9	18	6	5	0	19	2	0	0
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	1	11	4	28	11	8	4	0	4	0	0	0

NO	UNIT KERJA	PNS				NON PNS				KONSULTAN INDIVIDU			
		20-30	31-40	41-50	>50	20-30	31-40	41-50	>50	20-30	31-40	41-50	>50
8	Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta	0	9	5	5	10	5	3	0	0	0	0	0
9	Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	0	7	5	10	4	6	1	0	0	0	0	0
10	Balai Diklat PUPRWilayah V Yogyakarta	2	12	2	7	1	10	0	0	0	0	0	0
11	Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya	0	5	14	12	2	9	2	0	0	0	0	0
12	Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin	0	4	3	3	0	10	5	0	0	4	0	1
13	Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar	0	5	6	6	2	14	7	0	0	0	0	0
14	Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura	0	5	7	5	1	6	6	0	0	0	0	0
15	Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi	1	4	2	7	5	8	1	0	1	0	0	0
16	Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW	0	1	6	12	3	5	4	0	4	0	0	0
17	Balai Penilaian Kompetensi	0	5	4	3	5	0	0	0	2	1	0	0
18	Politeknik PU	1	20	9	7	1	2	8	0	10	0	0	3
TOTAL		**19**	**152**	**106**	**170**	**105**	**129**	**56**	**0**	**53**	**12**	**2**	**6**

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pengembangan SDM, per 1 Januari 2020

Berdasarkan data kepegawaian BPSDM, dari segi kualitas (tingkat pendidikan) atau pun dari segi kuantitas komposisi SDM BPSDM masih terbatas. Kondisi SDM tersebut tidak menyurutkan semangat dan komitmen BPSDM dalam melaksanakan program pengembangan SDM bidang PUPR. Dalam hal ini, BPSDM selalu berupaya mengoptimalkan SDM yang tersedia agar setiap kegiatan dapat terselenggara guna memberikan pelayanan prima kepada seluruh *stakeholder*, khususnya terkait peningkatan kompetensi SDM PUPR. Badan Pengembangan SDM telah melaksanakan pelatihan bersertifikasi untuk peningkatan kualitas SDMnya, dengan capaian sesuai **tabel 3.6**.



Tabel 3.6 Rekapitulasi Pelatihan Bersertifikasi untuk Pegawai BPSDM

NO	NAMA SERTIFIKASI	JUMLAH PESERTA
1	Sertifikasi Komunikasi dan Pelayanan Publik	15
2	Sertifikasi Manajer SDM	39
3	Sertifikasi *Couching & Counselling*	3
4	Sertifikasi Pengelolaan Jaringan TIK	1
TOTAL		**58**

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pengembangan SDM, per 1 Januari 2020



3.2 Sarana dan Prasarana



Pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM tentunya didukung dengan sarana dan prasana yang ada saat ini. Sarana dan prasarana pendukung sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM, oleh karena itu, setiap unit kerja di BPSDM memiliki sarana dan prasarana pendukung yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan setiap unit kerja tersebut. Rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki BPSDM disajikan pada **Tabel 3.7**.

Dalam mendukung pelaksanaan program pengembangan SDM bidang PUPR, setiap unit kerja memiliki aset berupa bangunan dan gedung yang berdiri pada lahan tanah milik BPSDM yaitu seluas **177.143 m^2.** Bangunan dan gedung tersebut meliputi gedung Kantor, gedung asrama, aula, fasilitas sosial, rumah negara, ruang makan, unit keamanan, area kampus diklat dan sebagainya, serta didukung dengan berbagai mesin dan peralatan sebanyak **41.341 unit**. Adapun fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diklat yang dilaksanakan oleh Balai diklat PUPR serta Balai Uji Coba Sistem Diklat secara rinci disajikan dalam **lampiran**.

Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana di Badan Pengembangan SDM

NO	UNIT KERJA	TANAH (M^2)	PERALATAN DAN MESIN (UNIT)	GEDUNG DAN BANGUNAN (UNIT)
1	Sekertariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1.042	3
2	Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	-	580	3
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	-	1.573	20
4	Pusat Pendidikan dan pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW	63.021	3.162	6
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	1.680	775	7

NO	UNIT KERJA	TANAH (M^2)	PERALATAN DAN MESIN (UNIT)	GEDUNG DAN BANGUNAN (UNIT)
6	Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan	8.806	3.202	16
7	Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang	1.295	1.228	1
8	Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta	22.487	3.379	10
9	Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	14.830	2.319	127
10	Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta	24.429	3.944	40
11	Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya	13.413	4.369	25
12	Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin	19.194	1.235	6
13	Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar	6.759	5.292	16
14	Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura	1.229	1.299	1
15	Balai UC Sistem Pendidikan dan Pelatihan SDA dan Konstruksi	-	1.373	4
16	Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	-	2.472	6
17	Balai Penilaian Kompetensi	-	1.029	-
18	Politeknik PU	-	3.068	21
TOTAL		**177.143**	**41.341**	**312**

Sumber: SIMAK BMN Badan Pengembangan SDM, 2019

Selain sarana dan prasana fisik seperti yang diuraikan di atas, BPSDM juga memiliki sarana dan prasarana terkait teknologi informasi. BPSDM telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk menunjang efektifitas pelaksanaan pengembangan SDM bidang PUPR. Secara umum, untuk dapat mengunjungi berbagai aplikasi yang telah dikembangkan BPSDM dapat mengunjungi situs http://bpsdm.pu.go.id/center. Berikut ini beberapa aplikasi yang telah dikembangkan BPSDM dalam menyelenggarakan program pengembangan SDM bidang PUPR:



a. E-Pelatihan

Sistem informasi pelatihan (E-Pelatihan) merupakan sistem aplikasi yang menyajikan informasi terkait pelatihan bidang PUPR yang diselenggarakan oleh BPSDM, mulai dari pelaksanaan hingga pelaporannya. Aplikasi dapat diakses secara umum, untuk mengetahui jenis, judul, jadwal pelaksanaan serta hal-hal lain terkait dengan pelatihan. Melalui aplikasi ini juga setiap peserta maupun calon peserta dapat melakukan registrasi secara online untuk mengikuti pelatihan. Akses aplikasi E-Pelatihan adalah **https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan**.

b. E-Kinerja

Aplikasi E-Kinerja adalah Sistem Informasi Prestasi Kerja yang digunakan bagi masing-masing pegawai untuk penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Untuk mengakses aplikasi ini dapat mengunjungi http://kinerja.pu.go.id.

c. E-Karyawiswa

Aplikasi E-Karyasiswa merupakan sistem aplikasi yang menyajikan informasi terkait pendidikan kedinasan yang ditempuh oleh karyasiswa. Aplikasi hanya dapat diakses oleh peserta karyasiswa. Akses aplikasi adalah melalui http://bpsdm.pu.go.id/karyasiswa.

d. E-Learning

Beberapa pelatihan yang diselenggarakan BPSDM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk e-learning. Untuk mengakses aplikasi ini dapat mengunjungi http://bpsdm.pu.go.id/diklatpim dan http://bpsdm.pu.go.id/elearning.



e. E-Lembar Kerja Pegawai (E-LKP)

Aplikasi E-LKP ini digunakan bagi masing-masing pegawai untuk melakukan pencatatan pekerjaan yang terintegrasi dengan data Kegiatan Tugas Jabatan pada SKP masing-masing pegawai. Untuk mengakses aplikasi ini dapat mengunjungi http://bpsdm.pu.go.id/center/lkp.

f. SI-MENTOR PUPR

Dalam rangka menyediakan data dan informasi pejabat fungsional terutama pejabat fungsional PUPR yang terkini/teraktual di Kementerian PUPR, BPSDM telah mengembangkan aplikasi SI-MENTOR PUPR. SI-MENTOR PUPR merupakan sistem informasi berbasis web terintegrasi dengan e-HRM yang berfungsi untuk mengelola data dan informasi penting lainnya secara real-time terkait pejabat fungsional di Kementerian PUPR khususnya pejabat fungsional PUPR. Untuk mengakses aplikasi ini dapat mengunjungi http://simentor.pu.go.id/.

g. SIMANTU

Dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia untuk seluruh ASN PUPR, BPSDM telah mengembangkan aplikasi Sistem Manajemen Pengetahuan (SI-MANTU). SI-MANTU adalah portal bagi para SDM Kementerian PUPR dapat sharing, belajar dan berdiskusi berbagai ilmu pengetahuan bidang PUPR. SI-MANTU merupakan salah satu inovasi untuk menjawab tantangan era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik, tidak terkecuali juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur. SIMANTU didesain untuk manajemen pengetahuan (knowledge management) yang berisikan aset intelektual khususnya dalam bidang PUPR yang dapat diakses di http://simantu.pu.go.id atau diunduh melalui ponsel android.

h. SIMERIT

SIMERIT PUPR adalah Sistem Merit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dalam menjalankan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan Kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, Ras, Agama dan Jenis Kelamin.



i. E-KARIER

Aplikasi E-KARIER merupakan sistem informasi untuk menyusun rencana karir individu pegawai, dimana pegawai yang bersangkutan dapat memilih jabatan sesuai dengan rumpun jabatannya, jika terdapat kekurangan dalam tujuan jabatan yang dipilih maka akan ditampilkan informasi apasaja yang harus dikembangkan oleh pegawai. Untuk mengakses aplikasi ini dapat mengunjungi http://karir.pu.go.id/.

j. E-HRD

E-HRD merupakan program strategis BPSDM yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di BPSDM, sehingga seluruh proses pengembangan SDM dapat tergambar dalam satu aplikasi. E-HRD merupakan suatu aplikasi yang bisa mewadahi seluruh proses bisnis di BPSDM.





3.3 DIPA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Badan Pengembangan SDM pada awal tahun 2019 mendapatkan amanah pagu anggaran sebesar Rp 398.969.199.000, (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Selama tahun 2019, nominal pagu anggaran BPSDM mengalami 5 (lima) kali perubahan menjadi Rp 456.489.248.000, (Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), hal ini dikarenakan perubahan kebijakan, tambahan anggaran insentif untuk pelatihan strategis, OJT Kelitbangan, Politeknik Pekerjaan Umum dan penambahan belanja pegawai untuk tunjangan kinerja.

Tabel 3.8 Pagu Anggaran Badan Pengembangan SDM TA. 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP RIBU)
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		**456.489.248**
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	138.198.719
2	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	44.083.260
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	73.410.229
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	82.428.554
5	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	94.526.042
6	Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum	23.842.444
TOTAL		456.489.248

Sumber: Dokumen DIPA Badan Pengembangan SDM TA. 2019

- Pagu Anggaran kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM merupakan pagu anggaran untuk unit kerja Sekretariat Badan, beserta pagu anggaran kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX.
- Pagu Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja merupakan pagu anggaran untuk unit kerja Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, beserta pagu anggaran Balai Penilaian Kompetensi.
- Pagu Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi merupakan pagu anggaran untuk unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, beserta pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi Balai Uji Coba Sistem Diklat Sumber Daya Air dan Konstruksi dan Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX.
- Pagu Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan pagu anggaran untuk unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, beserta pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX.
- Pagu Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional merupakan pagu anggaran untuk unit kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional beserta pagu anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX.
- Pagu Anggaran kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum merupakan Pagu Anggaran untuk unit kerja Politeknik Pekerjaan Umum.



Target *output* yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program pengembangan SDM tahun 2019 ialah target *output* yang ditetapkan dalam DIPA, yang juga dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target *output* kegiatan program pengembangan SDM berdasarkan target DIPA 2019 secara rinci disajikan pada **Tabel 3.9.**

Tabel 3.9 Target *Output* Kegiatan BPSDM Berdasarkan DIPA 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	TARGET DIPA AWAL	TARGET DIPA REVISI
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR				
Kegiatan 1. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM				
Sasaran Kegiatan 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya				
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		Layanan		
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	10	10
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1
Kegiatan 2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja				
Sasaran Kegiatan 2. Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Karir				
1. Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya		Orang	6.520	6.520
2. Jumlah orang yang dievaluasi Kinerjanya		Orang	23.000	23.000
3. Jumlah orang direncanakan karirnya		Orang	1.500	1.500
1	Dukungan Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR	Dokumen	9	9
2	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	Orang	23.000	23.000
3	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	Orang	6.520	6.520
4	Pemetaan Karir ASN PUPR	Orang	1.500	1.500
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1
7	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1
Kegiatan 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi				
Sasaran Kegiatan 3. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi				
1. Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	2.959	3.479
1	ASN yang Terlatih	Orang	2.840	3.360
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	23	23
3	ASN yang Terdidik	Orang	119	119
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2	2
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1
6	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	TARGET DIPA AWAL	TARGET DIPA REVISI
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR				
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah				
Sasaran Kegiatan 4. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah				
1. Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.045	3.075
1	ASN yang Terlatih	Orang	2.940	2.970
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	27	26
3	ASN yang Terdidik	Orang	105	105
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	3	3
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1
6	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1
Kegiatan 5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional				
Sasaran Kegiatan 5. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional				
1. Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	4.420	5.963
1	ASN yang Terlatih	Orang	3.870	5.413
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	3	3
3	Pengembangan Jabatan Fungsional	Orang	500	500
4	ASN yang Terdidik	Orang	50	50
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1
7	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1
Kegiatan 6. Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum				
Sasaran Kegiatan 6. Peningkatan Kompetensi SDM bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan				
1	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	Orang	150	150
2	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian	0	0
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1
5	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1

Sumber: Dokumen DIPA BPSDM, 2019

Akuntabilitas Kinerja



Laporan Kinerja 2019
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



IV

BAB EMPAT

4.1	Capaian Kinerja Badan Pengembangan SDM	74
4.2	Perbandingan Kinerja Badan Pengembangan SDM	104
4.3	Realisasi Anggaran	120

4.1 Capaian Kinerja BPSDM



Badan Pengembangan SDM (BPSDM) mempunyai sasaran program "Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten", dengan indikator kinerja adalah "Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten". Dalam mencapai sasaran program, BPSDM mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp456.489.248.000** (Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dengan pagu anggaran tersebut, pada akhir tahun 2019, BPSDM telah mencapai realisasi keuangan sebesar **Rp424.332.192.000** dengan persentase **92,96%** dan **realisasi fisik 98,79%** (Data e-Monitoring, 7 Januari 2020). Capaian realisasi keuangan dan realisasi fisik tersebut merupakan representasi dari realisasi berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan BPSDM dalam mencapai sasaran program. Berdasarkan angka capaian realisasi keuangan tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan BPSDM untuk tahun 2019 adalah sebesar **92,96%**.

Realisasi keuangan dalam pelaksanaan program pengembangan SDM telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu belanja **pegawai sebesar Rp 76.051.280.000** dengan persentase **95,51%**, realisasi **belanja barang** sebesar **Rp 301.016.471.000** dengan persentase **91,89%**, dan realisasi **belanja modal** sebesar **Rp47.264.441.000** dengan persentase **95,88%**. Detail realisasi keuangan per jenis belanja pada setiap kegiatan pengembangan SDM disajikan pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1 Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja

PROGRAM		BELANJA PEGAWAI (RP RIBU)	BELANJA BARANG (RP RIBU)	BELANJA MODAL (RP RIBU)	TOTAL (RP RIBU)
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pagu	79.627.247	327.567.523	49.294.478	456.489.248
	Realisasi	**76.051.280**	**301.016.471**	**47.264.441**	**424.332.192**
	%	95,51	91,89	95,88	92,96



Berbagai *output* atau hasil pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan untuk mencapai sasaran program pengembangan SDM bidang PUPR tentunya telah dipantau dan dievaluasi secara periodik per bulan guna efektifitas pencapaian program pengembangan SDM. Dalam hal ini, pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan telah didukung dengan sistem aplikasi yang dapat diakses secara online diantaranya melalui sistem informasi pelatihan (e-Pelatihan) dan aplikasi e-Monitoring PUPR.

Selanjutnya, kinerja BPSDM akan dijabarkan melalui perbandingan antara target dan capaian program dan kegiatan BPSDM yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Kinerja Program Pengembangan SDM Bidang PUPR

Capaian sasaran program pengembangan SDM bidang PUPR yaitu "Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten", diterjemahkan dengan keberhasilan BPSDM dalam mewujudkan SDM PUPR yang kompeten. Pada tahun 2019, target sasaran program pengembangan SDM bidang PUPR adalah sebesar 75%. Target ini merupakan angka kumulatif yang harus dicapai dari tahun 2015 sampai dengan 2019, sehingga secara kuantitatif untuk tahun 2019, BPSDM mempunyai target mewujudkan 32.503 orang SDM PUPR yang kompeten.

Pada tahun 2018, BPSDM telah berhasil mewujudkan 27.087 orang atau 68,79% (dari baseline 39.377 orang SDM PUPR) yang kompeten. Dengan memperhatikan bahwa target persentase merupakan kumulatif dari tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2019 BPSDM ditargetkan dapat mewujudkan 32.503 orang SDM PUPR kompeten atau 75% dari baseline yang ditetapkan untuk tahun 2019 yaitu 43.338 orang SDM PUPR.

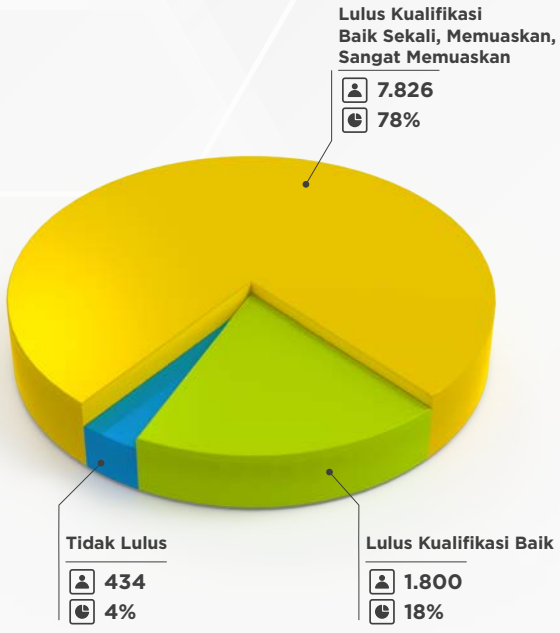
Badan Pengembangan SDM telah menentukan 4 (empat) unsur yang menjadi dasar ukuran SDM yang kompeten, sehingga capaian program pengembangan SDM akan dihitung berdasarkan total kumulatif unsur tersebut. 4 (empat) unsur yang menjadi ukuran capaian program Pengembangan SDM disajikan pada **Tabel 4.2**.

Tabel 4.2 Unsur Perhitungan Capaian Program Pengembangan SDM

NO	UNSUR PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	SDM PUPR Pusat Lulus Pelatihan	SDM PUPR Pusat yang menjadi kompeten setelah mengikuti pelatihan. Kriteria kompeten setelah pelatihan adalah lulus dengan kualifikasi Baik Sekali, Memuaskan, dan Sangat Memuaskan
2	SDM PUPR Daerah Lulus Pelatihan	SDM PUPR Daerah yang menjadi kompeten setelah mengikuti pelatihan. Kriteria kompeten setelah pelatihan adalah lulus dengan kualifikasi Baik Sekali, Memuaskan, dan Sangat Memuaskan
3	SDM PUPR Lulus Pendidikan	SDM PUPR Kompeten melalui pendidikan
4	SDM PUPR Pusat Kompeten dari Penilaian Kompetensi	PNS PUPR Pusat kompeten dari penilaian kompetensi (*assessment*)

a. SDM PUPR Pusat Lulus Pelatihan

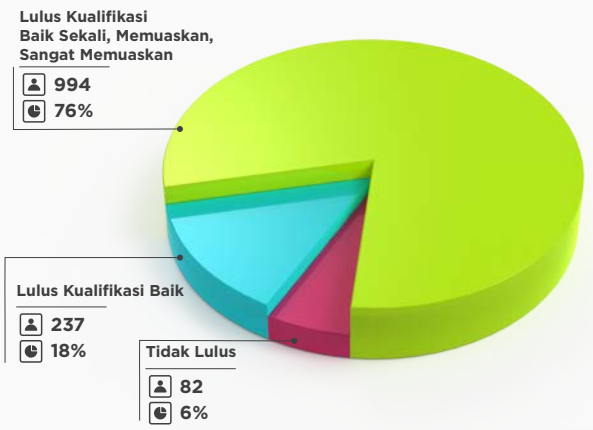
Pelatihan menjadi salah satu kegiatan bagi SDM PUPR untuk meningkatkan kompetensinya. Pelatihan di Badan Pengembangan SDM dilaksanakan berdasarkan kebutuhan strategis unit organisasi. Tahun 2019 ini, terdapat **10.060** orang SDM PUPR Pusat telah mengikuti pelatihan di Badan Pengembangan SDM. Berbagai pelatihan yang diadakan Badan Pengembangan SDM diselenggarakan untuk menghasilkan SDM PUPR yang kompeten guna mewujudkan pembangunan infrastruktur PUPR yang handal. SDM PUPR Pusat yang lulus pelatihan dengan kualifikasi Baik Sekali, Memuaskan, dan Sangat Memuaskan dijadikan sebagai salah satu ukuran capaian program pengembangan SDM.



Sumber: Pusdiklat, 2019

Gambar 4.1 Grafik Komposisi Peserta Pelatihan SDM PUPR Pusat Berdasarkan Kelulusan

Jumlah SDM PUPR Pusat yang lulus pelatihan adalah sebanyak 9.626 orang dari 10.060 orang yang mengikuti pelatihan. Sedangkan jumlah SDM Pusat yang lulus pelatihan dengan predikat Baik Sekali, Memuaskan, dan Sangat Memuaskan adalah sebanyak **7.826 orang**. Selanjutnya, grafik komposisi peserta Pelatihan SDM PUPR Pusat Berdasarkan Kelulusan disajikan pada **Gambar 4.1.**



Sumber: Pusdiklat, 2019

Gambar 4.2 Grafik Komposisi Peserta Pelatihan SDM PUPR Daerah Berdasarkan Kelulusan

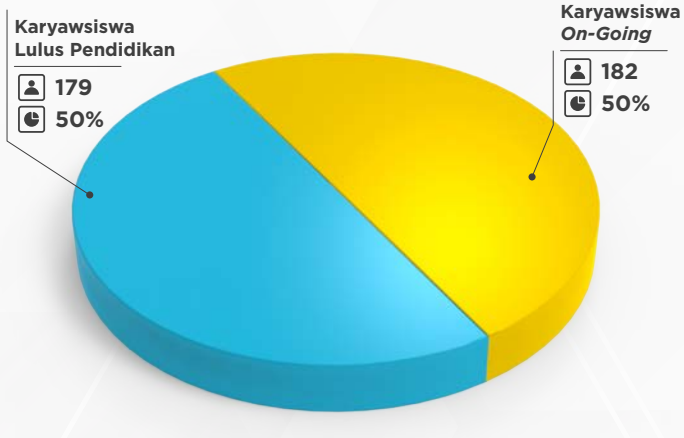
b. SDM PUPR Daerah Lulus Pelatihan

Pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan strategis unit organisasi dapat diikuti baik oleh SDM PUPR Pusat maupun SDM PUPR Daerah. Tahun 2019 ini, terdapat 1.313 orang SDM PUPR Daerah telah mengikuti pelatihan dengan jumlah peserta yang lulus pelatihan adalah sebanyak 1.231 orang. Sedangkan jumlah SDM Daerah yang lulus pelatihan dengan predikat Baik Sekali, Memuaskan, dan Sangat Memuaskan adalah sebanyak **994 orang**. Selanjutnya, grafik komposisi peserta Pelatihan SDM PUPR Daerah Berdasarkan Kelulusan disajikan pada **Gambar 4.2**.

c. SDM PUPR yang Lulus Pendidikan

Salah satu kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan Badan Pengembangan SDM yaitu kegiatan pendidikan. SDM Kementerian PUPR maupun SDM Pemerintah Daerah yang bekerja di bidang PUPR dan berstatus PNS dapat mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan Kementerian PUPR untuk memperoleh pendidikan ditingkat yang lebih tinggi.

SDM yang mengikuti program pendidikan (karyasiswa) dapat meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang studi yang diikuti, sehingga setelah lulus program pendidikan, SDM tersebut dapat dikatakan kompeten sesuai dengan bidang studinya. Selama tahun 2019 terdapat 361 orang yang mengikuti program pendidikan, dengan total jumlah yang lulus pendidikan adalah sebanyak **179 orang**. Total jumlah tersebut merupakan jumlah SDM yang kompeten melalui program pendidikan. Diagram SDM yang mengikuti pendidikan Tahun 2019 disajikan pada **Gambar 4.3** berikut.

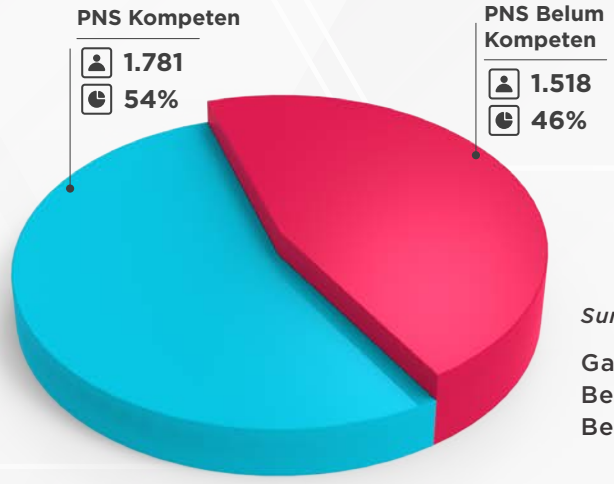


Sumber: Pusdiklat, 2019

Gambar 4.3 Grafik Komposisi SDM PUPR yang Mengikuti Pendidikan (Karyasiswa)

d. SDM PUPR Pusat Kompeten dari Penilaian Kompetensi

Penilaian kompetensi merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi SDM. Hasil penilaian kompetensi dapat menunjukkan seorang pegawai termasuk dalam kategori kompeten atau belum kompeten. Sepanjang tahun 2019, Badan Pengembangan SDM telah melakukan penilaian kompetensi (*assessment*) terhadap 3.748 orang yang terdiri atas pemetaan sebanyak 3.308 orang dan seleksi sebanyak 440 orang. Sesuai dengan baseline yang ditetapkan Badan Pengembangan SDM, maka yang akan dihitung sebagai capaian program pengembangan SDM adalah jumlah SDM PUPR Pusat yang berstatus PNS yang telah dinyatakan kompeten berdasarkan penilaian kompetensi. Dari 3.308 orang yang telah dinilai kompetensinya untuk pemetaan, sebanyak 1.781 orang termasuk kategori kompeten dan sebanyak 1.518 orang termasuk kategori belum kompeten. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa selama tahun 2019, melalui proses penilaian kompetensi terdapat **1.781 orang SDM kompeten**.



Sumber: Balai Penilaian Kompetensi, 2019

Gambar 4.4 Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Kategori Kompeten dan Belum Kompeten

Berdasarkan uraian capaian kelima unsur tersebut, maka diperoleh jumlah SDM PUPR yang kompeten (meningkat kompetensinya) pada tahun 2019 sebanyak **10.780 orang** dengan rekapitulasi capaian setiap unsur disajikan pada **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Capaian SDM yang Kompeten

NO	UNSUR PERHITUNGAN	CAPAIAN *OUTPUT* (ORANG)
1	SDM PUPR Pusat Lulus Pelatihan	7.826
2	SDM PUPR Daerah lulus pelatihan	994
3	SDM PUPR Lulus Pendidikan	179
4	SDM PUPR Pusat Kompeten dari Penilaian Kompetensi	1.781
TOTAL		**10.780**

Target program pengembangan SDM bidang PUPR tahun 2019 merupakan target kumulatif dari tahun 2015 – 2019, oleh karena itu capaian juga merupakan angka kumulatif dari capaian tahun 2015 – 2019. Pada tahun **2015 - 2018** jumlah SDM PUPR yang kompeten sebagai capaian program pengembangan SDM adalah sebanyak **27.087 orang** SDM PUPR dan capaian tahun 2019 adalah 10.780 **orang**. Dengan demikian, capaian kumulatif SDM PUPR yang kompeten tahun 2015 - 2019 yaitu sebanyak 37.867 **orang** (27.087 orang + 10.780 orang).

Berdasarkan hal tersebut, Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten (dengan baseline **43.338 orang** SDM PUPR) tahun 2019 yaitu sebesar **87,37%**. Target dan Capaian Sasaran Program Pengembangan SDM Bidang PUPR 2019 disajikan pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4.4 Target dan Capaian Sasaran Program Pengembangan SDM Bidang PUPR Tahun 2019

SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA		TARGET	CAPAIAN
Program Pengembangan SDM Bidang PUPR			
Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten			
1	Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten	75%	87,37%
		32.087 Orang	37.867 Orang
		Baseline : 43.338 Orang	

Dengan memperhatikan bahwa pada tahun 2019 capaian program pengembangan SDM bidang PUPR yaitu mencapai **87,37%**, maka dapat dihitung kinerja program pengembangan SDM bidang PUPR tahun 2019 dibandingkan dengan target yang ditetapkan adalah sebesar **116,50%**. Perhitungan kinerja disajikan berikut:

$$\text{Kinerja Program Tahun 2019} = \frac{\text{Capaian Program}}{\text{Target Program}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja Program Tahun 2019} = \frac{87{,}37\%}{75\%} \times 100\% = 116{,}50\%$$

Capaian program Pengembangan SDM sebesar 87,37% dengan kinerja sebesar 116,50% terhadap target tahun 2019, memberikan kontribusi terhadap capaian Sasaran Strategis pada tingkat kementerian yaitu **"Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR"** dengan indikator **Indeks/ Tingkat Tata Kelola Kementerian PUPR**, dengan proporsi yang telah ditetapkan Kementerian yaitu sebesar 25%. Dengan demikian Badan Pengembangan SDM melalui capaian programnya telah berhasil mendukung kinerja dalam Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR sebesar 29,12. Tabel 4.4.a berikut menyajikan dukungan kinerja Program Pengembangan SDM terhadap capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR**.

SASARAN PROGRAM		KINERJA SASARAN PROGRAM (%)	BOBOT (%)	KINERJA UNTUK SASARAN STRATEGIS "MENINGKATNYA TATA KELOLA KEMENTERIAN PUPR"
1	Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten	116,50	25	29,12

eningkatnya SDM PUPR yang kompeten dengan kinerja sebesar 116,50% telah berhasil meningkatkan kinerja Tata Kelola Kementerian PUPR sebesar 29,12%. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang kompeten dapat mewujudkan tata kelola kementerian PUPR yang lebih baik. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan asset yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tata kelola di Kementerian PUPR.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Pengembangan SDM

Kinerja kegiatan Pengembangan SDM merupakan akumulasi dari kinerja kegiatan yang dicapai oleh seluruh unit kerja di BPSDM. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilaksanakan seluruh unit kerja memiliki target output yang harus dicapai untuk mendukung pencapaian program pengembangan SDM bidang PUPR.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019, terdapat beberapa kegiatan utama pada program pengembangan SDM bidang PUPR. Capaian Output Kegiatan pada Program Pengembangan SDM Bidang PUPR disajikan pada **Tabel 4.5** berikut.

Tabel 4.5 Capaian *Output* Kegiatan Pada Program Pengembangan SDM Bidang PUPR

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	PERBANDINGAN SATU TAHUN (2019)					
		SATUAN	TARGET TAHUN 2019		CAPAIAN	KINERJA BERDASARKAN RENSTRA (6)/(4)X100%	KINERJA BERDASARKAN DIPA (6)/(5)X100%
			PERUBAHAN KEDUA RENSTRA	DIPA (REVISI)			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR							
Sasaran Progam: Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten		%	75	75	87,37	116,50	116,49
Kegiatan 1. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM							
Sasaran Kegiatan 1. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya							
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		Layanan	1				
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	100,00%	100,00%
2	ASN yang Terdidik	Orang	-	-	-	-	-
3	ASN yang Terlatih	Orang	-	-	-	-	-
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	10	10	10	100,00%	100,00%
5	Layanan Perkantoran	Layanan	12	1	12	100,00%	100,00%

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	PERBANDINGAN SATU TAHUN (2019)					
		SATUAN	TARGET TAHUN 2019		CAPAIAN	KINERJA BERDASARKAN RENSTRA (6)/(4)X100%	KINERJA BERDASARKAN DIPA (6)/(5)X100%
			PERUBAHAN KEDUA RENSTRA	DIPA (REVISI)			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR							
Sasaran Progam: Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten		%	75	75	87,37	116,50	116,49
Kegiatan 2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja							
Sasaran Kegiatan 2. Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Karir							
1. Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya		Orang	7.000	6.520	3.748	53,54%	57,48%
2. Jumlah orang yang dievaluasi Kinerjanya		Orang	23.000	23.000	20.034	87,10%	87,10%
3. Jumlah orang direncanakan karirnya		Orang	4.000	1.500	2.131	53,28%	142,07%
1	Dokumen Kebijakan Teknis/ NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR	Dokumen	0	9	11	-	122,22%
2	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	Orang	23.000	23.000	20.034	87,10%	87,10%
3	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	Orang	7.000	6.520	3.748	53,54%	57,48%
4	Pemetaan Karir ASN PUPR	Orang	4.000	1.500	2.131	53,28%	142,07%
5	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	1	1	1	100,00%	100,00%
6	Layanan Perkantoran	Bulan	12	1	12	100,00%	100,00%
Kegiatan 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi							
Sasaran Kegiatan 3. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi							
1. Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.359	3.479	3.544	105,51%	101,87%
1	ASN yang Terlatih	Orang	3.240	3.360	3.357	103,61%	99,91%
2	Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	23	23	23	100,00%	100,00%
3	ASN yang Terdidik	Orang	119	119	187	157,14%	157,14%
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	2	2	2	100,00%	100,00%
5	Layanan Perkantoran	Bulan	12	1	12	100,00%	100,00%

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	PERBANDINGAN SATU TAHUN (2019)					
		SATUAN	TARGET TAHUN 2019		CAPAIAN	KINERJA BERDASARKAN RENSTRA (6)/(4)X100%	KINERJA BERDASARKAN DIPA (6)/(5)X100%
			PERUBAHAN KEDUA RENSTRA	DIPA (REVISI)			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR							
Sasaran Progam: Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten		%	75	75	87,37	116,50	116,49
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah							
Sasaran Kegiatan 4. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah							
1. Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.309	3.075	2.711	81,93%	88,16%
1	ASN yang Terlatih	Orang	2.940	2.970	2.587	87,99%	87,10%
2	Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	27	26	22	81,48%	84,62%
3	ASN yang Terdidik	Orang	369	105	124	33,60%	118,10%
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	3	3	3	100,00%	100,00%
5	Layanan Perkantoran	Bulan	12	1	12	100,00%	100,00%
Kegiatan 5. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional							
Sasaran Kegiatan 5. Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional							
1. Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.920	5.463	5.479	139,77%	100,29%
1	ASN yang Terlatih	Orang	3.870	5.413	5.429	140,28%	100,30%
2	Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	2	3	3	150,00%	100,00%
3	Pengembangan Jabatan Fungsional	Orang	500	500	464	92,80%	92,80%
4	ASN yang Terdidik	Orang	50	50	50	100,00%	100,00%
5	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	12	1	12	100,00%	100,00%
6	Layanan Perkantoran	Bulan	12	1	12	100,00%	100,00%

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	PERBANDINGAN SATU TAHUN (2019)					
		SATUAN	TARGET TAHUN 2019		CAPAIAN	KINERJA BERDASARKAN RENSTRA (6)/(4)X100%	KINERJA BERDASARKAN DIPA (6)/(5)X100%
			PERUBAHAN KEDUA RENSTRA	DIPA (REVISI)			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR							
Sasaran Progam: Meningkatnya SDM PUPR yang Kompeten		%	75	75	87,37	116,50	116,49
Kegiatan 6. Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum							
Sasaran Kegiatan 6. Peningkatan Kompetensi SDM bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan							
1	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	Orang	150	150	137	91,33%	91,33%
2	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian	0	0	0	-	-
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	100,00%	100,00%
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	12	1	1	100,00%	100,00%
5	Layanan Perkantoran	Layanan	12	1	1	100,00%	100,00%

Berikut adalah uraian capaian kegiatan pada program pengembangan SDM:

a. Kegiatan 1

Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM

Kegiatan 1 mempunyai sasaran kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainya dengan indikator sasaran yaitu Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. *Output* yang telah dicapai dari kegiatan ini adalah 1 Layanan yang diperoleh dari berbagai *output* kegiatan pendukung manajemen eselon 1 dengan kinerja 100%.

b. Kegiatan 2

Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Kegiatan 2 mempunyai sasaran kegiatan Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Karir dengan indikator sasaran adalah jumlah orang yang dinilai kompetensinya, jumlah orang yang dievaluasi kinerjanya dan jumlah orang direncanakan karirnya. *Output* yang telah dicapai melalui kegiatan ini adalah 3.748 orang yang dinilai kompetensinya dengan kinerja berdasarkan Renstra sebesar 53,54% dan jika dibandingkan dengan target DIPA sebesar 57,48%, 20.034 orang yang dievaluasi kinerjanya dengan kinerja berdasarkan Renstra ataupun DIPA sebesar 87,10% dan 2.131 orang direncanakan karirnya dengan kinerja berdasarkan Renstra sebesar 53,28% dan jika dibandingkan dengan target DIPA sebesar 142,07%.

c. Kegiatan 3

Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi

Kegiatan 3 mempunyai sasaran kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi dengan indikator yaitu Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya. *Output* yang telah dicapai melalui kegiatan ini adalah 3.544 orang SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya melalui pelatihan sebanyak 3.357 orang dan melalui pendidikan sebanyak 187 orang. Kinerja jika dibandingkan dengan target Renstra adalah sebesar 105,51%, dan jika dibandingkan dengan target DIPA sebesar 101,87%.

d. Kegiatan 4

Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kegiatan 4 mempunyai sasaran Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan indikator sasaran yaitu Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya. *Output* yang telah dicapai melalui kegiatan ini adalah 2.711 orang SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya melalui pelatihan sebanyak 2.587 orang dan melalui pendidikan sebanyak 124 orang. Kinerja jika dibandingkan dengan target Renstra adalah sebesar 81,93%, dan jika dibandingkan dengan target DIPA sebesar 88,16%.

e. Kegiatan 5

Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Kegiatan 5 mempunyai sasaran Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional dengan indikator Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya. *Output* yang telah dicapai melalui kegiatan ini adalah 5.479 orang SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya melalui pelatihan sebanyak 5.429 orang, melalui pendidikan sebanyak 50 orang dan melalui pengembangan Jabatan Fungsional sebanyak 464 orang. Kinerja jika dibandingkan dengan target Renstra adalah sebesar 139,77%, dan jika dibandingkan dengan target DIPA sebesar 100,29%.



f. Kegiatan 6

Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum



Kegiatan 6 mempunyai sasaran Peningkatan Kompetensi SDM bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan. *Output* yang telah dicapai melalui kegiatan ini adalah 137 orang yang terdiri atas 41 orang bidang Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, 46 orang bidang Teknologi konstruksi Bangunan Air, dan 50 orang bidang Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan dengan kinerja berdasarkan Renstra ataupun DIPA sebesar 91,33%.

Berdasarkan capaian keenam kegiatan tersebut maka dapat direkap jumlah *output* utama kegiatan Pengembangan SDM adalah sesuai **Tabel 4.6**.

Tabel 4.6 *Output* Kegiatan Utama Pengembangan SDM Bidang PUPR Tahun 2019

NO	*OUTPUT* KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN KEDUA RENSTRA	TARGET DIPA (REVISI)	CAPAIAN	KINERJA BERDASARKAN RENSTRA (%)	KINERJA BERDASARKAN DIPA (%)
a.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	100,00%
b.	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	7.000 orang	6.520 orang	3.748 orang	53,54%	57,48%
c.	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	23.000 orang	23.000 orang	20.034 orang	87,10%	87,10%
d.	Pemetaan Karir ASN PUPR	4.000 orang	1.500 orang	2.131 orang	53,28%	142,07%
e.	ASN yang Terlatih	10.050 orang	11.743 orang	11.373 orang	113,16%	96,85%
f.	ASN yang Terdidik	538 orang	274 orang	361 orang	67,10%	131,75%
g.	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	150 orang	150 orang	137 orang	91,33%	91,33%

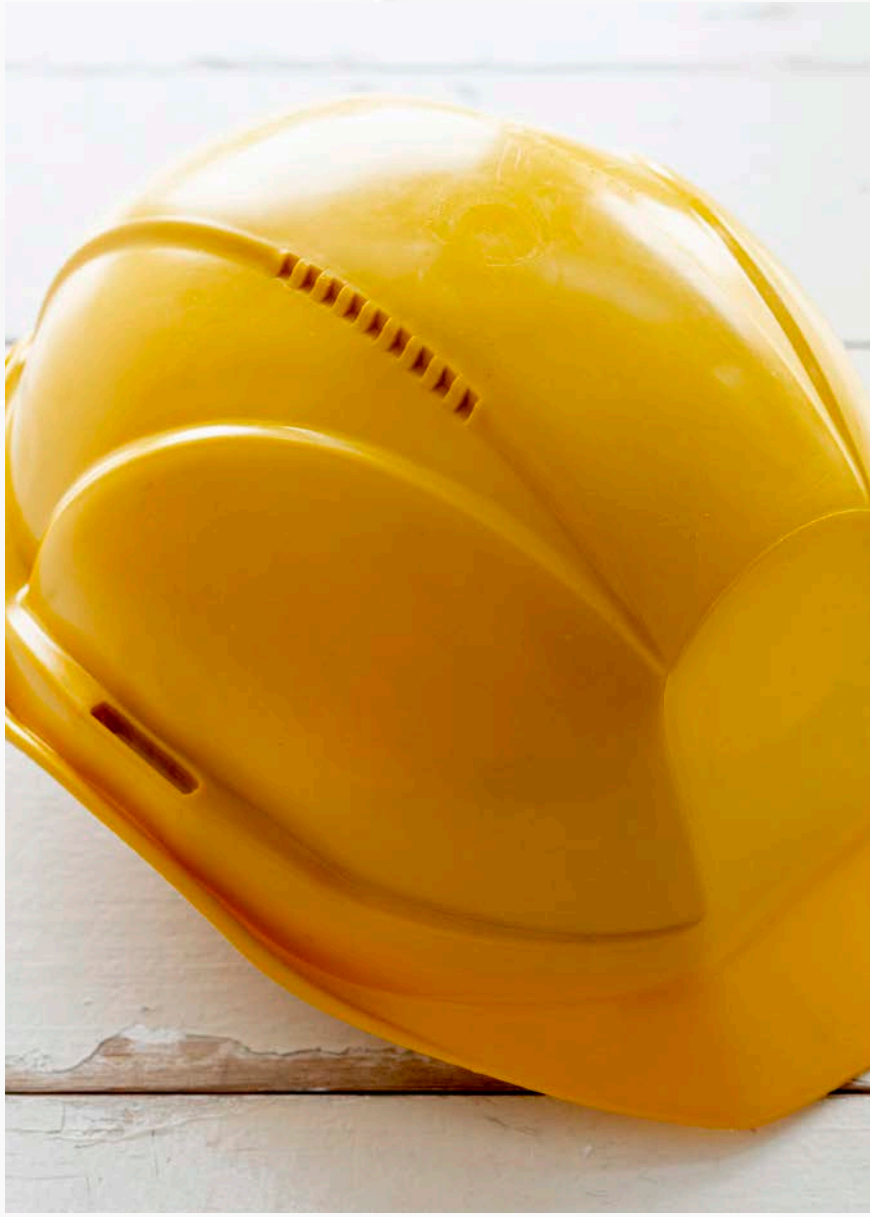
Berikut adalah uraian capaian *output* utama pada program pengembangan SDM:

a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Output kegiatan layanan dukungan manajemen eselon I dilaksanakan di unit kerja Sekretariat BPSDM. Tahun 2019, *output* kegiatan ini terealisasi 1 (satu) layanan. Berdasarkan capaian kegiatan layanan dukungan manajemen eselon I maka kinerja kegiatan tersebut jika dibandingkan dengan target renstra adalah 100% sedangkan jika dibandingkan dengan target DIPA adalah 100%.

b. Penilaian Kompetensi ASN PUPR

Kegiatan penilaian kompetensi ASN PUPR dilakukan dalam rangka memetakan kompetensi seluruh SDM Kementerian PUPR. Pemetaan kompetensi sangat diperlukan sebagai input pengembangan kompetensi serta pengembangan karir SDM di Kementerian PUPR. Melalui penilaian kompetensi dapat diperoleh gambaran apakah seorang pegawai tersebut kompeten atau belum kompeten. Bagi pegawai yang belum kompeten, tentunya akan ditindaklanjuti dengan peningkatan kompetensi, yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan, bagi pegawai yang telah kompeten dapat dipertimbangkan untuk peningkatan karir pegawai tersebut.



Tahun 2019, BPSDM telah melakukan penilaian kompetensi ASN PUPR sebanyak 3.748 orang. Berdasarkan capaian kegiatan penilaian kompetensi ASN PUPR maka kinerja kegiatan tersebut jika dibandingkan dengan target renstra adalah 53,54% sedangkan jika dibandingkan dengan target DIPA adalah 57,48%. Detail Capaian Penilaian Kompetensi ASN PUPR disajikan pada **Tabel 4.7**.

Tabel 4.7 Rekapitulasi Capaian Penilaian Kompetensi ASN PUPR

NO	KEGIATAN	REALISASI
1	**Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Jabatan Administrasi, Fungsional, Kesatkeran**	**2.131**
	Eselon II	7
	Eselon III	120
	Eselon IV	329
	Pelaksana	1.069
	Jabatan Fungsional	100
	Kasatker	168
	PPK	275
	Non PNS	63
2	**Penilaian Potensi dan Kompetensi Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi**	**0**
3	**Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Pemetaan**	**159**
4	**Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Jabatan Administrasi Pelaksana**	**1.458**
	Pelaksana	1.458
	CPNS	0
	Non PNS	0
TOTAL		**3.748**

Sumber: Balai Penilaian Kompetensi, 2019





Hasil penilaian kompetensi yang dilakukan untuk pemetaan kompetensi pegawai, dikelompokan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Kompeten dan Belum Kompeten. Sedangkan hasil penilaian kompetensi yang dilakukan untuk seleksi kompetensi pegawai, dikelompokan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu direkomendasikan dan tidak direkomendasikan. Rekap hasil penilaian kompetensi disajikan pada **Tabel 4.8**.

Tabel 4.8 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kompetensi

NO	JABATAN	CAPAIAN	HASIL				
			KOMPETEN	BELUM KOMPETEN	DIREKOMENDASIKAN	TIDAK DIREKOMENDASIKAN	PROSES VERIFIKASI
PEMETAAN							
1	Eselon I	-	-	-	-	-	-
2	Eselon II	7	6	1	-	-	-
3	Eselon III	120	73	45	-	-	2
4	Eselon IV	329	239	90	-	-	-
5	Pelaksana	2.346	1.284	1.057	-	-	5
6	Kasatker	168	95	72	-	-	1
7	PPK	275	52	222	-	-	1
8	Non PNS	63	32	31	-	-	-
Jumlah Pemetaan		3.308	1.781	1.518	-	-	9
SELEKSI							
9	Jabatan Fungsional	100	-	-	63	37	-
10	Lolos Butuh	340	-	-	256	84	-
Jumlah Seleksi		440	-	-	319	121	
JUMLAH		**3.748**	**1.781**	**1.518**	**319**	**121**	**9**

Sumber: Balai Penilaian Kompetensi, 2019

c. Pengelolaan Kinerja ASN PUPR

Kegiatan pengelolaan kinerja ASN PUPR atau disebut juga Pemantauan kinerja dimaksudkan untuk memonitor dan memberikan informasi kinerja pegawai Kementerian PUPR. Kegiatan pemantauan kinerja dilakukan dengan pemutakhiran data penilaian prestasi kerja, serta memonitor data pelaksanaan dan pencapaian penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di Kementerian PUPR. Target kegiatan ini adalah orang yang dievaluasi Kinerjanya sebanyak 23.000 orang, disertai bukti SKP (*hardcopy* dan *softcopy*).

Capaian kegiatan pengelolaan kinerja ASN PUPR tahun 2019 adalah sebesar **20.034 orang**. Berdasarkan capaian kegiatan pengelolaan kinerja ASN PUPR maka kinerja kegiatan tersebut jika dibandingkan dengan target renstra dan target DIPA adalah **87,10%**. **Tabel 4.9** menyajikan capaian ASN yang terpantau kinerjanya.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Capaian ASN yang Terpantau Kinerjanya

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH ASN YANG TERPANTAU KINERJANYA
1	Sekretariat Jenderal	547
2	Inspektorat Jenderal	240
3	Ditjen Sumber Daya Air dan Dewan Sumber Daya Air	7.327
4	Ditjen Bina Marga dan BPJT	6.333
5	Ditjen Cipta Karya dan BPPSPAM	2.290
6	Ditjen Penyediaan Perumahan	481
7	Ditjen Bina Konstruksi	1.079
8	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	158
9	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	181
10	Badan Penelitian dan Pengembangan	930
11	Badan Pengembangan SDM	468
TOTAL PNS KEMENTERIAN PUPR		**20.034**

Sumber: e-Kinerja, 2019

d. Pemetaan Karir ASN PUPR



Kegiatan pemetaan karir ASN PUPR dilakukan untuk memetakan karir PNS di Kementerian PUPR. Kegiatan ini salah satunya dilaksanakan melalui feedback kepada PNS PUPR mengenai peta karirnya yang didasarkan dari hasil penilaian kompetensi ASN PUPR yang sebelumnya telah dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Target kegiatan ini adalah 4.000 orang yang direncanakan karirnya.

Pemetaan Karir ASN PUPR adalah memetakan pegawai berdasarkan hasil penilaian kompetensi (*full assessment*) ke dalam kotak Sembilan (*talent box*) per jenjang jabatan. Proyeksi pegawai hanya dilakukan pada pegawai yang mengikuti penilaian kompetensi dengan metode *full assessment* (*assessment center*) karena metode penilaian kompetensi inilah memiliki metode pengambilan data dengan *multimethodes* dan multi *assessor* sehingga memiliki kelengkapan data. Pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian kompetensi dengan menggunakan metode *full assessment* dengan jumlah peserta 2.131 orang, dengan demikian capaian kegiatan pemetaan karir ASN PUPR tahun 2019 adalah sebesar 2.131 orang. Berdasarkan capaian kegiatan pemetaan karir ASN PUPR maka kinerja kegiatan tersebut jika dibandingkan dengan target renstra adalah 53,28% sedangkan jika dibandingkan dengan target DIPA adalah 142,07%.

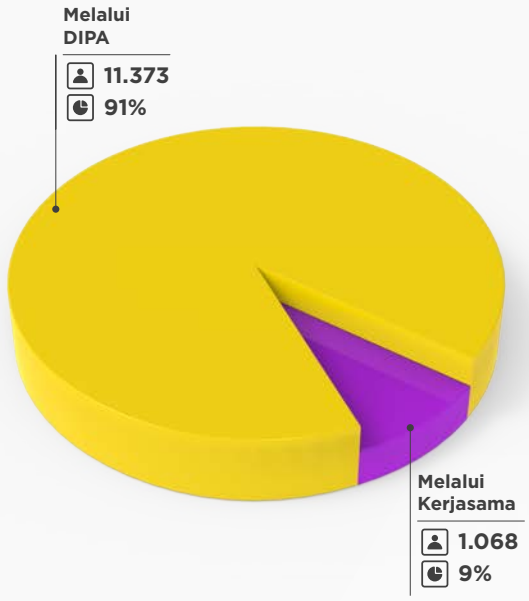


e. ASN yang Terlatih

memperhatikan adanya tugas perbantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka BPSDM mengalokasikan juga pelatihan untuk ASN Pemerintah Daerah yang bekerja di bidang PUPR.

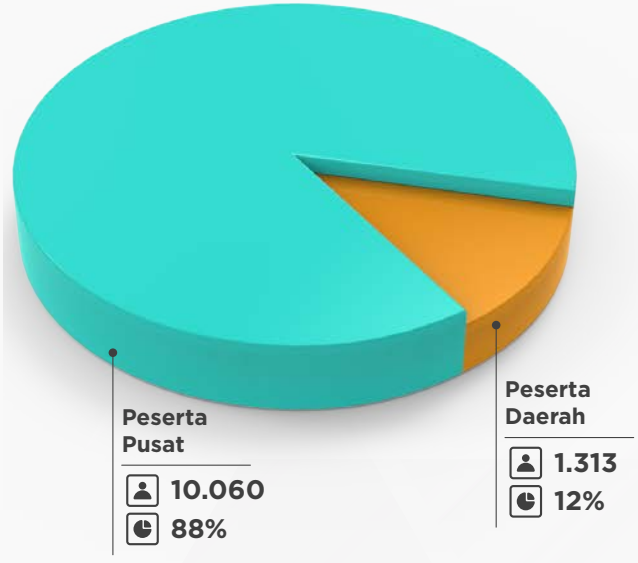
Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM meliputi pelatihan Latsar, pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional. Pelatihan teknis dan pelatihan fungsional meliputi bidang Sumber Daya Air, Konstruksi, Jalan, Perumahan, Permukiman, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta Manajemen. Capaian kegiatan pelatihan tahun 2019 adalah sebanyak 12.448 orang ASN yang Terlatih yang terdiri atas 11.373 orang melalui pelatihan dengan pembiayaan DIPA dan 1.075 orang melalui

pelatihan kerjasama. Berdasarkan capaian pelatihan melalui pembiayaan DIPA tersebut, maka kinerja kegiatan pelatihan jika dibandingkan dengan target renstra adalah 113,16% sedangkan jika dibandingkan dengan target DIPA adalah 96,85%. Kinerja penyelenggaraan pelatihan kurang dari 100% atau capaian kurang dari target DIPA disebabkan kurangnya peserta yang hadir saat dipanggil untuk mengikuti pelatihan. Detail capaian ASN yang Terlatih melalui pelatihan dengan pembiayaan DIPA disajikan pada **Gambar 4.5** sampai dengan **Gambar 4.11**.



Sumber: Pusdiklat, 2019

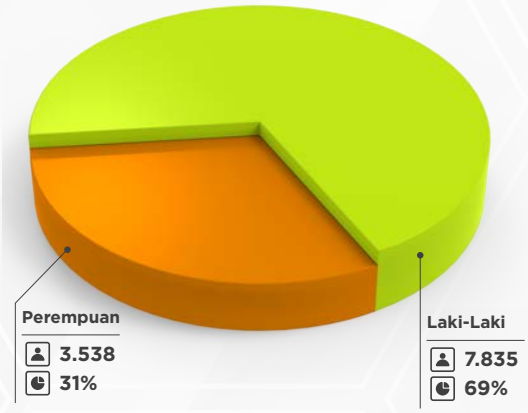
Gambar 4.5 Grafik Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Sumber Pendanaan



Sumber: Pusdiklat, 2019

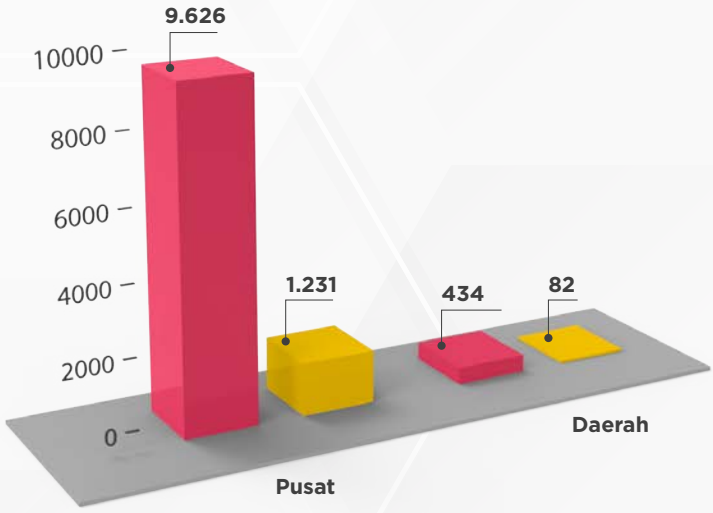
Gambar 4.6 Grafik Komposisi Peserta Pelatihan Pusat dan Daerah





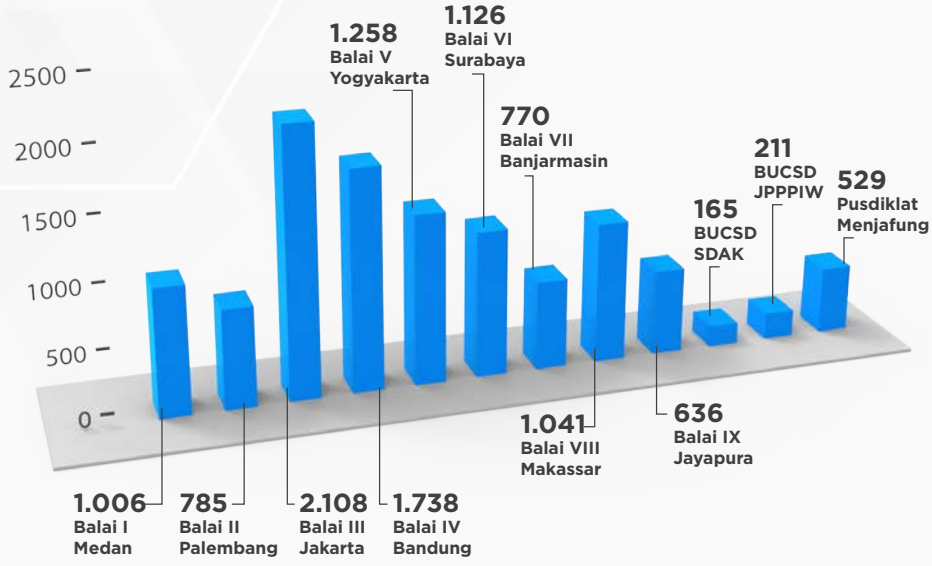
Sumber: Pusdiklat, 2019

Gambar 4.7 Grafik Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin



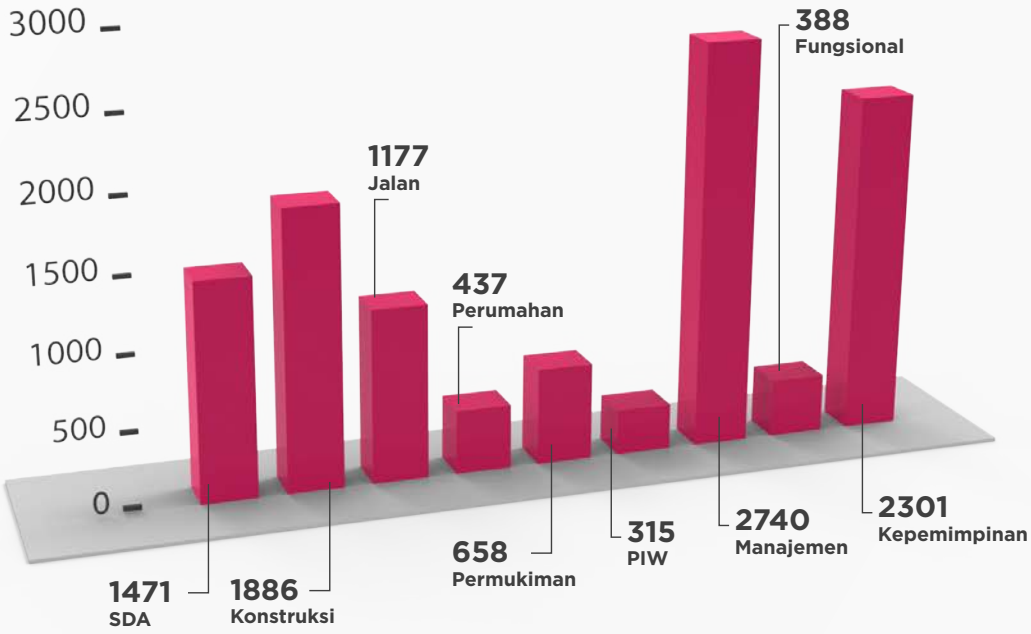
Sumber: Pusdiklat, 2019

Gambar 4.8 Grafik Komposisi Peserta Pelatihan Berdasarkan Tingkat Kelulusan



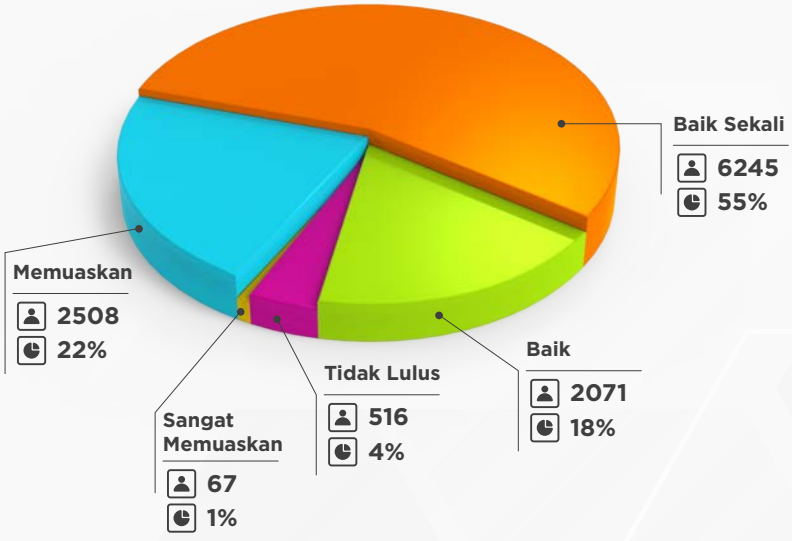
Sumber: Pusdiklat, 2019

Gambar 4.9 Grafik Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Unit Kerja Penyelenggara



Sumber: Pusdiklat, 2019

Gambar 4.10 Grafik Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Bidang Pelatihan



Sumber: Pusdiklat, 2019

Gambar 4.11 Grafik Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Predikat Kelulusan

Penyelenggaraan beberapa pelatihan tahun 2019 juga dibarengi dengan pelaksaan sertifikasi. Sertifikasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan beberapa asosiasi profesi serta kementerian atau lembaga lain. Melalui pelaksanaan sertifikasi ini, Badan Pengembangan SDM dapat mencetak beberapa SDM ahli dengan rincian sesuai dengan **Tabel 4.10**.

Tabel 4.10 Rekapitulasi SDM PUPR yang Bersertifikasi Pihak Ketiga

NO	NAMA PELATIHAN	LEMBAGA/ ASOSIASI SERTIFIKASI	SDM AHLI YANG DIHASILKAN	JUMLAH PESERTA	JUMLAH LULUS SERTIFIKASI
BIDANG SDA				**440**	**440**
1	Perencanaan Teknis Bendungan	KNIBB	Ahli Bendungan	8	8
2	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaaan Bendungan	KNIBB	Ahli Bendungan	26	26
3	O & P Bendungan	KNIBB	Ahli Bendungan	30	30
4	Perencanaan Teknis Sabo Dam	HATHI	Ahli SDA	40	40
5	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Pantai	HATHI	Ahli SDA	11	11
6	Perencanaan Teknis Sungai	HATHI	Ahli SDA	19	19
7	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaaan Sungai	HATHI	Ahli SDA	34	34
8	Perencanaan Teknis Bangunan Pantai	HATHI	Ahli SDA	17	17
9	Perencanaan Teknis Embung	HATHI	Ahli SDA	38	38
10	O & P Rawa	HATHI	Ahli SDA	14	14
11	O & P Irigasi	HATHI	Ahli SDA	53	53
12	Penanggulangan Banjir	HATHI	Ahli SDA	24	24
13	Perencanaan Teknis Air Baku	HATHI	Ahli SDA	14	14
14	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Air Baku	HATHI	Ahli SDA	14	14
15	Perencanaan Teknis Hidrologi dan Alokasi Air	HATHI	Ahli SDA	41	41
16	Pengelolaan SDA Terpadu	HATHI	Ahli SDA	57	57
BIDANG KONSTRUKSI				**1.556**	**983**
1	SMK3 Ahli Muda	A2K4	Ahli Muda K3	531	366
2	SMK3 Konstruksi Ahli Madya	A2K4	Ahli Madya K3	33	32
3	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	LKPP	Ahli PBJ	992	585
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN				**180**	**163**
1	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	HPJI	Ahli Muda Jalan	111	102
2	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan	HPJI	Ahli Muda Jembatan	34	31
3	Perencanaan Jalan Berkeselamatan	HPJI	Ahli Muda Keselamatan Jalan	35	30

NO	NAMA PELATIHAN	LEMBAGA/ ASOSIASI SERTIFIKASI	SDM AHLI YANG DIHASILKAN	JUMLAH PESERTA	JUMLAH LULUS SERTIFIKASI
BIDANG PERUMAHAN				**81**	**75**
1	Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Komisioning Instalasi Pengolahan Air	LSP-AMI	Ahli Komisioning IPA	23	22
2	Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	BPSDM	Ahli Bangunan Gedung Negara	58	53
BIDANG PIW				**12**	**12**
1	Sistem Informasi Pemetaan untuk Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Ikatan Surveyor Indonesia	Ahli Survey dan Pemetaan	12	12
BIDANG MANAJEMEN				**248**	**166**
1	Bendahara Pengeluaran	Kemenkeu	Bendahara Negara Tersertifikasi	194	112
2	*Training Officer Course* (TOC)	LAN	Penyelenggara Pelatihan	54	54
TOTAL				**2.517**	**1.839**

Sumber: Pusdiklat, 2019

f. ASN yang Terdidik

Penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan ASN yang terdidik dilakukan melalui pelaksanaan kerjasama dangan perguruan tinggi mitra dan juga pemberian beasiswa kepada beberapa PNS untuk mengikuti program pendidikan reguler. Capaian penyelenggaraan pendidikan/ASN terdidik tahun 2019 adalah sebanyak 361 orang ASN yang Terdidik.

Berdasarkan capaian tersebut, sehingga capaian kegiatan pendidikan jika dibandingkan dengan target renstra adalah 67,10% sedangkan jika dibandingkan dengan target DIPA adalah 131,75%. Detail capaian ASN yang Terdidik disajikan pada Tabel 4.11, sedangkan daftar perguruan tinggi mitra beserta program studi disajikan pada lampiran.

Kinerja penyelenggaraan pendidikan yang mencapai 131,75% atau melebihi target disebabkan adanya ASN terdidik yang sudah tidak dibiayai tetapi masih mengikuti program pendidikan (belum lulus pada masa studi yang ditentukan BPSDM).



Tabel 4.11 Rekapitulasi Jumlah ASN yang Terdidik

BIDANG	ASN PUSAT			ASN DAERAH			TOTAL
	ON-GOING TAHUN 2018	LULUS TAHUN 2018	SUB TOTAL	*ON-GOING* TAHUN 2018	LULUS TAHUN 2018	SUB TOTAL	
Bidang SDA dan Konstruksi	69	25	94	33	60	93	187
Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	41	26	67	17	40	57	124
Bidang Manajemen	21	19	40	1	9	10	50
SUB TOTAL	**131**	**70**	**201**	**51**	**109**	**160**	**361**
TOTAL ASN TERDIDIK (ORANG)	**361**						

Sumber: Pusdiklat, 2019

Selain dari keenam kegiatan utama tersebut, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang menunjang keberhasilan pencapaian program pengembangan SDM PUPR, diantaranya:

a. Dokumen Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR

Pelaksanaan program pengembangan SDM sangat perlu didukung oleh ketersedian kebijakan teknis pengembangan SDM yang akuntabel. Berdasarkan hal tersebut, BPSDM melaksanakan kegiatan penyusunan sistem pengembangan SDM baik yang terkait penilaian kompetensi, pengelolaan kinerja, dan pemetaan karir. Pada tahun 2018, BPSDM berhasil menyusun **11 dokumen** Kebijakan Teknis pengembangan SDM atau melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 9 dokumen, sehingga kinerja kegiatan ini adalah **122,22%**. Rincian Dokumen Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR, sebagai berikut:

1. **Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi ASN PUPR:**
   a) Kamus Kompetensi Teknis Bidang PUPR;
   b) Standar Kompetensi Jabatan Non Teknik PUPR;
   c) Instrumen *Assessment Center*;
   d) Instrumen Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Non Teknik;
   e) Instrumen Penilaian Kompetensi Teknis Bidang SDA dan Konstruksi; dan
   f) Instrumen Penilaian Kompetensi Teknis Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

2. **Kebijakan Teknis/NSPK Pengelolaan Kinerja ASN PUPR**

   a) SE Penilaian Kinerja PNS (SE Menteri PUPR No. 07/SE/M/2019);

   b) Draft Pedoman Cascading IKU Berbasis PP No.30 Tahun 2019; dan

   c) Draft Pedoman Dialog Interaktif dengan Atasan (DInDA).

3. **Kebijakan Teknis, NSPK Pemetaan Karir ASN PUPR**

   a) Draft SE Pedoman Manajemen Talenta BPSDM; dan

   b) Draft Pedoman Penyusunan Rencana Suksesi.



b. Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan, yang meliputi:

1. **Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi**

   Kegiatan pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Konstruksi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pelatihan bidang SDA dan konstruksi. Selama tahun 2019, BPSDM telah berhasil mengembangan dokumen pola dan teknik kediklatan bidang SDA dan Konstruksi sebanyak **7 (tujuh)** dokumen, dokumen kurikulum dan modul kediklatan bidang SDA dan Konstruksi sebanyak **9 (sembilan)** dokumen, serta uji coba sistem pelatihan bidang SDA dan Konstruksi sebanyak **7 (tujuh)** dokumen. Sehingga, total dokumen Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul bidang SDA dan Konstruksi adalah sebanyak 23 dokumen dari target **23** dokumen. Dengan membandingkan antara capaian dan targetnya, maka kinerja kegiatan ini adalah sebesar **100%**.

   Daftar Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan disajikan pada **Tabel 4.12**, Kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang SDA dan Konstruksi disajikan pada **Tabel 4.13**, dan Kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang SDA dan Konstruksi hasil uji coba disajikan pada **Tabel 4.14**.

Tabel 4.12 Pola dan Teknik Kediklatan Bidang SDA dan Konstruksi

NO	POLA DAN TEKNIK KEDIKLATAN	JUMLAH DOKUMEN
BIDANG SUMBER DAYA AIR		
1	Pola pelatihan SDA dan Konstruksi dengan target *output* sebanyak satu dokumen, terealisasi satu dokumen.	1
2	Bahan pembelajaran interaktif bidang SDA dengan judul dokumen perencanaan teknis irigasi.	1
3	Bahan pembelajaran interaktif bidang SDA dengan judul dokumen perencanaan teknis bendungan.	1
BIDANG KONSTRUKSI		
1	Bahan pembelajaran interaktif bidang konstruksi dengan judul estimiasi biaya konstruksi.	1
2	Bahan pembelajaran interaktif bidang konstruksi dengan judul kelayakan proyek penyediaan infrastuktur.	1
3	Bahan pembelajaran interaktif bidang konstruksi dengan judul manajemen kontsruksi dasar (SIDLACOM).	1
4	Bahan pembelajaran interaktif bidang konstruksi dengan judul sistem manajemen kesalamatan dan kesehatan kerja (SMK3).	1
JUMLAH		**7**

Sumber: Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2019

Tabel 4.13 Kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang SDA dan Konstruksi

NO	POLA DAN TEKNIK KEDIKLATAN	JUMLAH DOKUMEN
BIDANG SUMBER DAYA AIR		
1	Penyusunan kurikulum dan modul pelatihan perencanaan drainase	1
2	Pengembangan kurikulum dan modul perencanaan bangunan pengaman pantai	1
3	Review cepat dan penyesuaian modul pelatihan bidang sumber daya air berjumlah satu dokumen dengan materi yang direview yaitu : sistem manajemen operasi dan pemeliharaan irigasi (SMOPI, teknologi bending modular, teknologi struktur revetment 3B, modul pejabat inti satuan kerja (PISK) bidang SDA, dan rekomendasi teknis perizinan bidang SDA.	1
BIDANG KONSTRUKSI		
1	Kurikulum dam modul pelatihan ahli rekayasa nilai (*value engineering*)	1
2	Kurikulum dan modul pelatihan ahli penilai kegagalan bangunan (*forensic engineering*)	1
3	Review cepat dan penyesuaian modul pelatihan bidang konstruksi dengan judul sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) konstruksi yang kemudian setelah dilakukan review berubah menjadi sistem manajemen keselamatan konstruksi	1
4	Review cepat dan penyesuaian modul pelatihan bidang konstruksi dengan judul hukum kontrak konstruksi	1
5	Review cepat dan penyesuaian modul pelatihan bidang konstruksi dengan judul sistem manajemen mutu yang kemudian setelah dilakukan review berubah menjadi sistem manajemen mutu pekerjaan konstruksi	1
6	Review cepat dan penyesuaian modul pelatihan bidang konstruksi dengan judul investasi infrastruktur yang kemudian setelah dilakukan review berubah kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)	1
JUMLAH		**9**

Sumber: Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2019



Tabel 4.14 Pelaksanaan Uji Coba Sistem Pelatihan Teknologi

NO	PELAKSANAAN UJI COBA SISTEM PELATIHAN TEKNOLOGI	JUMLAH DOKUMEN
BIDANG SUMBER DAYA AIR		
1	Sistem Pelatihan Teknologi Ferosemen untuk Jaringan Irigasi Tersier	1
2	Sistem Pelatihan Teknologi Sabodam Modular	1
3	Sistem Pelatihan Teknologi Pemboran Sumur Air Tanah	1
4	Sistem Pelatihan Teknologi Pemecah Gelombang Ambang Rendah (PEGAR) Berbahan Geotekstil	1
5	Sistem Pelatihan Teknologi Geolistrik untuk Perencanaan Air Tanah	1
BIDANG KONSTRUKSI		
1	Sistem Pelatihan Perencanaan Konstruksi dengan Teknologi Building Information Modeling (BIM)	1
2	Sistem Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi (*e-Learning*)	1
JUMLAH		**7**

Sumber: Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi, 2019



2. Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kegiatan pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pelatihan bidang tersebut. Selama tahun 2019, BPSDM telah berhasil menyusun **4 (empat) dokumen** pola dan teknik kediklatan bidang bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, **8 (delapan) dokumen** kurikulum dan modul kediklatan bidang bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta **10 dokumen** uji coba sistem pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Sehingga, total dokumen Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul kediklatan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah sebanyak **22 dokumen** dari target 26 dokumen. Dengan membandingkan antara capaian dan targetnya, maka kinerja kegiatan ini adalah sebesar **84,61%**.

Kinerja kegiatan pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan unit kerja yang semula unit kerja Balai Uji Coba Jalan dan Permukiman diubah menjadi unit kerja Politeknik Pekerjaan Umum. Daftar Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah disajikan pada Tabel 4.15, Kurikulum dan Modul Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah disajikan pada **Tabel 4.16**, dan Kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang di Ujicoba disajikan pada **Tabel 4.17**.

Tabel 4.15 Pola dan Teknik Kediklatan Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

NO	POLA, TEKNIK, KURIKULUM, DAN MODUL KEDIKLATAN	JUMLAH DOKUMEN
1	Pengembangan E-Learning Bidang Jalan dan Jembatan	1
2	Pengembangan Media Pembelajaran Bidang Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1
3	Penyusunan Materi E Learning Bidang Perumahan dan Permukiman	1
4	Pengembangan Media Pembelajaran Bidang Perumahan dan Permukiman	1
TOTAL DOKUMEN		**4**

Sumber: Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2019

Tabel 4.16 Kurikulum dan Modul Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

NO	POLA, TEKNIK, KURIKULUM, DAN MODUL KEDIKLATAN	JUMLAH DOKUMEN
POLA DAN TEKNIK PELATIHAN		
1	Review Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengelolaan Rusunawa	1
2	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Rumah Susun	1
3	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Permukiman (Refreshing Course)	1
4	Pengembangan Kurikulum dan Modul Pelatihan Perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir	1
5	Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur	1
6	Review Kurikulum dan Modul Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1
7	Review Kurikulum dan modul Pelatihan Spesifikasi Umum Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan	1
8	Review Kurikulum dan Modul Bidang Jalan dan Jembatan	1
TOTAL DOKUMEN		**8**

Sumber: Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2019

Tabel 4.17 Kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hasil Uji Coba

NO	POLA, TEKNIK, KURIKULUM, DAN MODUL KEDIKLATAN	JUMLAH DOKUMEN
1	Perhitungan Kuantitas dalam Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Jembatan	1
2	Pemeliharaan Jembatan Khusus	1
3	Pejabat Inti Satuan Kerja Bidang Jalan dan Jembatan	1
4	Penyusunan Master Plan dan Development Plan	1
5	Penentuan Prioritas Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah	1
6	Calon Pengajar (ToT) untuk Pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (crash program)	1
7	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar	1
8	Manajemen dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Angkatan I (crash program)	1
9	Pelatihan Pemeriksaan (Quick *Assessment*) Bangunan Pasca Bencana (Crash Program)	1
10	Penyusunan Feasibility Study (FS) dan Land Acquisition and Resettlement Plan (LARP) SPALD Perkotaan (Kerjasama)	1
TOTAL DOKUMEN		10

Sumber: Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2019

3. Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Kegiatan pengembangan pola, teknik, kurikulum dan modul kediklatan bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pelatihan bidang tersebut. Capaian untuk kegiatan ini adalah 3 (tiga) dokumen, sesuai dengan target yang ditetapkan (kinerja 100%).



Tabel 4.18 Pola, Kurikulum dan Modul Kediklatan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

NO	KEGIATAN	JUMLAH DOKUMEN
1	Modul Peningkatan Integritas, Pencegahan Bahaya Narkoba, dan PUG	1
2	Modul Sosio-kultural	1
3	Kurikulum dan modul Pelatihan Manajemen Pengembangan SDM	1
TOTAL DOKUMEN		3

Sumber: Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, 2019



c. Pengembangan Jabatan Fungsional

Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pejabat fungsional di Kementerian PUPR. Jabatan fungsional merupakan jabatan PNS yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional di Kementerian PUPR mempunyai peran sebagai *engine* dalam pembangunan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut, BPSDM mempunyai target meningkatkan jumlah pejabat fungsional yang ada di Kementerian PUPR serta meningkatkan perannya.

Pencapaian kegiatan ini, secara umum diukur dari banyaknya pegawai yang dapat direkomendasikan untuk diangkat sebagai pejabat fungsional dengan penjelasan bahwa pengangkatan dilakukan melalui proses pembinaan, pengembangan, termasuk penilaian. Tahun ini BPSDM telah berhasil melaksanakan pengembangan jabatan fungsional sebanyak **464 orang**. Berdasarkan capaian tersebut, sehingga capaian kegiatan pengembangan jabatan fungsional jika dibandingkan dengan target renstra dan target DIPA adalah 92,80%. Detail capaian disajikan pada **Tabel 4.19**.

Tabel 4.19 Detail Capaian Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional

NO	KEGIATAN/JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH (ORANG)
PENILAIAN ANGKA KREDIT		**220**
1	Widyaiswara	11
2	Teknik Pengairan	29
3	Teknik Jalan dan Jembatan	138
4	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	3
5	Teknik Penyehatan Lingkungan	7
6	Pembina Jasa Konstruksi	32

PENYUSUNAN DUPAK		
1	Widyaiswara	10
2	Teknik Pengairan	5
3	Teknik Jalan dan Jembatan	43
4	Pembina Jasa Konstruksi	14
PENGANGKATAN PERTAMA		**68**
PENGANGKATAN PERPINDAHAN JABATAN		
1	Auditor	1
2	Peneliti	8
3	Perekayasa	1
4	Teknik Jalan dan Jembatan	1
PENGANGKATAN PERTAMA		
5	Arsiparis	2
6	Litkayasa	1
7	Peneliti	5
8	Perawat Gigi	1
9	Perencana	1
10	Teknik Jalan dan Jembatan	18
11	Teknik Pengairan	6
12	Teknik Penyehatan Lingkungan	2
13	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	16
14	Widyaiswara	5
PENGANGKATAN INPASSING (UJI PORTOFOLIO)		**104**
1	Teknik Pengairan	20
2	Teknik Jalan dan Jembatan	32
3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	29
4	Teknik Penyehatan Lingkungan	11
5	Pembina Jasa Konstruksi	12
TOTAL		**464**

Sumber: Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, 2019



4.2 Perbandingan Kinerja Badan Pengembangan SDM

Capaian program pengembangan SDM tahun 2019 adalah sebesar **87,37%**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yaitu 68,79% maka pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar **18,58%**. Tabel 4.20 merupakan perbandingan capaian program tahun 2015-2019.

Tabel 4.20 Perbandingan Capaian Sasaran Program Pengembangan SDM

PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA		PERBANDINGAN (TARGET & CAPAIAN)	2015	2016	2017	2018	2019
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR							
MENINGKATNYA SDM PUPR YANG KOMPETEN							
1	Persentase Peningkatan SDM PUPR yang Kompeten	Target (%)	10%	25%	40%	55%	75%
		Capaian (%)	18%	30,04%	43,33%	68,79%	87,37%
		Target (orang)	2.149	5.372	15.634	21.657	32.503
		Capaian (orang)	3.780	6.456	16.935	27.087	37.867
		Baseline (orang)	21.488	39.084		39.377	43.338

Capaian program pengembangan SDM tahun 2019 yang melebihi dari target, disebabkan dengan adanya beberapa inovasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan SDM. Beberapa inovasi yang telah dilakukan:



a. Badan Pengembangan SDM telah melaksanakan pelatihan yang lebih berorientasi *outcome*, melalui penajaman program-program pelatihan yang diselenggarakan selama tahun 2019. Pelatihan telah disesuaikan dengan kebutuhan strategis unit organisasi, sesuai dengan perkembangan IPTEK terkini dan telah disertai dengan pelaksanaan sertifikasi profesi atau keahlian yang diakui secara nasional.
b. Pengembangan metode pelatihan dengan pemanfaatan teknologi yaitu pengembangan *e-learning* dan *blanded learning*.
c. Pengembangan kurikulum dan modul secara cepat, yang dilakukan dengan memanfaatkan modul, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang telah disusun dan digunakan oleh unit organisasi di Kementerian PUPR.
d. Pemanfaatan *guest lecture* pada beberapa pelatihan.
e. BPSDM bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menerbitkan sertifikat pelatihan elektronik dengan tandatangan elektronik Kepala BPSDM untuk semua pelatihan yang diselenggarakan BPSDM sebagai bentuk inovasi dalam menghadapi industri 4.0. Melalui sertifikat elektronik dijamin otentikasi data, terintegrasi, keutuhan data dan nir penyangkalan.
f. Badan Pengembangan SDM dalam melakukan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPSDM.
g. Badan Pengembangan SDM telah melakukan pengembangan aplikasi SIMANTU.
h. Pengembangan evaluasi dengan model enam level.
i. Menyusun katalog pelatihan.

Inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan, lebih mengoptimalkan capaian dalam mewujudkan SDM PUPR yang kompeten, sebagai sasaran dari program pengembangan SDM.

Kinerja program pengembangan SDM bidang PUPR yang tidak terlepas dari kinerja kegiatan yang dicapai oleh seluruh unit kerja di BPSDM, tentunya perlu diuraikan juga perbandingngan capaian dari setiap kegiatan tersebut. Berikut adalah uraian perbandingan capaian kegiatan BPSDM dengan target DIPA dan target Renstra 2015 - 2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR No. 18/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019:

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan SDM beserta Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX. Kegiatan ini meliputi 3 (tiga) *output* kegiatan sebagai berikut:

1. **Layanan Dukungan Manajemen Eselon I** telah terealisasi sebanyak 1 layanan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (3 layanan) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 3 layanan.

2. **Layanan Internal (*Overhead*)** telah terealisasi sebanyak 10 layanan dengan rincian 1 layanan realisasi dari unit kerja Sekretariat Badan dan 9 layanan dari unit kerja Balai Diklat PUPR Wilayah I sampai dengan Balai Diklat PUPR Wilayah IX (9 Balai). Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (30 layanan) berhasil mencapai 100,00% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 30 layanan.

3. **Layanan Perkantoran** telah terealisasi sebanyak 1 layanan atau 12 bulan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (12 bulan) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 12 bulan.



b. Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, beserta Balai Penilaian Kompetensi. Kegiatan ini meliputi 6 (enam) *output* kegiatan sebagai berikut:

1. **Dokumen Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR** telah terealisasi sebanyak 11 dokumen. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 122,22%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 (40 dokumen) dalam Renstra berhasil mencapai 127,50% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 51 dokumen.

2. **Pengelolaan Kinerja ASN PUPR** telah terealisasi sebanyak 20.034 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 87,10%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (83.366 orang) berhasil mencapai 96,44% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 80.400 orang.

3. **Penilaian Kompetensi ASN PUPR** telah terealisasi sebanyak 3.748 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 57,48%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (25.092 orang) berhasil mencapai 150,30% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 37.714 orang.



4. **Pemetaan Karir ASN PUPR** telah terealisasi sebanyak 2.131 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 142,07%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (10.285 orang) berhasil mencapai 81,83% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 8.416 orang.

5. **Layanan Internal (*Overhead*)** telah terealisasi sebanyak 1 layanan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100 %. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (3 layanan) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 3 layanan.

6. **Layanan Perkantoran** telah terealisasi sebanyak 1 layanan atau 12 bulan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (12 bulan) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 12 bulan.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat SDA dan Konstruksi, Balai Uji Coba Sistem Diklat Sumber Daya Air dan Konstruksi, beserta Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX. Kegiatan ini meliputi 5 (lima) *output* kegiatan sebagai berikut:

1. **ASN yang terlatih** telah terealisasi sebanyak 3.357 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 99,91%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (8.328 orang) berhasil mencapai 101,40% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 8.445 orang ASN yang telah mengikuti pelatihan bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi.

2. **Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan** telah terealisasi sebanyak 23 dokumen. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (115 dokumen) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 115 dokumen.



3. **ASN yang terdidik** telah terealisasi sebanyak 187 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 157,14%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (1.896 orang) berhasil mencapai 103,59% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 1.964 orang ASN yang telah mengikuti pendidikan bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi.

4. **Layanan Internal (*Overhead*)** telah terealisasi sebanyak 2 layanan dengan rincian 1 layanan realisasi dari unit kerja Pusdiklat SDA dan Konstruksi dan 1 layanan dari unit kerja Balai Uji Coba Sistem Diklat Sumber Daya Air dan Konstruksi. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (6 layanan) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 6 layanan.

5. **Layanan Perkantoran** telah terealisasi sebanyak 1 layanan atau 12 bulan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (12 bulan) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 12 bulan.



d. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman, beserta Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX. Kegiatan ini meliputi 5 (lima) *output* kegiatan sebagai berikut:

1. **ASN yang terlatih** telah terealisasi sebanyak 2.587 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 87,10%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (6.650 orang) berhasil mencapai 94,69% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 6.297 orang ASN yang telah mengikuti pelatihan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

2. **Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan** telah terealisasi sebanyak 22 dokumen. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 84,62%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 (149 dokumen) dalam Renstra berhasil mencapai 96,64% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 144 dokumen.



3. **ASN yang terdidik** telah terealisasi sebanyak 124 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 118,10%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (1.389 orang) berhasil mencapai 78,19% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 1.086 orang ASN yang telah mengikuti pendidikan bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

4. **Layanan Internal (*Overhead*)** telah terealisasi sebanyak 3 layanan dengan rincian 1 layanan realisasi dari unit kerja Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 1 layanan dari unit kerja Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan 1 layanan dari unit kerja Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (9 layanan) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 9 layanan.

5. **Layanan Perkantoran** telah terealisasi sebanyak 1 layanan atau 12 bulan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 (12 bulan) dalam Renstra berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 12 bulan.

e. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, beserta Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX. Kegiatan ini meliputi 6 (enam) *output* kegiatan sebagai berikut:

1. **ASN yang terlatih** telah terealisasi sebanyak 5.429 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100,30%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 (13.176 orang) dalam Renstra berhasil mencapai 111,83% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 14.735 orang ASN yang telah mengikuti pelatihan bidang Manajemen dan Fungsional.

2. **Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Kediklatan** telah terealisasi sebanyak 3 dokumen. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 (18 dokumen) dalam Renstra berhasil mencapai 105,56% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 19 dokumen.



3. **Pengembangan jabatan fungsional** telah terealisasi sebanyak 464 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 92,80%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (1.881 orang) berhasil mencapai 98,09% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 1.845 orang.

4. **ASN yang terdidik** telah terealisasi sebanyak 50 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (447 orang) berhasil mencapai 100,00% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 447 orang ASN yang telah mengikuti pendidikan bidang Manajemen dan Fungsional.

5. **Layanan Internal (*Overhead*)** telah terealisasi sebanyak 12 layanan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (12 layanan) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 9 layanan.

6. **Layanan Perkantoran** telah terealisasi sebanyak 1 layanan atau 12 bulan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (12 bulan) berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 12 bulan.

f. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Politeknik Bidang Pekerjaan Umum. Kegiatan ini meliputi 5 (lima) *output* kegiatan sebagai berikut:

1. **Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum** telah terealisasi sebanyak 137 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 91,33%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra (150 orang) berhasil mencapai 91,33% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 137 orang.

2. **Penelitian dan Pengabdian Masyarakat** belum terealisasi.

3. **Layanan Sarana dan Prasarana Internal** telah terealisasi sebanyak 1 layanan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 1 layanan.

4. **Layanan Dukungan Manajemen Satker** telah terealisasi sebanyak 1 layanan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 1 layanan.

5. **Layanan Perkantoran** telah terealisasi sebanyak 1 layanan atau 12 bulan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 100% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2019 yaitu 1 layanan.

Tabel 4.21 Perbandingan Capaian Kegiatan Badan Pengembangan SDM Terhadap Target DIPA Tahun 2019 dan Target Lima Tahunan (Renstra 2015-2019)

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	PERBANDINGAN SATU TAHUN (2019)					
			TARGET TAHUN 2019		CAPAIAN	KINERJA BERDASARKAN RENSTRA (5)/ (3)X100%	KINERJA BERDASARKAN DIPA (5)/(4) X100%	
			PERUBAHAN KEDUA RENSTRA	DIPA (REVISI)				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR								
SASARAN PROGAM: MENINGKATNYA SDM PUPR YANG KOMPETEN		%	75	75	87,37	116,49	116,49	
KEGIATAN 1. PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONEV SERTA SIM								
SASARAN KEGIATAN 1. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINYA								
1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		Layanan	1	1	1	100,00%	100,00%	
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	100,00%	100,00%	
2	ASN yang Terdidik	Orang	-	-	-	-	-	
3	ASN yang Terlatih	Orang	-	-	-	-	-	
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	10	1	10	100,00%	100,00%	
5	Layanan Perkantoran	Bulan	12	1	12	100,00%	100,00%	
KEGIATAN 2. PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA								
SASARAN KEGIATAN 2. PENINGKATAN KUALITAS PENILAIAN KOMPETENSI, PENGELOLAAN KINERJA SERTA PEMETAAN KARIR								
1. Jumlah orang yang dinilai Kompetensinya		Orang	7.000	6.520	3.748	53,54%	57,48%	
2. Jumlah orang yang dievaluasi Kinerjanya		Orang	23.000	23.000	20.034	87,10%	87,10%	
3. Jumlah orang direncanakan karirnya		Orang	4.000	1.500	2.131	53,28%	142,07%	
1	Dokumen Kebijakan Teknis/ NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR	Dokumen	0	9	11	-	122,22%	
2	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	Orang	23.000	23.000	20.034	87,10%	87,10%	
3	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	Orang	7.000	6.520	3.748	53,54%	57,48%	
4	Pemetaan Karir ASN PUPR	Orang	4.000	1.500	2.131	53,28%	142,07%	
5	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	1	1	1	100,00%	100,00%	
6	Layanan Perkantoran	Bulan	12	1	12	100,00%	100,00%	

	PERBANDINGAN 5 (LIMA) TAHUN 2015-2019							
	TOTAL TARGET PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2015 - 2019	CAPAIAN						PERSENTASE (14)/(8)X100%
		2015	2016	2017	2018	2019	2015 S/D 2019	
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	75	18	30,04	43,33	68,79	87,37	87,37	116,49
	104	50	51	1	1	1	104	100,00%
	3	-	-	1	1	1	3	100,00%
	894	894	-	-	-	-	894	100,00%
	29.619	11.180	10.112	8.327	-	-	29.619	100,00%
	30	-	-	10	10	10	30	100,00%
	12	12	12	12	12	12	12	100,00%
	25.092	5.159	10.715	9.459	8.633	3.748	37.714	150,30%
	83.366	0	17.053	21.286	22.027	20.034	80.400	96,44%
	10.285	-	0	0	6.285	2.131	8.416	81,83%
	40	22	18	-	-	11	115	127,50%
	83.366	0	17.053	21.286	22.027	20.034	80.400	96,44%
	25.092	5.159	10.715	9.459	8.633	3.748	37.714	150,30%
	10.285	-	0	0	6.285	2.131	8.416	81,83%
	3	-	-	1	1	1	3	100,00%
	12	12	12	12	12	12	12	100,00%

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	PERBANDINGAN SATU TAHUN (2019)					
			TARGET TAHUN 2019		CAPAIAN	KINERJA BERDASARKAN RENSTRA (5)/ (3)X100%	KINERJA BERDASARKAN DIPA (5)/(4) X100%	
			PERUBAHAN KEDUA RENSTRA	DIPA (REVISI)				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR								
SASARAN PROGAM: MENINGKATNYA SDM PUPR YANG KOMPETEN		%	75	75	87,37	116,49	116,49	
KEGIATAN 3. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI								
SASARAN KEGIATAN 3. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI								
1. Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.359	3.479	3.544	105,51%	101,87%	
1	ASN yang Terlatih	Orang	3.240	3.360	3.357	103,61%	99,91%	
2	Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	23	23	23	100,00%	100,00%	
3	ASN yang Terdidik	Orang	119	119	187	157,14%	157,14%	
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	2	1	2	100,00%	100,00%	
5	Layanan Perkantoran	Bulan	12	1	12	100,00%	100,00%	
KEGIATAN 4. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH								
SASARAN KEGIATAN 4. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH								
1. Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.309	3.075	2.711	81,93%	88,16%	
1	ASN yang Terlatih	Orang	2.940	2.970	2.587	87,99%	87,10%	
2	Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	27	26	22	81,48%	84,62%	
3	ASN yang Terdidik	Orang	369	105	124	33,60%	118,10%	
4	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	3	1	3	100,00%	100,00%	
5	Layanan Perkantoran	Bulan	12	1	12	100,00%	100,00%	

	PERBANDINGAN 5 (LIMA) TAHUN 2015-2019							
	TOTAL TARGET PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2015 - 2019	CAPAIAN						PERSENTASE (14)/(8)X100%
		2015	2016	2017	2018	2019	2015 S/D 2019	
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	75	18	30,04	43,33	68,79	87,37	87,37	116,49
	10.240	477	465	730	5.193	3.544	10.409	101,65%
	8.328	22	0	263	4.803	3.357	8.445	101,40%
	115	12	24	38	18	23	115	100,00%
	1.896	455	465	467	390	187	1.964	103,59%
	6	-	-	2	2	2	6	100,00%
	12	12	12	12	12	12	12	100,00%
	8.039	502	298	866	3.064	2.711	7.441	92,56%
	6.650	316	0	550	2.844	2.587	6.297	94,69%
	149	17	26	48	31	22	144	96,64%
	1.389	186	298	316	220	124	1.144	82,36%
	9	-	-	3	3	3	9	100,00%
	12	12	12	12	12	12	12	100,00%

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/*OUTPUT*	SATUAN	PERBANDINGAN SATU TAHUN (2019)					
			TARGET TAHUN 2019		CAPAIAN	KINERJA BERDASARKAN RENSTRA (5)/ (3)X100%	KINERJA BERDASARKAN DIPA (5)/(4) X100%	
			PERUBAHAN KEDUA RENSTRA	DIPA (REVISI)				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
PROGRAM PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR								
SASARAN PROGAM: MENINGKATNYA SDM PUPR YANG KOMPETEN		%	75	75	87,37	116,49	116,49	
KEGIATAN 5. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL								
SASARAN KEGIATAN 5. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL								
1. Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya		Orang	3.920	5.463	5.479	139,77%	100,29%	
1	ASN yang Terlatih	Orang	3.870	5.413	5.429	140,28%	100,30%	
2	Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan	Dokumen	2	3	3	150,00%	100,00%	
3	Pengembangan Jabatan Fungsional	Orang	500	500	464	92,80%	92,80%	
4	ASN yang Terdidik	Orang	50	50	50	100,00%	100,00%	
5	Layanan Internal (*Overhead*)	Layanan	12	1	12	100,00%	100,00%	
6	Layanan Perkantoran	Bulan	12	1	12	100,00%	100,00%	
KEGIATAN 6. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK BIDANG PEKERJAAN UMUM								
SASARAN KEGIATAN 6. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM BIDANG TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG, TEKNOLOGI KONSTRUKSI BANGUNAN AIR, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN								
1	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	Orang	150	150	137	91,33%	91,33%	
2	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian	0	0	0	-	-	
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	100,00%	100,00%	
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	100,00%	100,00%	
5	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100,00%	100,00%	

	PERBANDINGAN 5 (LIMA) TAHUN 2015-2019							
	TOTAL TARGET PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2015 - 2019	CAPAIAN						PERSENTASE (14)/(8)X100%
		2015	2016	2017	2018	2019	2015 S/D 2019	
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	75	18	30,04	43,33	68,79	87,37	87,37	116,49
	13.623	3.179	1.339	537	4.648	5.479	15.182	111,44%
	13.176	3.071	1.213	448	4.574	5.429	14.735	111,83%
	18	2	6	5	3	3	19	105,56%
	1.881	376	198	420	387	464	1.845	98,09%
	447	108	126	89	74	50	447	100%
	12	-	-	12	12	12	12	100,00%
	12	12	12	12	12	12	12	100,00%
	150	0	0	0	0	137	137	91,33%
	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	0	0	0	0	1	1	100,00%
	1	0	0	0	0	1	1	100,00%
	1	0	0	0	0	1	1	100,00%

Tabel 4.22 Perbandingan Capaian *Output* Utama Badan Pengembangan SDM Terhadap Target DIPA Tahun 2019 dan Target Lima Tahunan (Renstra 2015-2019)

NO	*OUTPUT* KEGIATAN	PERBANDINGAN SATU TAHUN (2019)					
		TARGET PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2015 - 2019	TARGET DIPA (REVISI)	CAPAIAN	KINERJA BERDASARKAN RENSTRA (%)	KINERJA BERDASARKAN DIPA (%)	
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100,00%	100,00%	
2	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	7.000 orang	6.520 orang	3.748 orang	57,48%	57,48%	
3	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	23.000 orang	23.000 orang	20.034 orang	87,10%	87,10%	
4	Pemetaan Karir ASN PUPR	4.000 orang	1.500 orang	2.131 orang	53,28%	142,07%	
5	ASN yang Terlatih	10.050 orang	11.783 orang	11.373 orang	113,16%	96,85%	
6	ASN yang Terdidik	538 orang	274 orang	361 orang	67,10%	131,75%	
7	Politeknik Pekerjaan Umum	150 orang	150 orang	137 orang	91,33%	91,33%	



	PERBANDINGAN 5 (LIMA) TAHUN 2015-2019							
	TARGET PERUBAHAN KEDUA RENSTRA 2015 - 2019	CAPAIAN						PERSENTASE (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2015 S/D 2019	
	104	50	51	1	1	1	104	100,00%
	40.966	5.159	10.715	9.459	8.633	3.748	37.714	92,06%
	83.366	0	17.053	21.286	22.027	20.034	80.400	96,44%
	10.285	-	0	0	6.285	2.131	8.416	81,83%
	57.773	14.589	11.325	9.588	12.221	11.373	59.096	102,29%
	4.626	1.643	889	872	684	361	4.449	96,17%
	150	-	-	-	-	137	137	91,33%



4.3 Realisasi Anggaran



Badan Pengembangan SDM pada tahun 2019 mendapat amanah pagu anggaran sebesar Rp456.489.248.000 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Pagu tersebut dialokasikan kepada 18 unit kerja di Badan Pengembangan SDM untuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM dengan kegiatan utama adalah penilaian kompetensi, pemantauan kinerja, pemetaan karir, pendidikan, pelatihan, pengembangan jabatan fungsional dan pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum.

Pada akhir tahun 2019, realisasi anggaran Badan Pengembangan SDM sebesar Rp424.332.192.000,- atau 92,96% dari pagu (Data e-Monitoring, 7 Januari 2020), sedangkan realisasi anggaran pada setiap unit kerja disajikan pada Tabel 4.23 dan realiasi anggaran untuk kegiatan utama disajikan pada Tabel 4.23. Realisasi anggaran rata-rata unit kerja di Badan Pengembangan SDM adalah sebesar 93.28%, dengan realiasi anggaran tertinggi dicapai oleh Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman yaitu sebesar 100%, hal ini dikarenakan terjadi likuidasi unit kerja tersebut pada bulan oktober 2019. Sedangkan realiasai anggaran terendah terjadi pada Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja dengan capaian sebesar 79,89%. Selama pelaksanaan anggaran yang diamanahkan kepada Badan Pengembangan SDM, seluruh unit kerja telah melakukan berbagai upaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi internal sehingga dapat mencapai realiasi anggaran yang cukup optimal. Pada tahap perencanaan, dilakukan penajaman untuk beberapa kegiatan strategis sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target dan lebih efektif. Monitoring dan evaluasi internal dilakukan juga secara periodik dan berjenjang dari tingkat unit kerja Balai, Pusat sampai tingkat unit organisasi Badan Pengembangan SDM.



Realiasasi anggaran pada beberapa kegiatan yang masih belum optimal terjadi dengan kendala waktu pelaksanaan yang perlu menyesuaikan dengan target peserta. Selain hal tersebut, adanya perubahan kebijakan bahwa pelaksanaan kegiatan harus benar-benar berorientasi *outcome* sehingga BPSDM melakukan evaluasi kembali kegiatan yang tidak berdampak pada peningkatan kompetensi SDM.

Badan Pengembangan SDM dengan realiasasi anggaran 92,96%, telah berhasil mencapai peningkatan SDM PUPR yang kompeten sebanyak 37.867 orang atau 87,37% dari baseline 43.338 orang SDM PUPR, yang jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu 75% maka kinerja capaian adalah sebesar 116,50%.



Tabel 4.23 Realisasi Anggaran Unit Kerja di Badan Pengembangan SDM

NO	UNIT KERJA	PAGU (RP RIBU)	REALISASASI		SISA PAGU (RP RIBU)
			(RP RIBU)	%	
1	Sekretariat BPSDM	39.963.515	35.841.559	89,69	3.942.216
2	Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	20.360.906	16.267.170	79,89	4.093.736
3	Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi	38.718.428	37.707.861	97,39	1.010.567
4	Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	37.644.824	35.977.132	95,45	1.618.015
5	Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	35.561.591	33.943.576	95,46	1.614.483
6	Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan	23.969.050	22.404.656	93,47	1.564.394
7	Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang	15.567.712	14.728.715	94,61	838.997
8	Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta	28.601.859	26.140.506	91,39	2.461.353
9	Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung	41.537.494	38.062.702	91,63	3.474.792
10	Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta	18.914.177	19.234.177	96,82	620.244
11	Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya	25.307.396	22.271,360	88	3.036.036
12	Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin	15.465.511	15.094.937	97,6	370.574
13	Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makasar	17.654.271	16.038.540	90,85	1.615.731
14	Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura	15.941.498	13.732.683	86,14	2.208.815
15	Balai Uji Coba Sistem Diklat Sumber Daya Air dan Konstruksi	9.757.558	9.722.372	99,64	35.186
16	Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	13.483.684	13.034.275	96,67	449.409
17	Balai Penilaian Kompetensi	23.722.354	21.133.087	89,09	2.589.267
18	• Politeknik Pekerjaan Umum	23.842.444	23.462.558	98,41	379.886
	• Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman (Likuidasi)	9.854.732	9.854.333	100	399
TOTAL		**456.489.248**	**424.332.192**	**92,96**	**32.157.056**

Sumber: e-Monitoring PUPR status 7 Januari 2020

Tabel 4.24 Realisasi Anggaran Berdasarkan *Output* Utama Kegiatan Pengembangan SDM

NO	*OUTPUT* KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	KINERJA ANGGARAN (%)
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	19.386.445	16.435.277	84,78%
2	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	6.520 orang	3.748 orang	17.806.208	15.614.403	87,69%
3	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	23.000 orang	20.034 orang	2.172.000	2.051.740	94,46%
4	Pemetaan Karir ASN PUPR	1.500 orang	2.131 orang	585.000	251.599	43,01%
5	ASN yang Terlatih	11.873 orang	11.373 orang	108.134.442	97.551.886	90,21%
6	ASN yang Terdidik	274 orang	361 orang	16.782.306	16.656.659	99,25%
7	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	150 orang	137 orang	1.371.558	1.344.628	98,04%



Tabel 4.25 Realisasi Anggaran per Kegiatan di Badan Pengembangan SDM

NO	PROGRAM/KEGIATAN/*OUTPUT*	TARGET	
1	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**		
1	**Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM**		
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 Layanan	
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Layanan	
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	
4	Layanan Perkantoran	12 Layanan	
2	**Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja**		
4	Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR	9 Dokumen	
5	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	23.000 Orang	
6	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	6.520 Orang	
7	Pemetaan Karir ASN PUPR	1.500 Orang	
8	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Layanan	
9	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	
10	Layanan Perkantoran	12 Layanan	
3	**Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi**		
11	Layanan Pendidikan	119 Orang	
12	Layanan Pelatihan	3.360 Orang	
13	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	23 Dokumen	
14	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Layanan	
15	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	
16	Layanan Perkantoran	12 Layanan	
4	**Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah**		
17	Layanan Pendidikan	105 Orang	
18	Layanan Pelatihan	2.970 Orang	
19	Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	26 Dokumen	
20	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Layanan	
21	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	
22	Layanan Perkantoran	12 Layanan	

	PAGU (RP RIBU)	REALISASI (RP RIBU)	KEUANGAN		FISIK		KINERJA
			RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
	456.489.248	**424.332.192**	**100**	**92,96**	**100**	**98,79**	**98,79**
	138.198.719	**128.375.414**	**100**	**92,89**	**100**	**98,35**	**98,35**
	19.386.445	16.435.277	100	84,78	100	89,52	89,52
	18.923.020	17.948.240	100	94,85	100	100	100
	16.929.384	15.001.401	100	88,61	100	99,98	99,98
	82.959.870	78.990.495	100	95,22	100	99,73	99,73
	44.083.260	**37.525.865**	**100**	**85,12**	**100**	**100**	**100**
	6.904.000	4.874.598	100	70,61	100	87,67	87,67
	2.172.000	2.051.740	100	94,46	100	95,92	95,92
	17.806.208	15.614.403	100	87,69	100	100	100
	585.000	251.599	100	43,01	100	85	85
	1.443.224	1.393.641	100	96,56	100	100	100
	3.583.173	2.313.214	100	64,56	100	92,85	92,85
	11.589.655	10.901.063	100	94,06	100	96,92	96,92
	73.410.229	**69.172.178**	**100**	**94,23**	**100**	**99,77**	**99,77**
	7.409.625	7.293.226	100	98,43	100	100	100
	24.934.243	21.741.945	100	87,2	100	99,4	99,4
	12.168.083	11.834.024	100	97,25	100	100	100
	2.985.301	2.959.665	100	99,14	100	100	100
	10.565.069	10.122.249	100	95,81	100	99,78	99,78
	15.347.908	15.221.070	100	99,17	100	100	100
	82.428.554	**77.484.273**	**100**	**94**	**100**	**98,88**	**98,88**
	6.149.883	6.143.716	100	99,9	100	100	100
	21.445.314	18.618.533	100	86,82	100	100	100
	14.547.407	14.267.964	100	98,08	100	100	100
	6.267.158	5.297.666	100	84,53	100	85,21	85,21
	8.613.499	8.193.267	100	95,12	100	100	100
	25.405.293	24.963.127	100	98,26	100	100	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/*OUTPUT*	TARGET	
1	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**		
5	**Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional**		
23	Layanan Pendidikan	50 Orang	
24	Layanan Pelatihan	5.413 Orang	
25	Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	3 Dokumen	
26	Layanan Pengembangan Jabatan Fungsional	500 Orang	
27	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12 Layanan	
28	Layanan Dukungan Manajemen Satker	12 Layanan	
29	Layanan Perkantoran	12 Layanan	
6	**Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Bidang Pekerjaan Umum**		
30	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	150 Orang	
31	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	
32	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	
33	Layanan Perkantoran	1 Layanan	
TOTAL			

Sumber: e-Monitoring PUPR status 7 Januari 2020

	PAGU (RP RIBU)	REALISASI (RP RIBU)	KEUANGAN		FISIK		KINERJA
			RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	
	45.6489.248	**425.378.664**	**100**	**93,18**	**100**	**99,73**	**99,73**
	94.526.042	88.437.511	100	93,56	100	99,86	99,86
	3.222.798	3.219.717	100	99,9	100	100	100
	61.754.885	57.191.408	100	92,61	100	99,79	99,79
	1.701.961	1.554.290	100	91,32	100	100	100
	4.222.314	3.998.372	100	94,7	100	100	100
	1.462.735	1.425.500	100	97,45	100	100	100
	5.484.123	5.155.482	100	94,01	100	100	100
	16.677.226	15.892.741	100	95,3	100	100	100
	23.842.444	**23.462.558**	**100**	**98,41**	**100**	**98,44**	**98,44**
	1.371.558	1.344.628	100	98,04	100	98,19	98,19
	18.278.400	18.271.516	100	99,96	100	100	100
	998.212	926.224	100	92,79	100	92,79	92,79
	3.194.274	2.920.191	100	91,42	100	91,42	91,42
	456 489.248	**424.332.192**	**100**	**82,93**	**100**	**98,79**	**98,79**

Penutup



Laporan Kinerja 2019
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



V

BAB LIMA



Penyelenggaraan program pengembangan SDM selama tahun 2019, dengan capaian sebesar 87,37% yang telah melebihi target, tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi saat pelaksanaan. Kebutuhan revisi anggaran untuk rangkaian Pelatihan Dasar CPNS (Bela negara, OJT), Politeknik Pekerjaan Umum dan kekurangan tunjangan kinerja. Kondisi SDM PUPR yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan besarnya kebutuhan kompetensi SDM PUPR dalam pelaksanaan pembangunan serta perlunya percepatan pelaksanaan pengembangan SDM PUPR, membutuhkan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan Badan Pengembangan SDM. Program pengembangan SDM tahun 2019 telah diselenggarakan dengan menyesuaikan kebutuhan strategis unit organisasi khususnya dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2019. Program pengembangan SDM juga telah dirancang untuk menjadi bagian dari solusi mengatasi permasalahan teknis di lapangan serta pemenuhan gap kompetensi SDM PUPR.

Tahun 2019, kegiatan Badan Pengembangan SDM lebih difokuskan pada peningkatan kompetensi sehingga capaian dalam mewujudkan SDM PUPR yang kompeten dapat melebihi target. Namun demikian, sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan SDM harus dilaksanakan berdasarkan kompetensi dan kinerja, oleh karena itu kompetensi dan kinerja semestinya lebih banyak dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengembangan SDM. Penilaian kompetensi dan pemantauan kinerja yang merupakan kegiatan utama pengembangan SDM dengan *output* profil kompetensi serta profil kinerja SDM PUPR, saat ini masih lebih banyak dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengembangan karir SDM, belum secara optimal sebagai input atau dasar dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi. Kegiatan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan untuk mewujudkan SDM PUPR yang kompeten, agar lebih optimal tentunya memerlukan data profil kompetensi dan profil kinerja yang akurat dan terkini sesuai kondisi SDM saat ini.

Hal lain yang juga masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pengembangan SDM adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM. Walaupun beberapa teknologi informasi telah dikembangkan oleh Badan Pengembangan SDM selama tahun 2019, tetapi penggunaannya masih belum optimal. Dalam hal kondisi SDM di Badan Pengembangan SDM juga masih memerlukan peningkatan agar lebih berkualitas.



Lampiran



Laporan Kinerja 2019
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Lampiran I

- Perjanjian Kinerja Eselon I
- Perjanjian Kinerja Eselon II
- Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis

Lampiran II

Dokumen
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk
BPSDM Tahun Anggaran 2019

Lampiran III

Pengukuran Kinerja

Lampiran IV

Pengakuan Pihak Ke-Tiga kepada BPSDM

Lampiran V

Matriks Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung
Pelaksanaan Pelatihan

Lampiran VI

Daftar Perguruan Tinggi Mitra Beserta Program Studi

Lampiran VII

Dokumentasi Sarana dan Prasarana
di Lingkungan BPSDM

Lampiran VIII

Dokumentasi Pelaksana Pelatihan di BPSDM

Lampiran IX

Dokumen Rincian Peserta Pelatihan

Lampiran X

Lembar Kesepakatan Capaian Program
Pengembangan SDM Tahun 2019

Lampiran I

Perjanjian Kinerja Eselon I
Perjanjian Kinerja Eselon II
Perjanjian Kinerja Unit Pelaksana Teknis

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
M. BASUKI HADIMULJONO	LOLLY MARTINA MARTIEF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Meningkatnya sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten	1 Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten	75%

Program :
1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran
Rp. 398.969.199.000

JAKARTA, JANUARI 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
M. BASUKI HADIMULJONO	LOLLY MARTINA MARTIEF

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Pihak Pertama

LOLLY MARTINA MARTIEF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Meningkatnya sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten	1 Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten	75%

Program :
1 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran Awal Rp. 398.969.199.000 **Anggaran Revisi** Rp. 456.489.248.000

JAKARTA, DESEMBER 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LOLLY MARTINA MARTIEF

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **K.M. ARSYAD**
Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

K.M. ARSYAD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program	: Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Kegiatan	: Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev, serta SIM		
Sasaran Kegiatan	: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		
Indikator Kinerja Kegiatan	: Prosentase Peningkatan Mutu Pelayanan Teknis dan Administrasi		
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan
2	Layanan Internal (Sarana dan Prasarana Internal)	Jumlah Layanan Internal (Sarana dan Prasarana Internal)	1 layanan
3	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan

Kegiatan — **Anggaran**

1. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev, serta SIM — Rp. 34.276.994.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

K.M. ARSYAD

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : K.M. Arsyad
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

K.M. ARSYAD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program	: Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Kegiatan	: Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev, serta SIM			
Sasaran Kegiatan	: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
Indikator Kinerja Kegiatan	: Prosentase Peningkatan Mutu Pelayanan Teknis dan Administrasi			
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan	1 layanan
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan	1 layanan
3	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan

Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev, serta SIM	**Anggaran Awal:** Rp. 34.276.994.000	**Anggaran Akhir:** Rp. 39.963.515.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

K.M. ARSYAD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **SITI BELLAFOLIJANI ADIMIHARDJA**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

SITI BELLAFOLIJANI ADIMIHARDJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	Jumlah orang yang dinilai kompetensinya	6.520 orang
		Jumlah orang yang evaluasi kinerjanya	23.000 orang
		Jumlah orang yang direncanakan karirnya	1.500 orang
1	Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR	1 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi ASN PUPR	5
		2 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis/NSPK Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	2
		3 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis/NSPK Pemetaan Karir ASN PUPR	2
2	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	Jumlah ASN PUPR yang dinilai kinerja dan perilakunya	23.000 orang
3	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	Jumlah ASN PUPR yang dinilai kompetensinya	6.520 orang
4	Pemetaan Karir ASN PUPR	Jumlah ASN PUPR yang dipetakan karirnya	1.500 orang
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 layanan
7	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Anggaran

1. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja : 19.755.723.000
2. Balai Penilaian Kompetensi : 19.582.521.000

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LOLLY MARTINA MARTIEF

Jakarta, Januari 2019
KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA

SITI BELLAFOLIJANI ADIMIHARDJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **DODI KRISPRATMADI**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua
LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama
DODI KRISPRATMADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	Jumlah orang yang dinilai kompetensinya	6.520 orang
		Jumlah orang yang evaluasi kinerjanya	23.000 orang
		Jumlah orang yang direncanakan karirnya	1.500 orang
1	Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR	1 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi ASN PUPR	5
		2 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis/NSPK Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	2
		3 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis/NSPK Pemetaan Karir ASN PUPR	2
2	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	Jumlah ASN PUPR yang dinilai kinerja dan perilakunya	23.000 orang
3	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	Jumlah ASN PUPR yang dinilai kompetensinya	6.520 orang
4	Pemetaan Karir ASN PUPR	Jumlah ASN PUPR yang dipetakan karirnya	1.500 orang
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 layanan
7	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	1. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja : 20.360.906.000
	2. Balai Penilaian Kompetensi : 17.806.208.000

Jakarta, Desember 2019

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LOLLY MARTINA MARTIEF

KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA
DODI KRISPRATMADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **YUDHA MEDIAWAN**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

YUDHA MEDIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	**Sasaran Kegiatan:** Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah SDM PUPR Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi yang ditingkatkan kompetensinya	3.359 Orang
	OUTPUT:		
1	ASN yang Terlatih	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	3.240 Orang
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	7 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	9 Dokumen
		3. Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	7 Dokumen
3	ASN yang Terdidik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	119 Orang
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan
		2. Luas Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran (12 Bulan)	1 Layanan

Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

Anggaran
- Satker Pusdiklat SDAK : Rp 36.892.992.000,-
- Pelatihan Balai Diklat PUPR Wilayah I – IX : Rp 25.497.012.000,-
- Kurikulum dan Modul Kediklatan Uji Coba : Rp. 4.819.459.000,-

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

YUDHA MEDIAWAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **HERMAN SUROYO**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

HERMAN SUROYO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
I	**Sasaran Kegiatan:** Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah SDM PUPR Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi yang ditingkatkan kompetensinya	3.359 Orang	3.479 Orang
	OUTPUT:			
1	ASN yang Terlatih	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	3.240 Orang	3.360 Orang
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	7 Dokumen	7 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	9 Dokumen	9 Dokumen
		3. Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	7 Dokumen	7 Dokumen
3	ASN yang Terdidik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	119 Orang	119 Orang
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		2. Luas Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan		
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran (12 Bulan)	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran	Anggaran Awal :	Anggaran Revisi :
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	- Satker Pusdiklat SDAK	Rp 36.892.992.000	Rp 38.718.428.000
	- Pelatihan Balai Diklat PUPR Wilayah I – IX	Rp 25.497.012.000	Rp 24.934.243.000
	- Kurikulum dan Modul Kediklatan Uji Coba	Rp. 4.819.459.000	Rp. 4.225.010.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

HERMAN SUROYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **THOMAS SETIABUDI ADEN**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

THOMAS SETIABUDI ADEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	**Sasaran Kegiatan:** Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah SDM PUPR Bidang Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan kompetensinya	3.045 Orang
	OUTPUT:		
1	ASN yang Terlatih	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	2.940 Orang
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan 3. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan yang Diujicobakan	4 Dokumen 7 Dokumen 16 Dokumen
3	ASN yang Terdidik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	105 Orang
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 4. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Layanan
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran (12 Bulan)	1 Layanan

Kegiatan
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Anggaran
- Satker : Rp 34.459.824.000,-
- Pelatihan Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX : Rp 53.026.263.000,-
- Kurikulum dan Modul Kediklatan yang Diujicobakan Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan dan PIW : Rp 7.200.000.000,-
- Kurikulum dan Modul Kediklatan yang Diujicobakan Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan Permukiman : Rp 7.159.060.000,-

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

THOMAS SETIABUDI ADEN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **THOMAS SETIABUDI ADEN**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

THOMAS SETIABUDI ADEN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	**Sasaran Kegiatan:** Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan kompetensinya	3.045 Orang	3.075 Orang
	OUTPUT:			
1	ASN yang Terlatih	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	2.940 Orang	2.970 Orang
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	4 Dokumen	4 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	7 Dokumen	7 Dokumen
		3. Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Kediklatan	16 Dokumen	15 Dokumen
3	ASN yang Terdidik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	105 Orang	105 Orang
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan	1 Layanan
		2. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran		
		3. Luas Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan		
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran (12 Bulan)	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	- Satker Pusdiklat JPPPIW :	Rp 34.459.824.000,-	Rp 37.644.824.000,-
	- Pelatihan Balai Diklat PUPR Wilayah I - IX :	Rp 53.026.263.000,-	Rp 21.445.314.000,-
	- Kurikulum dan Modul Kediklatan Uji Coba :	Rp 14.359.060.000,-	Rp. 8.572.041.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

THOMAS SETIABUDI ADEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **NICODEMUS DAUD**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

NICODEMUS DAUD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	**Sasaran Kegiatan:** Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan kompetensinya	3.920 Orang
	OUTPUT:		
1	ASN yang Terlatih	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	3.870 Orang
2	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	3 Dokumen
3	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional yang di evaluasi penugasannya, pembinaannya dan pengembangannya	500 Orang
4	ASN yang Terdidik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	50 Orang
5	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 4. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 Layanan
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan
7	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran (12 Bulan)	1 Layanan

Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

Anggaran
- Satker : Rp 31.223.102.000,-
- Pelatihan Balai Diklat PUPR Wilayah I-IX : Rp 34.644.851.000,-

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

NICODEMUS DAUD

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOEH. ADAM**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

MOEH. ADAM

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan kompetensi SDM Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya.	3.920 Orang	5.223 Orang
	Output:			
1.	ASN yang Terlatih	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	3.870 Orang	5.173 Orang
2.	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	1. Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan 2. Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	3 Dokumen	3 Dokumen
3.	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional yang dievaluasi penugasannya, pembinaannya dan pengembangannya	500 Orang	500 Orang
4.	ASN yang Terdidik	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	50 Orang	50 Orang
5.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 2. Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana	1 Layanan	1 Layanan
6.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan	1 Layanan
7.	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan:
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

		Anggaran Awal:	Anggaran Revisi:
Satuan Kerja	:	Rp. 31.223.102.000,-	Rp. 35.561.591.000,-
Pelatihan Balai Diklat PUPR Wil. I-IX	:	Rp. 34.644.851.000,-	Rp. 57.964.451.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

Lolly Martina Martief

Pihak Pertama

Moeh. Adam

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH I MEDAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **R. BELANTO HADIWIDO**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH I MEDAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

R. BELANTO HADIWIDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH I MEDAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang Terlatih	360 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang Terlatih	510 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang Terlatih	420 Orang

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	13.739.204.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	2.939.400.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	4.335.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	3.548.005.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

R. BELANTO HADIWIDO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH I MEDAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **R. BELANTO HADIWIDO**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH I MEDAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

R. BELANTO HADIWIDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH I MEDAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN Yang Terlatih	360 Orang	400 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN Yang Terlatih	510 Orang	510 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN Yang Terlatih	420 Orang	220 Orang

Kegiatan :

	Anggaran Awal:	Anggaran Revisi:
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Rp. 13.739.204.000	Rp. 14.107.555.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp. 2.939.400.000	Rp. 3.559.509.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp. 4.335.000.000	Rp. 4.023.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp. 3.548.005.000	Rp. 2.278.986.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

R. BELANTO HADIWIDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH II PALEMBANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TEUKU FAISAL RIZA**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH II PALEMBANG**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

TEUKU FAISAL RIZA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH II PALEMBANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang Terlatih	330 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang Terlatih	360 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang Terlatih	300 Orang

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	8.523.635.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	2.898.877.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2.676.625.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	1.703.223.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

TEUKU FAISAL RIZA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II PALEMBANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Faisal Riza
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II Palembang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

TEUKU FAISAL RIZA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH II PALEMBANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang Terlatih	330 Orang	330 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang Terlatih	360 Orang	360 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang Terlatih	300 Orang	210 Orang

Kegiatan :	Anggaran Awal:	Anggaran Revisi:
1. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Rp. 8.523.635.000	Rp. 9.060.312.000
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp. 2.898.877.000	Rp. 2.697.877.000
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp. 2.676.625.000	Rp. 2.568.625.000
4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp. 1.703.223.000	Rp. 1.240.898.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

TEUKU FAISAL RIZA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **S. BAMBANG WIDYARTA**
Jabatan : **Plt. KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III JAKARTA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

S. BAMBANG WIDYARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH III JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan perkantoran	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Layanan Pelatihan	390 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Layanan Pelatihan	330 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Layanan Pelatihan	480 Orang

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	10.530.668.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	2.458.720.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan PIW	2.805.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	5.045.281.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

S. BAMBANG WIDYARTA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yunaldi
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

YUNALDI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang Terlatih	390 Orang	390 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang Terlatih	330 Orang	330 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang Terlatih	480 Orang	1.520 Orang

Kegiatan :	Anggaran Awal:	Anggaran Revisi :
1 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Rp. 10.530.668.000	Rp. 10.867.668.000
2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp. 2.458.720.000	Rp. 2.315.309.000
3 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan PIW	Rp. 2.805.000.000	Rp. 2.324.000.000
4 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp. 5.045.281.000	Rp. 13.094.882.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

YUNALDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IV BANDUNG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **MOEH. ADAM**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IV BANDUNG**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

MOEH. ADAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IV BANDUNG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang Terlatih	330 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang Terlatih	150 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang Terlatih	390 Orang

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	12.991.322.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	2.327.740.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1.275.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	6.551.299.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

MOEH. ADAM

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IV BANDUNG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KENETERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasto Agoeng Sapoetro
Jabatan : Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

HASTO AGOENG SAPOETRO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IV BANDUNG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Akhir
1.	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang terlatih	330 Orang	330 Orang
3	Pnyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang terlatih	150 Orang	150 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang terlatih	390 Orang	1.423 Orang

Kegiatan :

		Anggaran Awal:	Anggaran Akhir:
1.	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Rp. 12.991.322.000	Rp. 12.991.322.000
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp. 2.327.740.000	Rp. 1.941.740.000
3.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp. 1.275.000.000	Rp. 982.000.000
4.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp. 6.551.299.000	Rp. 25.622.432.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

HASTO AGOENG SAPOETRO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **HERMAN SUROYO**

Jabatan : **KEPALA BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
LOLLY MARTINA MARTIEF	HERMAN SUROYO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang Terlatih	420 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang Terlatih	240 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang Terlatih	450 Orang

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	10.901.492.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	3.007.746.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	1.233.714.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	3.306.018.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
LOLLY MARTINA MARTIEF	HERMAN SUROYO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V YOGYAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anwar
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

ANWAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V YOGYAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN Yang Terlatih	420 Orang	420 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN Yang Terlatih	240 Orang	270 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN Yang Terlatih	450 Orang	500 Orang

Kegiatan :		Anggaran Awal:	Anggaran Revisi:
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Rp. 10.901.429.000	Rp. 11.470.264.000
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp. 3.007.746.000	Rp. 2.548.254.000
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp. 1.233.714.000	Rp. 1.217.657.000
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp. 3.306.018.000	Rp. 4.298.246.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

ANWAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VI SURABAYA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **AHMAD KHOLIDI NASUTION**
Jabatan : **KEPALA BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

AHMAD KHOLIDI NASUTION

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VI SURABAYA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang Terlatih	510 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang Terlatih	390 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang Terlatih	480 Orang

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	12.104.682.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	3.830.810.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	3.238.652.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	4.316.540.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

AHMAD KHOLIDI NASUTION

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VI SURABAYA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **AHMAD KHOLIDI NASUTION**
Jabatan : **KEPALA BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

AHMAD KHOLIDI NASUTION

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VI SURABAYA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang Terlatih	510 Orang	550 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang Terlatih	390 Orang	390 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang Terlatih	480 Orang	480 Orang

Kegiatan :	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Rp. 12.104.682.000	Rp. 13.201.751.000
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp. 3.830.810.000	Rp. 4.036.886.000
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp. 3.238.652.000	Rp. 2.862.601.000
4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp. 4.316.540.000	Rp. 5.206.158.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

AHMAD KHOLIDI NASUTION

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VII BANJARMASIN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **SUADI**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VII BANJARMASIN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

SUADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VII BANJARMASIN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang Terlatih	330 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN yang Terlatih	300 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang Terlatih	360 Orang

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	9.483.961.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	2.648.550.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2.550.000.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	2.552.438.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

SUADI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VII BANJARMASIN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUADI**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VII BANJARMASIN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

SUADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VII BANJARMASIN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN Yang Terlatih	330 Orang	330 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN Yang Terlatih	300 Orang	300 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN Yang Terlatih	360 Orang	210 Orang

Kegiatan :		Anggaran Awal:	Anggaran Revisi:
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian,	Rp. 9.483.961.000	Rp. 9.483.961.000
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp. 2.648.550.000	Rp. 2.317.136.000
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp. 2.550.000.000	Rp. 2.227.210.000
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp. 2.552.438.000	Rp. 1.437.204.000

Jakarta, November 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

SUADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **DADANG KARMEN**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

DADANG KARMEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN Terlatih	360 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN Terlatih	330 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN Terlatih	480 Orang

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	9.026.548.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	3.345.019.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	2.616.334.000
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	3.787.961.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

DADANG KARMEN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **NUGROHO WURITOMO**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

NUGROHO WURITOMO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH VIII MAKASSAR
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN Yang Terlatih	360 Orang	400 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN Yang Terlatih	330 Orang	330 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN Yang Terlatih	480 Orang	370 Orang

Kegiatan :		Anggaran Awal:	Anggaran Revisi:
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Rp. 9.026.548.000	Rp. 9.026.548.000
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp. 3.345.019.000	Rp. 3.477.382.000
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp. 2.616.334.000	Rp. 2.435.221.000
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp. 3.787.961.000	Rp. 2.715.120.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

NUGROHO WURITOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IX JAYAPURA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **WELLY WIHARDI**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IX JAYAPURA**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

WELLY WIHARDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH IX JAYAPURA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev Serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN yang terlatih	210 Orang
3.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan I	ASN yang terlatih	330 Orang
4.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN yang terlatih	270 Orang

Kegiatan :		Anggaran:
1.	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Rp 7,618,577,000
2.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp 2,040,150,000
3.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp 2,805,000,000
4.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp 3,834,086,000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

WELLY WIHARDI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH XI JAYAPURA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Welly Wihardi
Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah XI Jayapura

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Lolly Martina Martief
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

WELLY WIHARDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH XI JAYAPURA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1	Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	ASN Yang Terlatih	210 Orang	210 Orang
3	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	ASN Yang Terlatih	330 Orang	330 Orang
4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	ASN Yang Terlatih	270 Orang	240 Orang

Kegiatan :	Anggaran Awal:	Anggaran Revisi:
1 Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM	Rp. 7.618.577.000	Rp. 8.025.823.000
2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	Rp. 2.040.150.000	Rp. 2.040.150.000
3 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp. 2.805.000.000	Rp. 2.805.000.000
4 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Rp. 3.834.086.000	Rp. 3.070.525.000

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

WELLY WIHARDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini

Nama : **NUGROHO WURITOMO**
Jabatan : **KEPALA BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **YUDHA MEDIAWAN**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Januari 2019

Pihak Kedua

YUDHA MEDIAWAN

Pihak Pertama

NUGROHO WURITOMO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAU UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	7 Dokumen
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana	1 Layanan
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional satuan Kerja	1 Layanan
4	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

Anggaran :
Rp. 10.308.458.000

Bandung, Januari 2019

Pihak Kedua

YUDHA MEDIAWAN

Pihak Pertama

NUGROHO WUIRITOMO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini

Nama : **DADANG KARMEN**
Jabatan : **KEPALA BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERMAN SUROYO**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, September 2019

Pihak Kedua

HERMAN SUROYO

Pihak Pertama

DADANG KARMEN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAU UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan	Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	7 Dokumen
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana	1 Layanan
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Operasional satuan Kerja	1 Layanan
4	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan :
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

Anggaran :
Rp. 9.757.558.000

Bandung, September 2019

Pihak Kedua

HERMAN SUROYO

Pihak Pertama

DADANG KARMEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SISKA MARABINTANG**
Jabatan : **KEPALA BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **THOMAS SETIABUDI ADEN**
Jabatan : **KEPALA PUSDIKLAT JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Januari 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
THOMAS SETIABUDI ADEN	SISKA MARABINTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah			
1.	Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	8 Dokumen
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	1 Layanan
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan
4	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Anggaran :

Rp 14,337,121,000

Bandung, Januari 2019

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
THOMAS SETIABUDI ADEN	SISKA MARABINTANG

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SISKA MARABINTANG**
Jabatan : **KEPALA BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **THOMAS SETIABUDI ADEN**
Jabatan : **KEPALA PUSDIKLAT JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Desember 2019

Pihak Kedua

THOMAS SETIABUDI ADEN

Pihak Pertama

SISKA MARABINTANG

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah			
1.	Pola Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	8 Dokumen
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	1 Layanan
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan
4	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan :

	Anggaran Awal:	Anggaran Revisi:
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp 14,337,121,000	Rp 13,483,684,000

Bandung, Desember 2019

PIHAK KEDUA

(THOMAS SETIABUDI ADEN)

PIHAK PERTAMA

(SISKA MARABINTANG)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHADI**
Jabatan : **KEPALA BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **THOMAS SETIABUDI ADEN**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Januari 2019

Pihak Kedua

THOMAS SETIABUDI ADEN

Pihak Pertama

MUHADI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Layanan Pendidikan	10 Orang
		Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan	8 Dokumen
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Anggaran
15.153.817.000

Bandung, Januari 2019

Pihak Kedua

Thomas Setiabudi Aden

Pihak Pertama

Muhadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENILAIAN KOMPETENSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LINA ANGGRAINI**
Jabatan : **KEPALA BALAI PENILAIAN KOMPETENSI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **S. BELLAFOLIJANI ADIMIHARDJA**
Jabatan : **KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua
S. BELLAFOLIJANI ADIMIHARDJA

Pihak Pertama
LINA ANGGRAINI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENILAIAN KOMPETENSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	6520 Orang
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan
Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Anggaran
23.963.954.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua
S. BELLAFOLIJANI ADIMIHARDJA

Pihak Pertama
LINA ANGGRAINI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENILAIAN KOMPETENSI - PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Anggraini
Jabatan : Kepala Balai Penilaian Kompetensi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dodi Krispratmadi
Jabatan : Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2019

Pihak Kedua

DODI KRISPRATMADI

Pihak Pertama

LINA ANGGRAINI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BALAI PENILAIAN KOMPETENSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	Sasaran Program/Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Kegiatan : Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja					
1.	Penilaian Kompetensi ASN PUPR	1	Jumlah ASN PUPR yang dinilai kompetensinya	6520 Orang	6520 Orang
2.	Peralatan dan Perlengkapan	1	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	64 Unit	64 Unit
3.	Layanan Internal (*Overhead*)	1	Jumlah Layanan Internal	1 Layanan	1 Layanan
4.	Layanan Perkantoran	1	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan

**)dalam ribuan*

Kegiatan :	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja	**Rp. 23.963.954.000**	**Rp. 23.722.354.000**

Jakarta, 17 Desember 2019

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

(DODI KRISPRATMADI)

Kepala Balai Penilaian Kompetensi

(LINA ANGGRAINI)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **INDRATMO SOEKARNO**
Jabatan : **DIREKTUR POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

INDRATMO SOEKARNO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	1. Pendidikan Teknik Konstruksi Bangunan Air	50 Orang
		2. Pendidikan Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan	50 Orang
		3. Pendidikan Konstruksi Bangunan Jembatan	50 Orang
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	**Anggaran Awal**
1. Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	: Rp 1.371.558.000,-
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	: Rp 678.400.000,-
3. Layanan Dukungan Manajemen Satker	: Rp 998.212.000,-
4. Layanan Perkantoran	: Rp 2.250.915.000,-

Jakarta, Oktober 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

INDRATMO SOEKARNO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **INDRATMO SOEKARNO**
Jabatan : **DIREKTUR POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **LOLLY MARTINA MARTIEF**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**
sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

INDRATMO SOEKARNO

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	1. Pendidikan Teknik Konstruksi Bangunan Air	50 Orang	50 Orang
		2. Pendidikan Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan	50 Orang	50 Orang
		3. Pendidikan Konstruksi Bangunan Jembatan	50 Orang	50 Orang
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan
6	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Kegiatan	**Anggaran Awal**	**Anggaran Revisi**
1. Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum	: Rp 1.371.558.000,-	Rp 1.371.558.000,-
2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	: Rp 678.400.000,-	Rp 18.278.400.000,-
3. Layanan Dukungan Manajemen Satker	: Rp 998.212.000,-	Rp. 998.212.000,-
4. Layanan Perkantoran	: Rp 2.250.915.000,-	Rp. 3.194.274.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua

LOLLY MARTINA MARTIEF

Pihak Pertama

INDRATMO SOEKARNO

Lampiran II

Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk
BPSDM Tahun Anggaran 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : SP DIPA-033.15-0/2019

DS:4056-1512-2209-1116

A. DASAR HUKUM :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	:	033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI	:	033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. PAGU	:	Rp.398.969.199.000
		(TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.
2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.
3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan.
5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.
6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI
NIP.196606111992021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4056-1512-2209-1116

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA	:	033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI	:	033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. PAGU	:	Rp.398.969.199.000
		(TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

(dalam ribuan rupiah)

1. PROGRAM	:	14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		398.969.199
2. SASARAN STRATEGIS	:	05	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		
3. FUNGSI	:	04	EKONOMI		398.969.199
SUB FUNGSI	:	0490	EKONOMI LAINNYA	398.969.199	

Jakarta, 10 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

Prof. DANTA KUSUMANTI
NIP. [illegible]06151957032001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019

DS:4056-1512-2209-1116

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
033.15.14	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			398.969.199
	SASARAN PROGRAM			
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten			
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			
	01 Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten	75%		
	OUTPUT PROGRAM			
01	Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten			398.969.199
	INDIKATOR OUTPUT PROGRAM			
	01 Persentase Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Kompeten	75%		
5596	KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM, PENGANGGARAN, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONEV SERTA SIM			129.197.020
	SASARAN KEGIATAN			
	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
	01 Prosentase peningkatan Mutu Pelayanan Teknis dan Administrasi	%		
	OUTPUT KEGIATAN			
5596.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1 Layanan	21.293.275
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan		
	OUTPUT KEGIATAN			
5596.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1 Layanan	17.923.020
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan		

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019

DS:4056-1512-2209-1116

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	OUTPUT KEGIATAN			
5596.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	16.929.384
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan		
	OUTPUT KEGIATAN			
5596.994	Layanan Perkantoran		1 Layanan	73.051.341
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan		
5597	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA			43.719.677
	SASARAN KEGIATAN			
	Peningkatan Kualitas Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja serta Pemetaan Karir			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
	01 Jumlah Orang yang dinilai Kompetensinya	7000Orang		
	02 Jumlah Orang yang dievaluasi Kinerjanya	23000Orang		
	03 Jumlah Orang yang direncanakan Karirnya	4000Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5597.004	Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi, Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir ASN PUPR		9 Dokumen	6.661.000
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Kebijakan Teknis/NSPK Penilaian Kompetensi ASN PUPR	5 Dokumen		
	02 Jumlah Kebijakan Teknis/NSPK Pengelolaan Kinerja ASN PUPR	2 Dokumen		
	03 Jumlah Kebijakan Teknis/NSPK Pemetaan Karir ASN PUPR	2 Dokumen		

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019

DS:4056-1512-2209-1116

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	OUTPUT KEGIATAN			
5597.005	Pengelolaan Kinerja ASN PUPR		23.000 Orang	2.350.000
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah ASN PUPR yang dinilai kinerja dan perilakunya	23.000 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5597.006	Penilaian Kompetensi ASN PUPR		6.520 Orang	19.582.521
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah ASN PUPR yang dinilai kompetensinya	6520 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5597.007	Pemetaan Karir ASN PUPR		1.500 Orang	650.000
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah ASN PUPR yang dipetakan karirnya	1500 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5597.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1 Layanan	1.443.224
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layananan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		
	OUTPUT KEGIATAN			
5597.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	3.065.684
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan		
	OUTPUT KEGIATAN			
5597.994	Layanan Perkantoran		1 Layanan	9.967.248
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan		

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019

DS:4056-1512-2209-1116

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
5598	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI			72.698.462
	SASARAN KEGIATAN			
	Peningkatan Kompetensi SDM PUPR Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
	01 Jumlah SDM PUPR Bidang SDA dan Konstruksi yang ditingkatkan Kompetensinya	3110 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5598.002	Layanan Pendidikan		119 Orang	7.520.490
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	119 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5598.003	Layanan Pelatihan		3.240 Orang	25.497.012
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	2840 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5598.004	Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan		23 Dokumen	12.732.532
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	2 Dokumen		
	02 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	10 Dokumen		
	03 Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	12 Dokumen		
	OUTPUT KEGIATAN			
5598.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1 Layanan	2.985.301
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan		

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4056-1512-2209-1116

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	OUTPUT KEGIATAN			
5598.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	10.764.756
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan		
	OUTPUT KEGIATAN			
5598.994	Layanan Perkantoran		1 Layanan	13.198.371
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan		
5599	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			87.486.087
	SASARAN KEGIATAN			
	Peningkatan Kompetensi SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembagan Infrastruktur Wilayah			
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
	01 Jumlah SDM PUPR Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditingkatkan Kompetensinya	3219 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5599.002	Layanan Pendidikan		115 Orang	6.100.000
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	369 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5599.003	Layanan Pelatihan		2.940 Orang	23.535.325
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	2850 Orang		

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019

DS:4056-1512-2209-1116

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	OUTPUT KEGIATAN			
5599.004	Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan		27 Dokumen	20.409.666
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	3 Dokumen		
	02 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	12 Dokumen		
	03 Jumlah Dokumen Uji Coba Kurikulum dan Modul Pelatihan	28 Dokumen		
	OUTPUT KEGIATAN			
5599.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1 Layanan	5.559.383
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	Layanan		
	02 Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi dan Prasaran	Layanan		
	03 Jumlah Layanan Internal	Layanan		
	OUTPUT KEGIATAN			
5599.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	9.611.740
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan		
	OUTPUT KEGIATAN			
5599.994	Layanan Perkantoran		1 Layanan	22.269.973
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan		
5600	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL			65.867.953
	SASARAN KEGIATAN			
	Peningkatan Kompetensi SDM PUPR Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional			

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4056-1512-2209-1116

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			
	01 Jumlah SDM PUPR Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional yang ditingkatkan Kompetensinya	1100 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5600.002	Layanan Pendidikan		50 Orang	3.097.795
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan (Dalan Negeri/Luar Negeri)	50 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5600.003	Layanan Pelatihan		3.870 Orang	37.490.285
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri)	3870 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5600.004	Pola, Teknik, Kurikulum dan Modul Pelatihan		3 Dokumen	1.771.961
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Dokumen Pola dan Teknik Kediklatan	0 Dokumen		
	02 Jumlah Dokumen Kurikulum dan Modul Kediklatan	3 Dokumen		
	OUTPUT KEGIATAN			
5600.005	Layanan Pengembangan Jabatan Fungsional		500 Orang	4.222.314
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Jabatan Fungsional yang di Evaluasi Penugasannya, Pembinaannya dan Pengembangannya	500 Orang		
	OUTPUT KEGIATAN			
5600.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1 Layanan	1.462.735
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	1 unit		

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019
I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

DS:4056-1512-2209-1116

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

(dalam ribuan rupiah)

KODE	PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR OUTPUT	TARGET / INDIKATOR	VOLUME / SATUAN	ALOKASI DANA
	02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	12 unit		
	03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	1 unit		
	04 Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	1 m2		
	05 Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	1 m2		
	OUTPUT KEGIATAN			
5600.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker		1 Layanan	5.070.823
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1 Layanan		
	OUTPUT KEGIATAN			
5600.994	Layanan Perkantoran		1 Layanan	12.752.037
	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			
	01 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan		

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 20 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

Prof. ANITA FIRMANTI
NIP. 196008061987032001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DS:4056-1512-2209-1116

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI : 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. PAGU : Rp.398.969.199.000
   (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	033.15.14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		57.069.547	312.843.079	29.256.573	0	398.969.199	10.889.194
	01	DKI JAKARTA		21.474.781	104.010.415	4.574.246	0	130.059.442	721.837
	400834	PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI DAN PEMANTAUAN KINERJA	KP	3.640.095	15.322.404	793.224	0	19.755.723	0
	A00	RM		3.640.095	15.322.404	793.224	0	19.755.723	0
		Target Pendapatan						2.772	
	400835	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN	KP	7.203.006	22.588.421	1.431.675	0	31.223.102	721.837
	A00	RM		7.203.006	22.588.421	1.431.675	0	31.223.102	721.837
		Target Pendapatan						2.772	
	400935	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH	KP	2.440.567	17.944.476	454.626	0	20.839.669	0
	A00	RM		2.440.567	17.590.556	454.626	0	20.485.749	0
	D00	PNBP		0	353.920	0	0	353.920	0
		Target Pendapatan						384.624	
	400939	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KP	6.853.311	26.178.962	1.244.721	0	34.276.994	0
	A00	RM		6.853.311	26.178.962	1.244.721	0	34.276.994	0
		Target Pendapatan						2.772	
	400947	BALAI PENILAIAN KOMPETENSI	KP	1.337.802	21.976.152	650.000	0	23.963.954	0
	A00	RM		1.337.802	21.976.152	650.000	0	23.963.954	0
	02	JAWA BARAT		15.656.335	92.426.506	11.060.915	0	119.143.756	5.485.432
	400836	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI	KP	3.787.590	30.863.593	2.241.809	0	36.892.992	1.111.432

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DS:4056-1512-2209-1116

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI : 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. PAGU : Rp.398.969.199.000
   (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
				51	52	53	57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	A00	RM		3.787.590	30.863.593	2.241.809	0	36.892.992	1.111.432
		Target Pendapatan						6.240	
	400837	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN	KP	3.876.619	25.741.210	4.841.995	0	34.459.824	2.210.000
	A00	RM		3.876.619	25.741.210	4.841.995	0	34.459.824	2.210.000
		Target Pendapatan						5.334	
	400930	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH	KP	3.649.735	16.374.643	3.120.983	0	23.145.361	2.164.000
	A00	RM		3.649.735	16.102.393	3.120.983	0	22.873.111	2.164.000
	D00	PNBP		0	272.250	0	0	272.250	0
		Target Pendapatan						300.000	
	400938	BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI	KP	2.002.651	7.562.315	743.492	0	10.308.458	0
	A00	RM		2.002.651	7.562.315	743.492	0	10.308.458	0
	400940	BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN DAN PENGEMBANGAN	KP	2.339.740	11.884.745	112.636	0	14.337.121	0
	A00	RM		2.339.740	11.883.835	112.636	0	14.336.211	0
	D00	PNBP		0	910	0	0	910	0
		Target Pendapatan						1.926	
	03	JAWA TENGAH		1.972.130	12.591.935	589.752	0	15.153.817	0
	400941	BALAI UJI COBA SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	KP	1.972.130	12.591.935	589.752	0	15.153.817	0
	A00	RM		1.972.130	12.497.275	589.752	0	15.059.157	0
	D00	PNBP		0	94.660	0	0	94.660	0

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DS:4056-1512-2209-1116

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI : 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. PAGU : Rp.398.969.199.000
(TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI 51	BARANG 52	MODAL 53	BANTUAN SOSIAL 57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
		Target Pendapatan						108.324	
	04	DI YOGYAKARTA		2.558.267	13.700.091	2.190.549	0	18.448.907	0
	400931	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH V	KP	2.558.267	13.700.091	2.190.549	0	18.448.907	0
	A00	RM		2.558.267	13.452.401	2.190.549	0	18.201.217	0
	D00	PNBP		0	247.690	0	0	247.690	0
		Target Pendapatan						277.653	
	05	JAWA TIMUR		3.432.144	18.366.813	1.691.727	0	23.490.684	0
	400932	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH	KP	3.432.144	18.366.813	1.691.727	0	23.490.684	0
	A00	RM		3.432.144	17.989.513	1.691.727	0	23.113.384	0
	D00	PNBP		0	377.300	0	0	377.300	0
		Target Pendapatan						387.472	
	07	SUMATERA UTARA		3.611.253	17.925.356	3.025.000	0	24.561.609	2.434.196
	400933	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I	KP	3.611.253	17.925.356	3.025.000	0	24.561.609	2.434.196
	A00	RM		3.611.253	17.675.356	3.025.000	0	24.311.609	2.434.196
	D00	PNBP		0	250.000	0	0	250.000	0
		Target Pendapatan						277.404	
	11	SUMATERA SELATAN		2.604.903	11.394.657	1.802.800	0	15.802.360	902.800
	400944	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II	KP	2.604.903	11.394.657	1.802.800	0	15.802.360	902.800
	A00	RM		2.604.903	11.394.657	1.802.800	0	15.802.360	902.800

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019
II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

DS:4056-1512-2209-1116

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI : 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. PAGU : Rp.398.969.199.000
   (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA	KP KD DK TP UB	JENIS BELANJA				PAGU/TARGET PENDAPATAN	TERCATAT
				PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL		
				51	52	53	57		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10
	15	KALIMANTAN SELATAN		1.491.179	13.840.770	1.903.000	0	17.234.949	1.344.929
	400945	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH	KP	1.491.179	13.840.770	1.903.000	0	17.234.949	1.344.929
	A00	RM		1.491.179	13.840.770	1.903.000	0	17.234.949	1.344.929
		Target Pendapatan						3.186	
	19	SULAWESI SELATAN		2.372.059	14.958.403	1.445.400	0	18.775.862	0
	400934	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH	KP	2.372.059	14.958.403	1.445.400	0	18.775.862	0
	A00	RM		2.372.059	14.645.883	1.445.400	0	18.463.342	0
	D00	PNBP		0	312.520	0	0	312.520	0
		Target Pendapatan						346.900	
	25	PAPUA		1.896.496	13.428.133	973.184	0	16.297.813	0
	400946	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH	KP	1.896.496	13.428.133	973.184	0	16.297.813	0
	A00	RM		1.896.496	13.428.133	973.184	0	16.297.813	0
		Target Pendapatan						89.625	
		TOTAL		57.069.547	312.643.079	29.256.573	0	398.969.199	10.889.194
		RM		57.069.547	310.733.829	29.256.573	0	397.059.949	10.889.194
		PNBP		0	1.909.250	0	0	1.909.250	0
		PENDAPATAN						2.197.004	

KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

Ir. SRI HARYANTI
NIP. 196206151987032001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2019
NOMOR : DIPA-033.15-0/2019
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4056-1512-2209-1116

A. IDENTITAS UNIT :

1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. UNIT ORGANISASI : 033.15 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. PAGU : Rp.398.969.199.000
   (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

B. RENCANA PER PROGRAM

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN PROGRAM	PAGU	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	033.15.14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia													
		RENCANA PENARIKAN DANA	398.969.199	5.949.895	11.384.080	17.449.253	23.105.990	26.378.735	29.639.421	44.140.324	41.760.844	46.939.443	43.978.723	49.681.161	58.561.330
2	033.15														
		PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	2.197.004	117.956	117.956	118.438	136.512	196.512	214.994	154.512	164.512	205.918	254.512	285.216	229.966
		TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA	398.969.199	5.949.895	11.384.080	17.449.253	23.105.990	26.378.735	29.639.421	44.140.324	41.760.844	46.939.443	43.978.723	49.681.161	58.561.330
		TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN	2.197.004	117.956	117.956	118.438	136.512	196.512	214.994	154.512	164.512	205.918	254.512	285.216	229.966

Jakarta, 05 Desember 2018
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ANNA FIRMANTI
NIP 196009151987032001

Lampiran III

Pengukuran Kinerja

Lampiran III Pengukuran Kinerja BPSDM Tahun 2019

a. Baseline Pengukuran Capaian 2019

Baseline untuk menghitung kinerja BPSDM adalah jumlah SDM PUPR Pusat (Pegawai di Kementerian PUPR) di tahun 2019, ditambahkan jumlah SDM dari Pemerintah Daerah yang mengikuti peningkatan kompetensi di BPSDM Kementerian PUPR tahun 2015-2019. Berikut penjabarannya:

KETERANGAN	JUMLAH
SDM PUPR Pusat Tahun 2019 (meliputi PNS 21.797 orang, CPNS 990 orang)	22.787 orang
SDM PUPR Daerah (yang mengikuti peningkatan kompetensi tahun 2015-2019)	20.551 orang
JUMLAH BASELINE TAHUN 2018	**43.338 ORANG**

b. Pengukuran Capaian Program 2019

1. Pengukuran capaian program pengembangan SDM dihitung berdasarkan 5 (lima) unsur, dengan rincian capaian tahun 2019 masing-masing sesuai tabel berikut:

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	SDM PUPR Pusat Lulus Pelatihan	7.768
2	SDM PUPR Daerah lulus pelatihan	1.052
3	SDM PUPR Lulus Pendidikan	179
4	SDM PUPR Pusat yang Kompeten dari Penilaian Kompetensi	1.781
TOTAL		**10.780**

2. Target tahun 2019 adalah kumulatif dari tahun 2015-2019, sehingga menghitung capaian adalah kumulatif capaian 2015-2019.
3. Capaian 2015-2018 = 27.087 orang SDM PUPR Kompeten.
4. Capaian 2019 berdasarkan perhitungan 4 (empat) unsur pada poin 1 (satu), diperoleh sebanyak 10.780 orang SDM PUPR Kompeten.
5. Berdasarkan perhitungan capaian kumulatif 2015-2019 (butir 3 dan butir 4) dan Baseline 2019, maka diperoleh capaian program BPSDM tahun 2019, yaitu:

$$\text{Capaian Program} = \frac{\text{Capaian Kumulatif 2015-2019}}{\text{Baseline 2019}} = \frac{37.867}{43.338} \times 100\% = \mathbf{87,37\%}$$

c. Pengukuran Kinerja Program Tahun 2019

Dari pengukuran butir b diperoleh capaian sebesar 87,37%, sedangkan tahun 2019 target sasaran program BPSDM yaitu 75%, maka kinerja BPSDM tahun 2019, sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Program Tahun 2018} = \frac{\text{Capaian Program 2019}}{\text{Target Program 2019}} = \frac{87,37\%}{75\%} = \mathbf{116,49\%}$$

Lampiran IV

Pengakuan Pihak Ke-Tiga Kepada BPSDM Tahun 2019

Lampiran IV
Pengakuan Pihak Ke-Tiga Kepada Badan Pengembangan SDM Tahun 2019

a. Keterbukaan Informasi Publik Pelaksana PPID Kementerian PUPR 2019

Pada tahun 2019 beberapa unit kerja di Badan Pengembangan SDM telah memperoleh Peringkat pada Keterbukaan Informasi Publik Pelaksana PPID Kementerian PUPR 2019, diantaranya:

1. Sekretariat Badan



2. Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan



3. Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta



4. Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung



5. Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA :

Pelaksana PPID Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

SEBAGAI

Peringkat IV

Kategori Daerah Tipe II

Keterbukaan Informasi Publik Pelaksana PPID Kementerian PUPR 2019

Jakarta, 3 Desember 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

6. Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA

Pelaksana PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VII Banjarmasin

SEBAGAI

Peringkat II

Kategori Daerah Tipe II

Keterbukaan Informasi Publik Pelaksana PPID Kementerian PUPR 2019

Jakarta, 3 Desember 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

b. Sertifikasi Akreditasi Program Diklat Kepemimpinan

Pada tahun 2019 beberapa unit kerja di Badan Pengembangan SDM telah memperoleh Akreditasi Program Diklat Kepemimpinan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), diantaranya:

1. Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan


LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat

Nomor : 916/K.1/PDP.09

diberikan kepada :

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I MEDAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori **Akreditasi A** untuk masa berlaku 5 (lima) tahun;

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 825/K.1/PDP.09/2019 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I Medan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Jakarta, 17 Oktober 2019

KEPALA,

ADI SURYANTO

2. Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta


LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat

Nomor : 918/K.1/PDP.09

diberikan kepada :

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III JAKARTA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan program Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori **Akreditasi A** untuk masa berlaku 5 (lima) tahun;

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 827/K.1/PDP.09/2019 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Jakarta, 17 Oktober 2019

KEPALA,

ADI SURYANTO

3. Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat

Nomor : 642/K.1/PDP.09

diberikan kepada :

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
WILAYAH IV BANDUNG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan program :
1. Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori **Akreditasi B** untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun; dan
2. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan kategori **Akreditasi B** untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun;

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 587/K.1/PDP.09/2019 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Jakarta, 18 Juli 2019
KEPALA,

ADI SURYANTO

4. Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat

Nomor : 919/K.1/PDP.09

diberikan kepada :

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
WILAYAH V YOGYAKARTA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan program :
1. Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori **Akreditasi A** untuk masa berlaku 5 (lima) tahun; dan
2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori **Akreditasi A** untuk masa berlaku 5 (lima) tahun;

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 828/K.1/PDP.09/2019 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah V Yogyakarta sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Jakarta, 17 Oktober 2019
KEPALA,

ADI SURYANTO

5. Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat

Nomor : 915/K.1/PDP.09

diberikan kepada :

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
WILAYAH VI SURABAYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan program :
1. Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori **Akreditasi B** untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun; dan
2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori **Akreditasi B** untuk masa berlaku 3 (tiga) tahun;

berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 824/K.1/PDP.09/2019 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah VI Surabaya sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.

Jakarta, 17 Oktober 2019
KEPALA,

ADI SURYANTO

6. Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Sertifikat

diberikan kepada :

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
WILAYAH VIII MAKASSAR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jakarta, 17 Oktober 2019
KEPALA,

ADI SURYANTO

c. Penganugerahan BKN Tahun 2019 Kategori Penilaian Kompetensi Terbaik Level Kementerian

Badan Pengembangan SDM menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupa Penilaian Kompetensi Terbaik Level Kementerian.



d. Penganugerahan KASN Tahun 2019

Badan Pengembangan SDM menerima penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Atas Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Negara Dengan Predikat Sangat Baik.



e. Tanginas Award dari KPPN Bandung II

Pada tahun 2019 beberapa unit kerja di Badan Pengembangan SDM telah memperoleh Tanginas Award dari KPPN Bandung II pada Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Soft Copy & Hard Copy) dan Rekonsiliasi Paling Awal, diantaranya:

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bidang SDA dan Konstruksi







2. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Bidang SDA dan Konstruksi







3. Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, PIW





e. Sertifikat ISO 9001:2015

Pada tahun 2019 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Jabatan Fungsional telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.



Lampiran V

Matriks Fasilitas Sarana dan
Prasarana Pendukung Pelaksanaan Pelatihan

Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

Ruang Rapat
-

Guest House
3 rumah dinas

Laboratorium
1 ruang

Ruang Kelas
9 ruang (@ 30 orang)

Aula
1 ruang (@ 100 orang)

Fasilitas Kesehatan
1 ruang

Asrama Peserta
66 kamar (@ 2 orang)

Ruang Makan
1 ruang (@ 100 orang)

Fasilitas Olahraga
1 ruang

Ruang Instruktur
-

Perpustakaan
1 ruang

Tempat Ibadah
1 ruang

Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang

Ruang Rapat
-

Guest House
-

Laboratorium
-

Ruang Kelas
1 ruang (@ 30 orang)

Aula
1 ruang (60 orang)

Fasilitas Kesehatan
-

Asrama Peserta
1 kamar (1 orang)
17 kamar (@ 2 orang)
5 kamar (@ 3 orang)

Ruang Makan
1 ruang (60 orang)
1 ruang (30 orang)

Fasilitas Olahraga
1 ruang

Ruang Instruktur
-

Perpustakaan
1 ruang (159 judul buku)

Tempat Ibadah
1 ruang (6 orang)

**) Semua ruangan ber-AC*

Sumber: Data Fasilitas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM, 2018

Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta

Ruang Rapat
1 ruang (10 orang)

Ruang Kelas
10 ruang (@30-40 orang, @25 orang, @50-60 orang)

Asrama Peserta
63 kamar (@ 2 orang)

Ruang Instruktur
2 ruang (@ 5 orang, @10 orang)

Guest House
8 kamar (@2 orang), 1 rumah dinas

Aula
2 ruang (@100-150 orang, @40-60 orang)

Ruang Makan
2 ruang (@40-60 orang, @80-100 orang)

Perpustakaan
1 ruang

Laboratorium
1 ruang (35 orang)

Fasilitas Kesehatan
1 ruang

Fasilitas Olahraga
1 ruang

Tempat Ibadah
2 ruang

Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung

Ruang Rapat
-

Ruang Kelas
5 ruang (@30 orang), 1 ruang (@40 orang)

Asrama Peserta
35 kamar (@3 orang), 2 kamar (@4 orang)

Ruang Instruktur
1 kamar (@ 1 orang), 4 kamar (@ 2 orang), 1 kamar (@ 3 orang)

Guest House
-

Aula
1 ruang (150 orang)

Ruang Makan
1 ruang (@130 orang) 1 ruang (@40 orang)

Perpustakaan
-

Laboratorium
1 ruang (multimedia 30 orang)

Fasilitas Kesehatan
-

Fasilitas Olahraga
1 ruang

Tempat Ibadah
1 ruang (150 orang)

**) Semua ruangan ber-AC*

Sumber: Data Fasilitas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM, 2018

Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta



Ruang Rapat

2 ruang (@20 orang, @40 orang)



Guest House

3 kamar (1-3 orang),
3 kamar (@1 orang),
7 kamar (1-2 orang)



Laboratorium

1 ruang



Ruang Kelas

3 ruang (@40 orang),
1 ruang (60 orang)
4 ruang (@30 orang)



Aula

1 ruang (150 orang)



Fasilitas Kesehatan

1 ruang



Asrama Peserta

21 kamar (@ 3 orang),
5 kamar (@ 1 orang),
28 kamar (2-3 orang)



Ruang Makan

2 ruang (@100 orang)



Fasilitas Olahraga

4 ruang/lokasi



Ruang Instruktur

1 ruang



Perpustakaan

1 ruang



Tempat Ibadah

1 ruang

Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya



Ruang Rapat

2 ruang (@40 orang, @ 10 orang)



Guest House

6 unit (@4-6 orang)



Laboratorium

1 ruang
(multimedia 30 orang)



Ruang Kelas

8 ruang (30-40 orang)



Aula

2 ruang (100-150 orang)



Fasilitas Kesehatan

1 ruang



Asrama Peserta

95 kamar (@2 orang)
3 kamar (@1 orang)



Ruang Makan

3 ruang (@100 orang, @30 orang, @5 orang)



Fasilitas Olahraga

2 ruang/lokasi



Ruang Instruktur

1 ruang



Perpustakaan

1 ruang



Tempat Ibadah

1 ruang (100 orang)

**) Semua ruangan ber-AC*

Sumber: Data Fasilitas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM, 2018

Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin

Ruang Rapat
-

Guest House
1 unit (6 orang)

Laboratorium
-

Ruang Kelas
2 ruang(@30-40 orang)

Aula
1 ruang (80 orang)

Fasilitas Kesehatan
-

Asrama Peserta
12 kamar (@2 orang)

Ruang Makan
1 ruang (@35 orang)

Fasilitas Olahraga
1 ruang

Ruang Instruktur
-

Perpustakaan
-

Tempat Ibadah
1 ruang (20 orang)

Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar

Ruang Rapat
-

Guest House
-

Laboratorium
-

Ruang Kelas
3 ruang (@50-60 orang)
2 ruang (@30 orang)

Aula
1 ruang (120 orang)

Fasilitas Kesehatan
1 ruang

Asrama Peserta
56 kamar (@2 orang)

Ruang Makan
2 ruang (@150 orang)

Fasilitas Olahraga
1 ruang

Ruang Instruktur
13 kamar

Perpustakaan
1 ruang

Tempat Ibadah
1 ruang (75 orang)

**) Semua ruangan ber-AC*

Sumber: Data Fasilitas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM, 2018

Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura

Ruang Rapat
-

Guest House
-

Laboratorium
-

Ruang Kelas
2 ruang (@30 orang)

Aula
1 ruang (100 orang)

Fasilitas Kesehatan
-

Asrama Peserta
14 kamar (@2 orang)

Ruang Makan
3 ruang

Fasilitas Olahraga
1 ruang

Ruang Instruktur
4 kamar

Perpustakaan
1 ruang

Tempat Ibadah
1 ruang(15 orang)

Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perkim dan PIW

Ruang Rapat
2 ruang (@34 orang, @10 orang)

Guest House
4 ruang (@15 orang)

Laboratorium
-

Ruang Kelas
1 ruang (@ 30 orang)

Aula
2 ruang (@50 orang)

Fasilitas Kesehatan
1 ruang (@5 orang)

Asrama Peserta
61 kamar (@1 orang, @2 orang, @3 orang)

Ruang Makan
2 ruang (@50 orang, @20 orang)

Fasilitas Olahraga
2 ruang (@15 orang, @4 orang)

Ruang Instruktur
2 ruang (@5 orang)

Perpustakaan
-

Tempat Ibadah
4 ruang(@50 orang, @50 orang, @10 orang, @10 orang)

**) Semua ruangan ber-AC*

Sumber: Data Fasilitas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM, 2018

BUC SDA dan Konstruksi

Ruang Rapat
1 ruang

Guest House
-

Laboratorium
-

Ruang Kelas
-

Aula
-

Fasilitas Kesehatan
-

Asrama Peserta
73 kamar (@2 orang)

Ruang Makan
2 ruang (@40 orang)

Fasilitas Olahraga
2 ruang/lokasi

Ruang Instruktur
3 kamar

Perpustakaan
1 ruang

Tempat Ibadah
1 ruang

Politeknik Pekerjaan Umum

Ruang Rapat
2 ruang (@30 orang)

Guest House
2 unit (@3 orang),
Rumah Dinas: 6 unit (@2 orang)

Laboratorium
6 ruang

Ruang Kelas
3 ruang (@50 orang),
6 ruang (@5 orang)

Aula
1 ruang (250 orang)

Fasilitas Kesehatan
-

Asrama Peserta
33 kamar (@2 orang)
44 kamar (@12 orang)

Ruang Makan
1 ruang (60 orang)

Fasilitas Olahraga
1 ruang & 1 lapangan gateball

Ruang Instruktur
1 ruang (10 orang)

Perpustakaan
1 ruang

Tempat Ibadah
1 ruang (30 orang)

**) Semua ruangan ber-AC*

Sumber: Data Fasilitas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM, 2018

Lampiran VI

Daftar Perguruan Tinggi Mitra Beserta Program Studi

1. UNSYIAH
(UNIVERSITAS SYIAH KUALA)

1. S2 Rekayasa Transportasi
2. S2 Sumber Daya Air

2. ITB
(INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG)

3. S2 Pengelolaan SDA
4. S2 Sistem Tk. Jalan Raya
5. S2 Studi Pembangunan
6. S2 Pengelolaan Infrastruktur Air & Sanitasi
7. S3 Teknik Sipil

3. UNAND
(UNIVERSITAS ANDALAS)

8. S2 Teknik Sipil

4. UNPAD
(UNIVERSITAS PADJAJARAN)

9. S2 Akuntansi

5. UNPAR
(UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN)

10. S2 Manajemen Proyek Konstruksi
11. S2 Hukum

6. UGM
(UNIVERSITAS GADJAH MADA)

12. S2 Teknik Pengelolaan Bencana Alam
13. S2 Sarana Prasarana & Teknologi Bahan
14. S2 Pengelolaan Air & Air Limbah
15. S2 Sistem Teknik Transportasi
16. S2 Teknik Geologi

7. UNDIP
(UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN)

17. S2 Manajemen Rekayasa Infrastruktur
18. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota
19. S2 Rekayasa Bendungan
20. S1 Teknik Sipil
21. D3 Teknik Sipil

8. ITS
(INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER)

22. S2 Manajemen Aset Infrastruktur
23. S2 Teknik Sanitasi Lingkungan
24. S2 Hidroinformatika
25. S2 Manajemen Teknologi

9. UNS
(UNIVERSITAS SEBELAS MARET)

26. S2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur

10. UNHAS
(UNIVERSITAS HASANUDDIN)

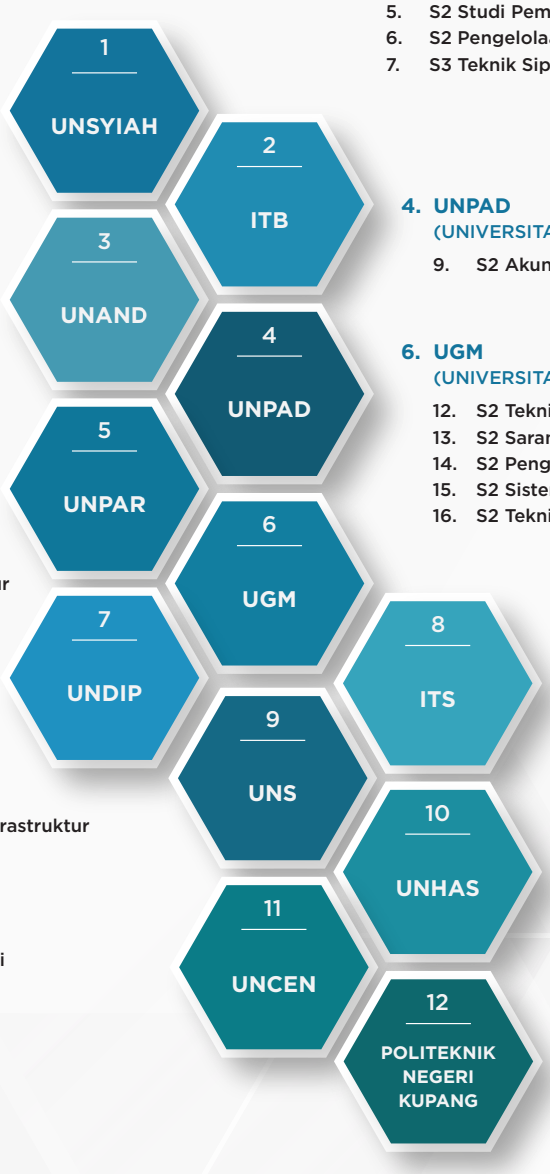
27. S2 Rekayasa Keselamatan Konstruksi

11. UNCEN
(UNIVERSITAS CENDERAWASIH)

28. D3 Teknik Sipil
29. S1 Teknik Sipil

12. POLITEKNIK NEGERI KUPANG

30. D3 Teknik Sipil



Lampiran VII

Dokumentasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan BPSDM

ASRAMA



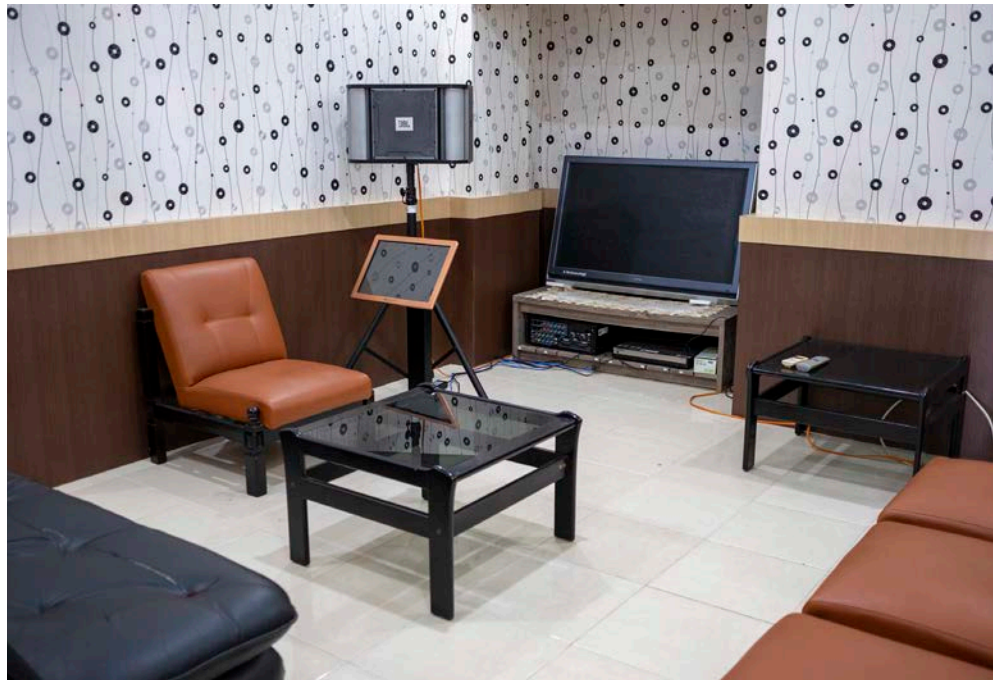


AULA





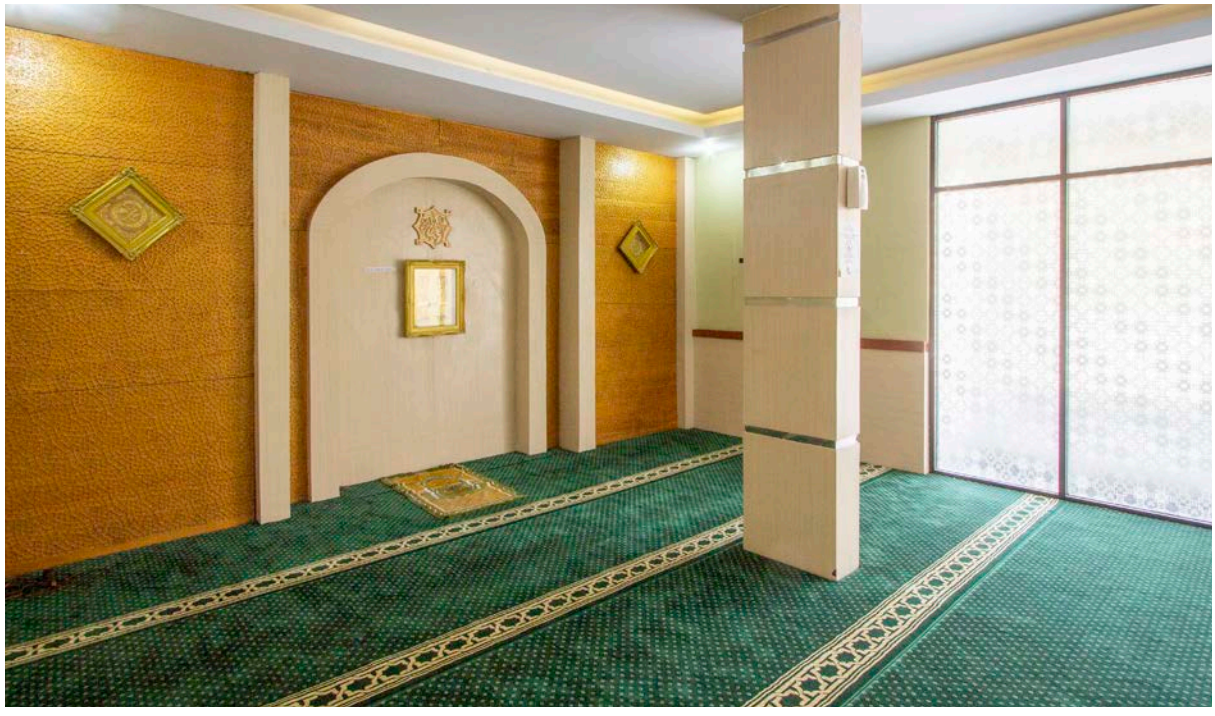
FASILITAS HIBURAN





FASILITAS IBADAH





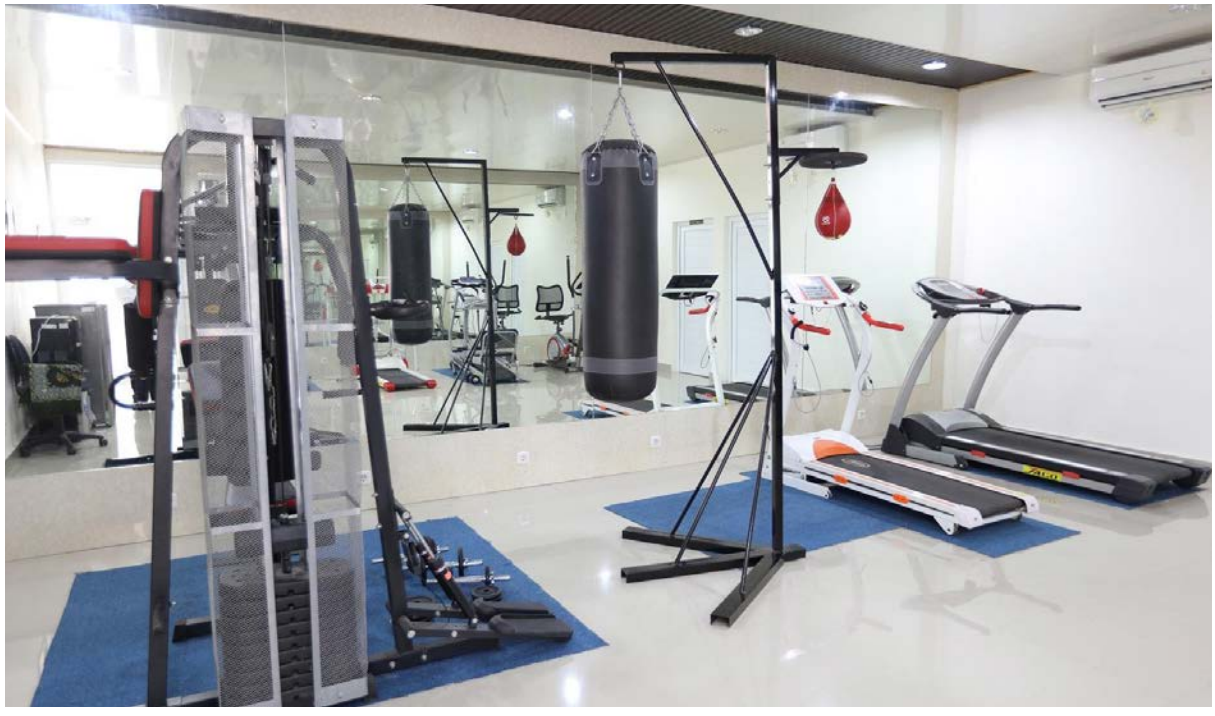
FASILITAS KESEHATAN



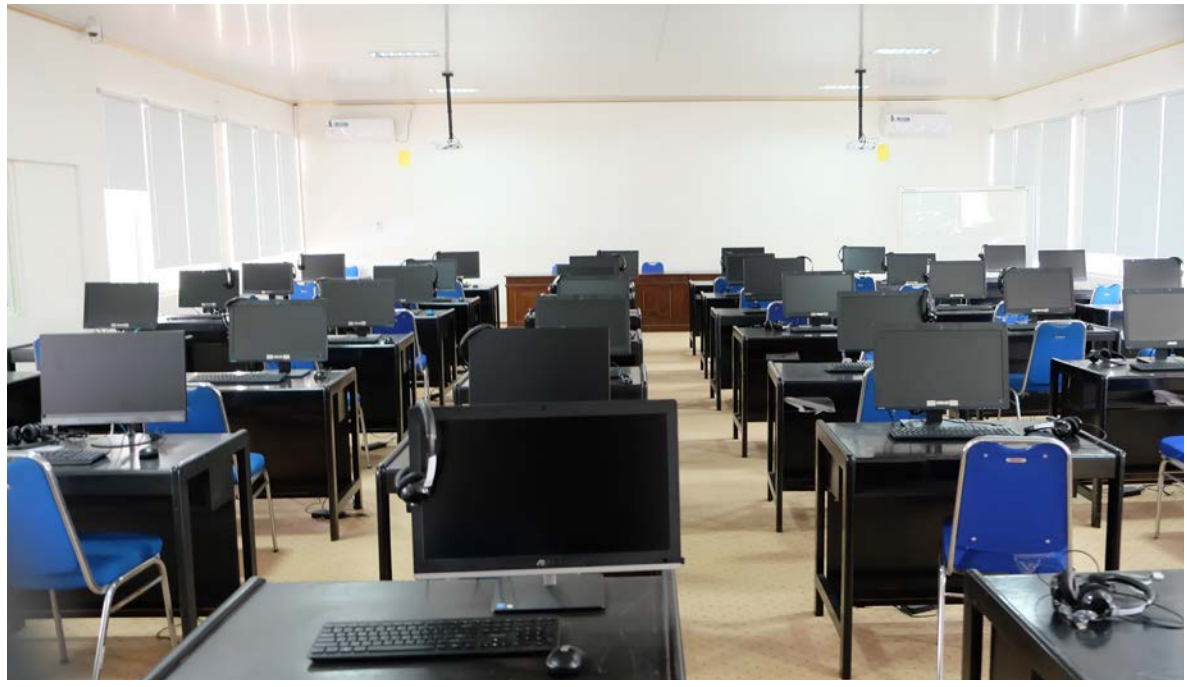


FASILITAS OLAHRAGA





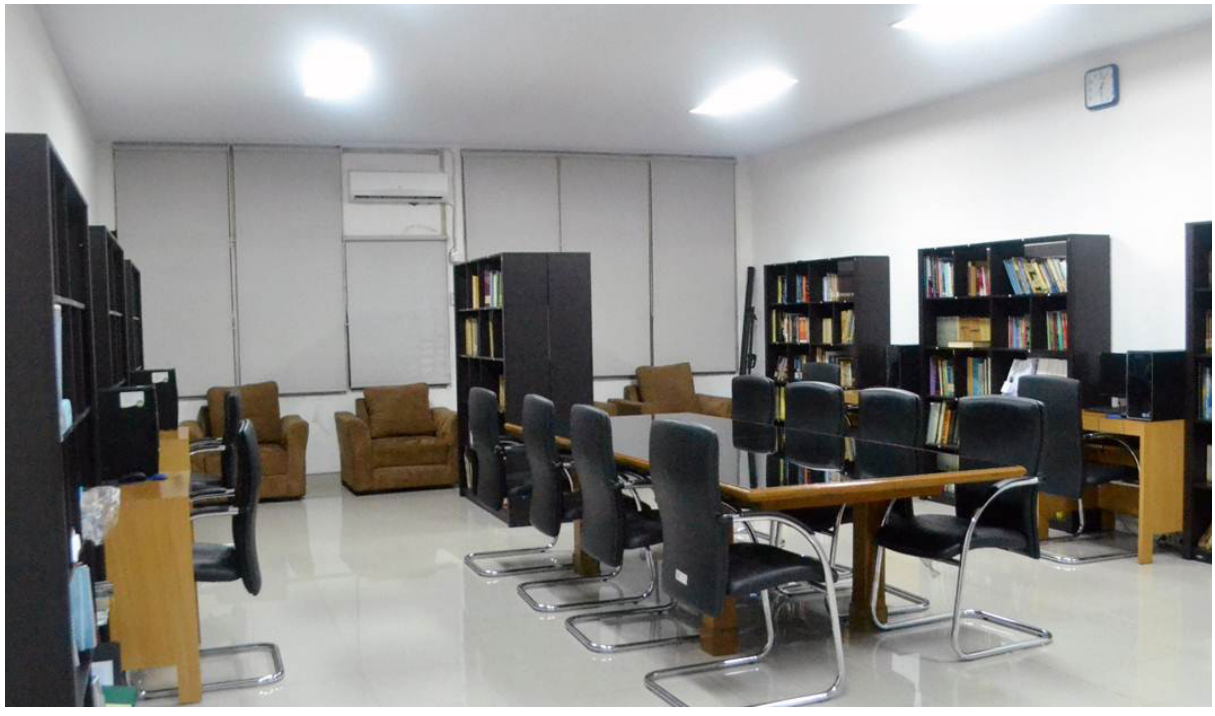
LAB KOMPUTER





PERPUSTAKAAN





RUANG KELAS





RUANG MAKAN





RUANG RAPAT





RUANG TUNGGU PENGAJAR





LOBBY





LINGKUNGAN SEKITAR





Lampiran VIII

Dokumentasi Pelaksana Pelatihan di BPSDM


SAYA BERSEDIA MENEGUR DAN DITEGUR DEMI
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
SAYA PILIH SELAMAT DAN SEHAT






TAMU


















KOMATSU
DOOS











Lampiran IX

Dokumen Rincian Peserta Pelatihan

1. Rincian Peserta Pelatihan Berdasarkan Bidang Pelatihan

a. DIPA

No	Unit Kerja	SDA	Konstruksi	Jalan Jembatan	Perumahan	Permukiman	PIW	Manajemen	Fungsional	Kepemimpinan
1	Balai I Medan	200	170	292	64	42	38	134	56	10
2	Balai II Palembang	146	169	162	47	52	24	148	27	10
3	Balai III Jakarta	73	331	60	48	72	52	95	41	1336
4	Balai IV Bandung	117	169	35	15	34	23	1021	20	304
5	Balai V Yogyakarta	177	252	38	67	53	41	157	55	0
6	Balai VI Surabaya	199	263	80	36	112	59	159	47	299
7	Balai VII Banjarmasin	138	186	125	21	74	0	149	0	316
8	Balai VIII Makassar	276	188	117	56	113	0	82	77	0
9	Balai IX Jayapura	28	110	202	28	57	37	266	65	26
10	BUCSD SDAK	117	48	0	0	0	0	0	0	0
11	BUCSD JPPPIW	0	0	66	55	49	41	0	0	0
12	Pusdiklat Menjafung	0	0	0	0	0	0	529	0	0
Total		**1471**	**1886**	**1177**	**437**	**658**	**315**	**2740**	**388**	**2301**
		11373								

Sumber: Pusdiklat, 2019

b. Kerjasama

No	Unit Kerja	SDA	Konstruksi	Jalan Jembatan	Perumahan	Permukiman	PIW	Manajemen	Fungsional	Kepemimpinan
1	Balai I Medan	0	71	0	0	28	0	0	0	0
2	Balai II Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Balai III Jakarta	37	0	19	0	134	0	0	30	0
4	Balai IV Bandung	0	59	0	0	40	0	0	0	0
5	Balai V Yogyakarta	30	70	0	0	0	0	0	0	0
6	Balai VI Surabaya	0	71	20	0	29	0	0	0	0
7	Balai VII Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Balai VIII Makassar	0	0	20	0	0	0	0	0	0
9	Balai IX Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BUCSD SDAK	192	57	0	0	0	0	0	0	0
11	BUCSD JPPPIW	0	0	0	0	168	0	0	0	0
12	Pusdiklat Menjafung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**259**	**328**	**59**	**0**	**399**	**0**	**0**	**30**	**0**
		1.075								

Sumber: Pusdiklat, 2019

2. Rincian Peserta Pelatihan Berdasarkan Bidang Pelatihan Jenis Kelamin

a. DIPA

No	Unit Kerja	SDAK		JLN,PIW, PERKIM		MENJAFUNG		Total Laki-laki	Total Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1	Balai I Medan	311	59	330	106	109	91	750	256
2	Balai II Palembang	216	99	217	68	98	87	531	254
3	Balai III Jakarta	300	104	142	90	872	600	1.314	794
4	Balai IV Bandung	220	66	71	36	826	519	1.117	621
5	Balai V Yogyakarta	328	101	135	64	322	183	785	348
6	Balai VI Surabaya	371	91	207	80	296	169	874	340
7	Balai VII Banjarmasin	256	68	153	67	98	61	507	196
8	Balai VIII Makassar	373	91	214	72	198	159	785	322
9	Balai IX Jayapura	102	36	252	72	125	87	479	195
10	BUCSD SDAK	131	34	0	0	0	0	131	34
11	BUCSD JPPPIW	0	0	170	41	0	0	170	41
12	Pusdiklat Menjafung	0	0	0	0	389	140	389	140
Total		**2.608**	**749**	**1.891**	**696**	**3.333**	**2.096**	**7.832**	**3.541**
		3.357		**2.587**		**5.429**		**11.373**	

Sumber: Pusdiklat, 2019

b. Kerjasama

No	Unit Kerja	SDAK		JLN,PIW, PERKIM		MENJAFUNG		Total Laki-laki	Total Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
1	Balai I Medan	55	16	17	11	0	0	72	27
2	Balai II Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Balai III Jakarta	29	8	99	54	22	8	150	70
4	Balai IV Bandung	44	15	17	23	0	0	61	38
5	Balai V Yogyakarta	81	19	0	0	0	0	81	19
6	Balai VI Surabaya	47	24	24	25	0	0	71	49
7	Balai VII Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Balai VIII Makassar	0	0	12	8	0	0	12	8
9	Balai IX Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BUCSD SDAK	184	65	0	0	0	0	184	65
11	BUCSD JPPPIW	0	0	91	77	0	0	91	77
12	Pusdiklat Menjafung	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**440**	**147**	**260**	**198**	**22**	**8**	**722**	**353**
		587		**458**		**30**		**1.075**	

Sumber: Pusdiklat, 2019

3. Rincian Peserta Pelatihan Berdasarkan Status Pegawai

a. DIPA

No	Unit Kerja	Pusat			Daerah			Total		
		PNS	NON PNS	Sub Total	PNS	NON PNS	Sub Total	PNS	NON PNS	Sub Total
1	Balai I Medan	579	194	773	208	25	233	787	219	1006
2	Balai II Palembang	515	173	688	89	8	97	604	181	785
3	Balai III Jakarta	1.941	86	2027	78	3	81	2019	89	2108
4	Balai IV Bandung	1.627	45	1672	66	0	66	1693	45	1738
5	Balai V Yogyakarta	781	145	926	196	11	207	977	156	1133
6	Balai VI Surabaya	849	178	1027	171	16	187	1020	194	1214
7	Balai VII Banjarmasin	413	163	576	78	49	127	491	212	703
8	Balai VIII Makassar	810	166	976	125	6	131	935	172	1107
9	Balai IX Jayapura	372	173	545	116	13	129	488	186	674
10	BUCSD SDAK	88	68	156	6	3	9	94	71	165
11	BUCSD JPPPIW	172	1	173	38	0	38	210	1	211
12	Pusdiklat Menjafung	498	22	520	0	9	9	498	31	529
Total		**8.645**	**1.414**	**10.059**	**1.171**	**143**	**1.314**	**9816**	**1557**	**11.373**
		10.059			**1.314**			**11.373**		

Sumber: Pusdiklat, 2019

b. Kerjasama

No	Unit Kerja	Pusat			Daerah			Total		
		PNS	NON PNS	Sub Total	PNS	NON PNS	Sub Total	PNS	NON PNS	Sub Total
1	Balai I Medan	13	0	13	82	4	86	95	4	99
2	Balai II Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Balai III Jakarta	170	3	173	47	0	47	217	3	220
4	Balai IV Bandung	40	0	40	59	0	59	99	0	99
5	Balai V Yogyakarta	0	0	0	100	0	100	100	0	100
6	Balai VI Surabaya	5	29	34	86	0	86	91	29	120
7	Balai VII Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Balai VIII Makassar	0	0	0	8	12	20	8	12	20
9	Balai IX Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BUCSD SDAK	182	67	249	0	0	0	182	67	249
11	BUCSD JPPPIW	155	0	155	13	0	13	168	0	168
12	Pusdiklat Menjafung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**565**	**99**	**664**	**395**	**16**	**411**	**960**	**115**	**1.075**
		664			**411**			**1.075**		

Sumber: Pusdiklat, 2019

4. Rincian Peserta Pelatihan Berdasarkan Kelulusan

a. DIPA

No	Unit Kerja	Pusat			Daerah			Total		
		Lulus	Tidak Lulus	Sub Total	Lulus	Tidak Lulus	Sub Total	Lulus	Tidak Lulus	Sub Total
1	Balai I Medan	734	39	773	227	6	233	961	45	1.006
2	Balai II Palembang	624	64	688	83	14	97	707	78	785
3	Balai III Jakarta	1.961	66	2.027	80	1	81	2.041	67	2.108
4	Balai IV Bandung	1.664	8	1.672	66	0	66	1.730	8	1.738
5	Balai V Yogyakarta	878	48	926	193	14	207	1.071	62	1.133
6	Balai VI Surabaya	1.020	7	1.027	184	3	187	1.204	10	1.214
7	Balai VII Banjarmasin	514	62	576	124	3	127	638	65	703
8	Balai VIII Makassar	936	40	976	129	2	131	1.065	42	1.107
9	Balai IX Jayapura	483	62	545	99	30	129	582	92	674
10	BUCSD SDAK	147	9	156	8	1	9	155	10	165
11	BUCSD JPPPIW	170	3	173	38	0	38	208	3	211
12	Pusdiklat Menjafung	520	0	520	9	0	9	529	0	529
Total		**9.651**	**408**	**10.059**	**1.240**	**74**	**1.314**	**10.891**	**482**	**11.373**
		10.059			**1.314**			**11.373**		

Sumber: Pusdiklat, 2019

b. Kerjasama

No	Unit Kerja	Pusat			Daerah			Total		
		Lulus	Tidak Lulus	Sub Total	Lulus	Tidak Lulus	Sub Total	Lulus	Tidak Lulus	Sub Total
1	Balai I Medan	13	0	13	86	0	86	99	0	99
2	Balai II Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Balai III Jakarta	171	2	173	45	2	47	216	4	220
4	Balai IV Bandung	40	0	40	59	0	59	99	0	99
5	Balai V Yogyakarta	0	0	0	47	53	100	47	53	100
6	Balai VI Surabaya	32	2	34	86	0	86	118	2	120
7	Balai VII Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Balai VIII Makassar	0	0	0	20	0	20	20	0	20
9	Balai IX Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BUCSD SDAK	238	11	249	0	0	0	238	11	249
11	BUCSD JPPPIW	155	0	155	12	1	13	167	1	168
12	Pusdiklat Menjafung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**649**	**15**	**664**	**355**	**56**	**411**	**1.004**	**71**	**1.075**
		664			**411**			**1.075**		

Sumber: Pusdiklat, 2019

5. Rincian Peserta Pelatihan Berdasarkan Predikat Kelulusan

a. DIPA

No	Unit Kerja	Pusat					Daerah					Total				
		SM	M	BS	B	TL	SM	M	BS	B	TL	SM	M	BS	B	TL
1	Balai I Medan	1	121	526	86	39	0	16	180	31	6	1	137	706	117	45
2	Balai II Palembang	2	74	461	87	64	0	5	60	18	14	2	79	521	105	78
3	Balai III Jakarta	1	170	623	1167	66	0	0	75	5	1	1	170	698	1.172	67
4	Balai IV Bandung	7	1.148	500	9	8	1	12	52	1	0	8	1.160	552	10	8
5	Balai V Yogyakarta	9	333	437	99	48	0	10	109	74	14	9	343	546	173	62
6	Balai VI Surabaya	0	161	656	203	7	0	1	177	6	3	0	162	833	209	10
7	Balai VII Banjarmasin	30	149	270	65	62	2	10	111	1	3	32	159	381	66	65
8	Balai VIII Makassar	1	99	735	101	40	0	3	93	33	2	1	102	828	134	42
9	Balai IX Jayapura	14	119	338	12	62	4	6	74	15	30	18	125	412	27	92
10	BUCSD SDAK	0	7	105	35	9	0	0	4	4	1	0	7	109	39	10
11	BUCSD JPPPIW	0	37	128	5	3	0	0	38	0	0	0	37	166	5	3
12	Pusdiklat Menjafung	1	52	453	14	0	0	0	9	0	0	1	52	462	14	0
Total		**66**	**2.470**	**5.232**	**1.883**	**408**	**7**	**63**	**982**	**188**	**74**	**73**	**2.533**	**6.214**	**2.071**	**482**

Sumber: Pusdiklat, 2019

b. Kerjasama

No	Unit Kerja	Pusat					Daerah					Total				
		SM	M	BS	B	TL	SM	M	BS	B	TL	SM	M	BS	B	TL
1	Balai I Medan	11	0	0	2	0	0	4	82	0	0	11	4	82	2	0
2	Balai II Palembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Balai III Jakarta	0	0	146	25	2	0	0	28	17	2	0	0	174	42	4
4	Balai IV Bandung	0	2	38	0	0	0	23	35	1	0	0	25	73	1	0
5	Balai V Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	4	32	11	53	0	4	32	11	53
6	Balai VI Surabaya	0	0	30	2	2	0	0	83	3	0	0	0	113	5	2
7	Balai VII Banjarmasin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Balai VIII Makassar	0	0	0	0	0	0	1	17	2	0	0	1	17	2	0
9	Balai IX Jayapura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BUCSD SDAK	0	29	165	44	11	0	0	0	0	0	0	29	165	44	11
11	BUCSD JPPPIW	0	0	109	46	0	0	0	10	2	1	0	0	119	48	1
12	Pusdiklat Menjafung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**11**	**31**	**488**	**119**	**15**	**0**	**32**	**287**	**36**	**56**	**11**	**63**	**775**	**155**	**71**

Sumber: Pusdiklat, 2019

Lampiran X

Lembar Kesepakatan Capaian Program
Pengembangan SDM Tahun 2019

LEMBAR KESEPAKATAN

KONFIRMASI CAPAIAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

BADAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2019

Pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, bertempat di Tangerang, telah dilaksanakan Finalisasi Capaian Program dan Laporan Kinerja BPSDM Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM, dengan poin-poin hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Capaian Pemantauan Kinerja

No.	Unit Organisasi	Jumlah ASN yang Terpantau Kinerjanya
1.	Sekretariat Jenderal	547
2.	Inspektorat Jenderal	240
3.	Ditjen Sumber Daya Air dan Dewan Sumber Daya Air	7.327
4.	Ditjen Bina Marga dan BPJT	6.333
5.	Ditjen Cipta Karya dan BPPSPAM	2.290
6.	Ditjen Penyediaan Perumahan	481
7.	Ditjen Bina Konstruksi	1.079
8.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	158
9.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	181
10.	Badan Penelitian dan Pengembangan	930
11.	Badan Pengembangan SDM	468
Total PNS Kementerian PUPR		**20.034**

Sumber: Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, 2019

2. Capaian Penilaian Kompetensi

a. Rekap Realisasi Penilaian Kompetensi

No.	Kegiatan	Realisasi
1	**Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Jabatan Administrasi, Fungsional, Kesatkeran**	2.131
	Eselon II	7
	Eselon III	120
	Eselon IV	329
	Pelaksana	1.069
	Jabatan Fungsional	100
	Kasatker	168
	PPK	275
	Non PNS	63
2	**Penilaian Potensi dan Kompetensi Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi**	0
3	**Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Pemetaan**	159
4	**Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Jabatan Administrasi Pelaksana**	1.458
	Pelaksana	1.458
	CPNS	0
	Non PNS	0
Total		**3.748**

Sumber: Balai Penilaian Kompetensi, 2019

b. Rekap Realisasi Penilaian Kompetensi

No	Jabatan	Capaian	Hasil				
			Kompeten	Belum kompeten	Direkomendasikan	Tidak direkomendasikan	Proses verifikasi
PEMETAAN							
1	Eselon I	-	-	-	-	-	-
2	Eselon II	7	6	1	-	-	-
3	Eselon III	120	73	45	-	-	2
4	Eselon IV	329	239	90	-	-	-
5	Pelaksana	2.346	1.284	1.057	-	-	5
6	Kasatker	168	95	72	-	-	1
7	PPK	275	52	222	-	-	1
8	Non PNS	63	32	31	-	-	-
Jumlah Pemetaan		3.308	1.781	1.518	-	-	9
SELEKSI							
9	Jabatan Fungsional	100	-	-	63	37	-
10	Lolos Butuh	340	-	-	256	84	-
Jumlah Seleksi		440	-	-	319	121	
JUMLAH		**3.748**	**1.781**	**1.518**	**319**	**121**	**9**

Sumber: Balai Penilaian Kompetensi, 2019

3. Capaian Pemetaan Karir

Kegiatan	Realisasi (Orang)
Kegiatan Pemetaan Karir ASN PUPR	2.131

Sumber: Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, 2019

4. Capaian Pendidikan

Bidang	ASN Pusat			ASN Daerah		
	On-going Tahun 2019	Lulus Tahun 2019	Total	*On-going* Tahun 2019	Lulus Tahun 2019	Total
Bidang SDA dan Konstruksi	69	25	94	33	60	93
Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	41	26	67	17	40	57
Bidang Manajemen	21	19	40	1	9	10
Sub Total	**131**	**70**	**201**	**51**	**109**	**160**
Total ASN Terdidik (orang)	**361**					

Sumber: Pusdiklat, 2019

5. Capaian Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum

No	Output Kegiatan	Capaian (Orang)
1	Jumlah SDM Bidang Pekerjaan Umum yang melaksanakan Pendidikan Konstruksi Bangunan Gedung	41
2	Jumlah SDM Bidang Pekerjaan Umum yang melaksanakan Pendidikan Konstruksi Bangunan Air	46
3	Jumlah SDM Bidang Pekerjaan Umum yang melaksanakan Pendidikan Konstruksi Jalan Jembatan	50
Total		137

Sumber: Politeknik Pekerjaan Umum, 2019

6. Capaian Pelatihan

a. Capaian Pelatihan dengan Alokasi Anggaran DIPA

No	Unit Kerja	Realisasi Perbidang						Total Target (Orang)	Total Realisasi Peserta (Orang)
		SDAK		Jalan, Perkim, PIW		Menjafung			
		Target DIPA	Realisasi (Orang)	Target DIPA	Realisasi (Orang)	Target DIPA	Realisasi (Orang)		
1	BDW PUPR I Medan	400	370	510	436	220	200	1.130	1.006
2	BDW PUPR II Palembang	330	315	360	285	210	185	900	785
3	BDW PUPR III Jakarta	390	404	330	232	1.520	1.472	2.240	2.108
4	BDW PUPR IV Bandung	330	286	150	107	1.423	1.345	1.903	1.738
5	BDW PUPR V Yogyakarta	420	429	270	199	500	505	1.190	1.133
6	BDW PUPR VI Surabaya	550	462	390	287	480	465	1.420	1.214
7	BDW PUPR VII Banjarmasin	330	324	300	220	210	159	840	703
8	BDW PUPR VIII Makassar	400	464	330	286	370	357	1.100	1.107
9	BDW PUPR IX Jayapura	210	138	330	324	240	212	780	674
10	Balai Uji Coba Sistem Diklat SDAK	0	165	0	0	0	0	0	165
11	Balai Uji Coba Sistem Diklat JPPPIW	0	0	0	211	0	0	0	211
12	Pusat Pendidikan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	0	0	0	0	240	529	240	529
Total		**3.360**	**3.357**	**2.970**	**2.587**	**5.413**	**5.429**	**11.743**	**11.373**

Sumber: Pusdiklat, 2019

b. Capaian Pelatihan Kerjasama

No	Unit Kerja	Realisasi Perbidang			Total Realisasi Peserta (Orang)
		SDAK	Jalan, Perkim, PIW	Menjafung	
		Realisasi (Orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (Orang)	
1	BDW PUPR I Medan	71	28	0	99
2	BDW PUPR II Palembang	0	0	0	0
3	BDW PUPR III Jakarta	37	153	30	220
4	BDW PUPR IV Bandung	59	40	0	99
5	BDW PUPR V Yogyakarta	100	0	0	100
6	BDW PUPR VI Surabaya	71	49	0	120
7	BDW PUPR VII Banjarmasin	0	0	0	0
8	BDW PUPR VIII Makassar	0	20	0	20
9	BDW PUPR IX Jayapura	0	0	0	0
10	Balai Uji Coba Sistem Diklat SDAK	249	0	0	249
11	Balai Uji Coba Sistem Diklat JPPPIW	0	168	0	168
12	Pusat Pendidikan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	0	0	0	0
Total		**587**	**458**	**30**	**1.075**

Sumber: Pusdiklat, 2019

c. Rincian Kelulusan Peserta Pelatihan

No	Unit Kerja	Pembiayaan Melalui DIPA						Pembiayaan Melalui Kerjasama					
		Peserta Lulus			Peserta Tidak Lulus			Peserta Lulus			Peserta Tidak Lulus		
		Pusat	Daerah	Total	Pusat	Daerah	Total	Pusat	Daerah	Total	Pusat	Daerah	Total
1	Balai I Medan	734	227	961	39	6	45	13	86	99	0	0	0
2	Balai II Palembang	624	83	707	64	14	78	0	0	0	0	0	0
3	Balai III Jakarta	1961	80	2041	66	1	67	171	45	216	2	2	4
4	Balai IV Bandung	1664	66	1730	8	0	8	40	59	99	0	0	0
5	Balai V Yogyakarta	878	193	1071	48	14	62	0	47	47	0	53	53
6	Balai VI Surabaya	1020	184	1204	7	3	10	32	86	118	2	0	2
7	Balai VII Banjarmasin	514	124	638	62	3	65	0	0	0	0	0	0
8	Balai VIII Makassar	936	129	1065	40	2	42	0	20	20	0	0	0
9	Balai IX Jayapura	483	99	582	62	30	92	0	0	0	0	0	0
10	Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi	147	8	155	9	1	10	238	0	238	11	0	11
11	Balai Uji Coba Sistem Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW	170	38	208	3	0	3	155	12	167	0	1	1
12	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional	520	9	529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**9.651**	**1.240**	**10.891**	**408**	**74**	**482**	**649**	**355**	**1.004**	**15**	**56**	**71**
		11.373						**1.075**					
		12.448											

Sumber: Pusdiklat, 2019

d. Capaian Pelatihan Sertifikasi

No	Nama Pelatihan	Lembaga/Asosiasi Penerbit Sertifikasi	SDM Ahli yang dihasilkan	Jumlah Peserta Sertifikasi	Jumlah Lulus Sertifikasi
Bidang SDA				**440**	**440**
1	Perencanaan Teknis Bendungan	KNIBB	Ahli Bendungan	8	8
2	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaaan Bendungan	KNIBB	Ahli Bendungan	26	26
3	O & P Bendungan	KNIBB	Ahli Bendungan	30	30
4	Perencanaan Teknis Sabo Dam	HATHI	Ahli SDA	40	40
5	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Pantai	HATHI	Ahli SDA	11	11
6	Perencanaan Teknis Sungai	HATHI	Ahli SDA	19	19
7	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaaan Sungai	HATHI	Ahli SDA	34	34
8	Perencanaan Teknis Bangunan Pantai	HATHI	Ahli SDA	17	17
9	Perencanaan Teknis Embung	HATHI	Ahli SDA	38	38
10	O & P Rawa	HATHI	Ahli SDA	14	14
11	O & P Irigasi	HATHI	Ahli SDA	53	53
12	Penanggulangan Banjir	HATHI	Ahli SDA	24	24
13	Perencanaan Teknis Air Baku	HATHI	Ahli SDA	14	14
14	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Air Baku	HATHI	Ahli SDA	14	14
15	Perencanaan Teknis Hidrologi dan Alokasi Air	HATHI	Ahli SDA	41	41
16	Pengelolaan SDA Terpadu	HATHI	Ahli SDA	57	57
Bidang Konstruksi				**1.556**	**953**
1	SMK3 Ahli Muda	A2K4	Ahli Muda K3	531	336
2	SMK3 Konstruksi Ahli Madya	A2K4	Ahli Madya K3	33	32
3	Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	LKPP	Ahli PBJ	992	585
Bidang Jalan dan Jembatan				**180**	**163**
1	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan (Sertifikasi LPJKN-HPJI)	HPJI	Ahli Muda Jalan	111	102
2	Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan (Sertifikasi LPJKN - HPJI) Ahli Muda	HPJI	Ahli Muda Jembatan	34	31
3	Perencanaan Jalan Berkeselamatan (Bersertifikasi HPJI) Ahli Muda Keselamatan Jalan	HPJI	Ahli Muda Keselamatan Jalan	35	30
Bidang Perumahan				**81**	**75**
1	Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Komisioning Instalasi Pengolahan Air	LSP-AMI	Ahli Komisioning IPA	23	22
2	Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	BPSDM	Ahli Bangunan Gedung Negara	58	53
Bidang PIW				**12**	**12**
1	Sistem Informasi Pemetaan untuk Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Ikatan Surveyor Indonesia	Ahli Survey dan Pemetaan	12	12
Bidang Manajemen				**248**	**166**
1	Bendahara Pengeluaran	Kemenkeu	Bendahara Negara Tersertifikasi	194	112
2	Training Officer Course (TOC)	LAN	Penyelenggara Pelatihan	54	54
Total				**2.517**	**1.809**

Sumber: Pusdiklat, 2019

7. Capaian Pengembangan Jabatan Fungsional

No	Kegiatan / Jabatan Fungsional	Jumlah (Orang)
Penilaian Angka Kredit		220
1	Widyaiswara	11
2	Teknik Pengairan	29
3	Teknik Jalan dan Jembatan	138
4	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	3
5	Teknik Penyehatan Lingkungan	7
6	Pembina Jasa Konstruksi	32
Penyusunan DUPAK		72
1	Widyaiswara	10
2	Teknik Pengairan	5
3	Teknik Jalan dan Jembatan	43
4	Pembina Jasa Konstruksi	14
Pengangkatan Pertama		68
Pengangkatan Perpindahan Jabatan		
1	Auditor	1
2	Peneliti	8
3	Perekayasa	1
4	Teknik Jalan dan Jembatan	1
Pengangkatan Pertama		
5	Arsiparis	2
6	Litkayasa	1
7	Peneliti	5
8	Perawat Gigi	1
9	Perencana	1
10	Teknik Jalan dan Jembatan	18
11	Teknik Pengairan	6
12	Teknik Penyehatan Lingkungan	2
13	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	16
14	Widyaiswara	5
Pengangkatan *Inpassing* (Uji Portofolio)		104
1	Teknik Pengairan	20
2	Teknik Jalan dan Jembatan	32
3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	29
4	Teknik Penyehatan Lingkungan	11
5	Pembina Jasa Konstruksi	12
Total		464

Sumber: Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, 2019

Tangerang, Januari 2020
Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM TA. 2019

Sekretariat BPSDM

(Hary Prasetya)

Perwakilan Pusat di Badan Pengembangan SDM

Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

(Cahyo Putro)

Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi

(Amir Hamzah)

Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

(ERO)

Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional

(Husnan Tajrie)

Tangerang, Januari 2020
Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM TA. 2019

Perwakilan Balai di Badan Pengembangan SDM

Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan

(R. Belanto H.)

Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang

( )

Balai Diklat PUPR Wilayah III Jakarta

(YUNALDI, ST, MT)

Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung

(HASTO A. SAPOETRO)

Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta

(ANWAR)

Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya

(AHMAD KHOLIDI NASUTION)

Balai Diklat PUPR Wilayah VII Banjarmasin

( )

Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makasar

(Nugroho W, ST. MT.)

Balai Diklat PUPR Wilayah IX Jayapura

(Wally Winardi)

Balai Uji Coba Sistem Diklat SDA dan Konstruksi

(DADANG KARMEN)

Balai Uji Coba Sistem Diklat Jalan, Perkim dan PIW

(IR. SISKA MARABINTANG, MSi)

Balai Penilaian Kompetensi

(Lina Anggraini)

Politeknik Pekerjaan Umum

(Ade Budiyanto)